LAPORAN AKHIR
KAJIAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) TANGERANG BAGIAN UTARA



BAPPEDA KABUPATEN TANGERANG
TAHUN 2025

EXECUTIVE SUMMARY

In general, this study describes the background, the legalistic and conceptual framework, the methodology, the feasibility analysis, and the political support related to the establishment of North Tangerang Regency as a New Autonomous Region (DOB). The study aims to provide territorial analysis and the necessary recommendations for the proposed regional division of Northern Tangerang. It is expected that this study will serve as input, reference, and consideration for the Tangerang Regency Government, the Ministry of Home Affairs, and the House of Representatives of the Republic of Indonesia in making further policy decisions.

The study employs secondary data collection from government institutions and other official sources. Data analysis is conducted using a mixed-methods approach. Quantitative methods include demographic statistical analysis, regional economic analysis, fiscal projections and assessment of regional financial capacity, and evaluation of the capabilities of both the prospective new autonomous region and the parent region after regional division. Meanwhile, qualitative methods are used to understand social, political, institutional, and regulatory aspects that cannot be explained solely through statistical figures. The qualitative approach is carried out through Focus Group Discussions (FGDs) and legalistic analysis.

Using the analytical framework of Government Regulation Number 78 of 2007, both the proposed North Tangerang DOB and its parent region meet all minimum requirements and are categorized as Highly Capable of becoming autonomous regions. The proposed North Tangerang DOB obtained a total score of 423 and the parent region scored 438, both surpassing the threshold of 420. All assessment factors—including population, economic capacity, regional potential, and financial capability—fall within the required scoring range. The division of Tangerang Regency is deemed feasible to recommend because it has sufficient capacity to administer governance and manage development independently.

This study offers four key recommendations. First, further research is needed regarding community perceptions, aspirations, and willingness, including those of village governments in the northern area, to ensure social and political consent and readiness if regional division is to be pursued. Second, a comprehensive assessment of the potential location for the North Tangerang DOB capital is required, taking into account accessibility, land availability, basic infrastructure, area development potential, and disaster risk mitigation. Third, a master plan for the development of the North Tangerang DOB is necessary, encompassing spatial planning, public services, governmental institutions, and a medium-term fiscal strategy to ensure the sustainability of the new region's operations. Fourth, enhanced coordination is required between the Tangerang Regency Government, the Banten Provincial Government, and the Central Government so that administrative processes, document verification, and the stages of establishing the DOB proceed in accordance with statutory regulations.

RINGKASAN

Secara umum kajian ini menggambarkan latar belakang, kerangka legalistik dan konseptual, metodologi, analisis kelayakan, serta dukungan politik dalam pembentukan Kabupaten Tangerang Utara sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Kajian bertujuan menyediakan analisis kewilayahan dan rekomendasi yang diperlukan bagi pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian Utara. Kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan, rujukan, dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan lanjutan.

Metode kajian dilakukan melalui pengumpulan data sekunder dari lembaga pemerintah dan sumber resmi lainnya. Analisis data dilakukan melalui *metode mixed system*. Metode kuantitatif dilakukan melalui analisis statistik demografi, analisis ekonomi regional, proyeksi fiskal dan kapasitas keuangan daerah, penilaian kemampuan calon daerah otonom baru dan wilayah induk pasca pemekaran. Sedangkan metode kualitatif digunakan untuk memahami aspek sosial, politik, kelembagaan, dan regulasi yang tidak dapat dijelaskan dengan semata-mata bersandar pada angka statistik. Teknik kualitatif dilakukan melalui *Focus Group Discussions* (FGD) dan analisis legalistik.

Dengan menggunakan pisau bedah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, baik calon Daerah Otonom Baru (DOB) Tangerang Utara maupun wilayah induknya memenuhi seluruh persyaratan minimum dan sama-sama berada pada kategori Sangat Mampu menjadi daerah otonom. DOB Tangerang Utara memperoleh nilai total 423 dan wilayah induk memperoleh 438, keduanya melampaui ambang batas 420. Seluruh faktor penilaian kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan juga berada dalam rentang nilai yang ditetapkan. Pemekaran Kabupaten Tangerang layak direkomendasikan karena memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola pembangunan secara mandiri. Rekomendasi kajian ini *pertama,* perlunya penelitian lanjutan terkait persepsi, aspirasi dan kesediaan masyarakat, termasuk pemerintah desa di wilayah utara, untuk memastikan persetujuan serta kesiapan sosial dan politik jika akan dilakukan pemekaran. *Kedua,* perlu kajian komprehensif mengenai calon lokasi ibu kota DOB Tangerang Utara, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, ketersediaan lahan, infrastruktur dasar, potensi pengembangan kawasan, serta aspek mitigasi risiko bencana. *Ketiga,* perlu rencana induk *(masterplan)* pembangunan DOB Tangerang Utara, yang mencakup tata ruang, pelayanan publik, kelembagaan pemerintahan, dan strategi fiskal jangka menengah untuk memastikan keberlanjutan operasional daerah baru. *Keempat,* perlu penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat, agar proses administratif, verifikasi dokumen, dan tahapan pembentukan DOB berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T, yang telah melimpahkan anugerah dan karunia yang tiada terhingga serta melancarkan segala usaha dalam kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Bagian Utara tahun 2025. Adapun kajian ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efektif di daerah khususnya di Kabupaten Tangerang. Disamping itu diharapkan pula bahwa hasil kajian dapat menjadi tolok ukur bagi pelaksanaan pemekaran daerah agar pemekaran yang dilakukan tidak mengakibatkan daerah lama menjadi tertinggal. Selain itu kajian juga sebagai respon bagi penyelenggara pemerintahan bagi perkembangan masyarakat di Tangerang Bagian Utara.

Kami sangat menyadari, walaupun telah berbuat secara maksimal namun sebagai manusia biasa tentunya banyak sekali kekurangan atau kesalahan dalam penulisan kajian Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Bagian Utara ini, untuk itu kami menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Disamping itu, Kami juga sangat berkeyakinan bahwa setiap ide dan gagasan memiliki manfaat yang sangat besar. Mudah-mudahan kajian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, efektif, adaptif, serta responsif terhadap perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis.

Pada kesempatan ini tim kajian menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala bantuan serta dukungan dari pihak-pihak yang telah membantu, sekaligus memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan dan kekurangan selama ini. Semoga ketulusan dan kebaikan serta bantuan yang sangat berharga yang telah diberikan kepada kami, mendapatkan tempat di sisi Allah *Subhanna Wataallah* dan mendapatkan balasanNya yang setimpal, Amin.

Wassalam.

Jakarta, 14 November 2025

Tim Kajian

DAFTAR ISI

Halaman

EXECUTIVE SUMMARY i
RINGKASAN ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 5
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan 5
1.4 Manfaat Kegiatan 5
1.5 Target/Sasaran 5
1.6 Keluaran/Hasil Pekerjaan 6
1.7 Definisi Operasional 6

BAB II DESENTRALISASI, PENATAAN DAERAH, DAN .....
STUDI PENDAHULUAN 7
2.1 Desentralisasi dan Penataan Daerah 7
2.1.1 Desentralisasi 7
2.1.2 Penataan Daerah 15
2.2 Pendekatan Wilayah: Dimensi Geografis, Demografis, ...
Ekonomis, Sosial, dan Politik 19
2.3 Studi Pendahuluan Pemekaran Wilayah di Indonesia 29
2.4 Kerangka analisis 34

BAB III METODOLOGI PENULISAN 43
3.1 Metodologi Yang Digunakan 43
3.1.1 Persiapan Kajian 43
3.1.2 Pendekatan Kajian 43
3.1.3 *Metode Mixed System* 44

3.1.3.1 Metode Kuantitatif 44
3.1.3.2 Metode Kualitatif 46
3.1.4 Sumber Data 47
3.1.5 Prosedur dan Validasi Data 47
3.2 Sistematika Penyusunan Laporan Kajian Antara ..... dan Akhir 48
3.3 Waktu Kegiatan 48
3.4 Analisis spasial: Penggunaan GIS layer batas ..... Administratif, Penggunaan Lahan, Infrastruktur,..... Kerawanan Lingkungan (Banjir, Abrasi),..... 43
3.5 Sumber data: BPS (Kabupaten & Kecamatan), Pemprov.. Banten, Kementerian Dalam Negeri, dokumen Perda,..... peta RTRW, data sampel lapangan..... 43
3.6 Prosedur Validasi Data. 43
3.7 Rencana Jadwal Penelitian. 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 50
4.1 Analisis Geografis dan Demografis..... 50
4.1.1 Analisis Geografis..... 50
4.1.1.1 Aksesibilitas 51
4.1.2 Analisis Demografis..... 54
4.1.2.1 Jumlah Penduduk 55
4.1.2.2 Kepadatan Penduduk 57
4.1.2.3 Struktur Demografi..... 62
4.1.2.4 Pertumbuhan Penduduk 63
4.1.2.5 Hubungan Pertumbuhan Penduduk ..... dengan Pembangunan 68
4.2 Analisis Ekonomi 69
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah 69
4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto..... 74
4.2.2.1 Struktur Ekonomi Daerah 74
4.2.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional .... Bruto (PDRB) 77

4.2.3 Infrastruktur 83
4.2.3.1 Infrastruktur Transportasi 83
4.2.3.2 Infrastruktur Kawasan Industri 88
4.2.3.3 Infrastruktur Energi 90
4.2.3.4 Infrastruktur Kelembagaan Ekonomi 93
4.2.4 Kesenjangan Regional 95
4.3 Analisis Sosial dan Budaya 98
4.3.1 Pembangunan Manusia 98
4.3.2 Pendidikan 101
4.3.3 Kesehatan 102
4.3.4 Ketenagakerjaan 103
4.3.5 Tingkat Pengangguran 108
4.3.6 Integrasi Sosial Pasca Urbanisasi 111
4.4 Administrasi Pemerintahan 111
4.5 Penilaian Kemampuan Daerah Otonom Baru 113
4.6 Dukungan Politik 126

BAB V PENUTUP 133
5.1 Kesimpulan 133
5.2 Rekomendasi 133

DAFTAR PUSTAKA 135

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Dimensi Geografi 21
Tabel 2.2 Dimensi Demografi 22
Tabel 2.3 Dimensi Ekonomi 24
Tabel 2.4 Dimensi Sosial 26
Tabel 2.5 Dimensi Politik 28
Tabel 2.6 Model Skoring dan Pembobotan (*Weighted Scoring Model*) 37
Tabel 2.7 Pedoman Penilaian Kelayakan Pemekaran Daerah Menurut ..... PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, ... Penghapusan, dan Penggabungan Daerah 38
Tabel 2.8 Kerangka Analisis Terpadu Menghubungkan Tiga Tahapan ..... Utama Pemekaran Wilayah 42
Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian Pembentukan, Penghapusan, dan ..... Penggabungan Daerah 45
Tabel 3.2 Pelaksanaan Pekerjaan (*work plan*) 49
Tabel 4.1 Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Tangerang 50
Tabel 4.2 Tingkat Ketinggian Permukaan Tanah dan Jarak ke Ibukota ..... Kabupaten 52
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang, 2023 55
Tabel 4.4 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tangerang, 2019-2024 58
Tabel 4.5 Rata-rata Kepadatan Penduduk per wilayah, 2019-2024 59
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di ..... Kabupaten Tangerang, 2020-2023 65
Tabel 4.7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang,..... 2020-2024 (dalam juta rupiah)..... 71
Tabel 4.8 Realisasi Pajak Daerah Wilayah Utara, 2022-2024 ..... (dalam Juta Rupiah) 72
Tabel 4.9 Struktur Ekonomi Kabupaten Tangerang, 2022-2024 76
Tabel 4.10 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang, 2021-2024..... 78
Tabel 4.11 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang ..... berdasarkan Konsumsi, 2011-2024 81

Tabel 4.12 PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Kabupaten ..... Tangerang, 2010-2024 85
Tabel 4.13 Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Kabupaten ..... Tangerang, 2010-2024 86
Tabel 4.14 Jumlah Koperasi di Kabupaten Tangerang, 2021-2023 93
Tabel 4.15 Pertumbuhan Ekonomi Regional di sekitar Kabupaten ..... Tangerang, 2022-2024 96
Tabel 4.16 Indeks Gini Kabupaten Kota di Provinsi Banten, 2011-2021 .. 97
Tabel 4.17 IPM Kabupaten Tangerang, 2005-2024 98
Tabel 4.18 Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tangerang, 2023 101
Tabel 4.19 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tangerang, 2023 102
Tabel 4.20 Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten.. Tangerang 102
Tabel 4.21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin ... di Kabupaten Tangerang (dalam Persen)..... 105
Tabel 4.22 Jumlah Nelayan Berdasarkan Kecamatan 105
Tabel 4.23 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis..... Kelamin di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan ..... Nasional 109
Tabel 4.24 Kantor Pemerintahan dan Aparatur yang ada di kecamatan..... induk dan utara..... 112
Tabel 4.25 Data dan Sumber Data yang Digunakan untuk Penilaian ..... Kemampuan DOB Tangerang Utara 114
Tabel 4.26 Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding, Interval Nilai dan.... Pedoman Pemberian Skor bagi Calon DOB Tangerang Utara . 119
Tabel 4.27 Penilaian Skor Calon DOB Tangerang Utara dan Wilayah ..... Induk..... 122

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tangerang..... 57
Gambar 4.2 Projeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang..... 60
Gambar 4.3 Projeksi Kepadatan Penduduk Tangerang Utara..... 60
Gambar 4.4 Projeksi Kepadatan Penduduk Wilayah Induk..... 61
Gambar 4.5 Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2024 62
Gambar 4.6 Trend Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten .....
Tangerang 66
Gambar 4.7 Trend Laju Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Induk..... 67
Gambar 4.8 Trend Laju Pertumbuhan Penduduk di Tangerang .....
Bagian Utara 67
Gambar 4.9 Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Tangerang Tahun.....
2020-2024 70
Gambar 4.10 Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Utara Tahun.....
2022-2024 dan Proyeksi Tahun Berikutnya 73
Gambar 4.11 Pendapatan Pajak Daerah di Wilayah Induk Tahun.....
2022-2024 dan Proyeksi Tahun Mendatang 74
Gambar 4.12 Grafik Pertumbuhan PDRB Tahun 2021-2024 dan.....
Proyeksinya di Kabupaten Tangerang..... 79
Gambar 4.13 Trend Analysis Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....
dan Belanja Pemerintah di Kabupaten Tangerang, ...
2011-2024 82
Gambar 4.14 Peta Jaringan Transportasi Kereta Api di Kabupaten.....
Tangerang 84
Gambar 4.15 Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Tangerang..... 85
Gambar 4.16 Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Kabupaten ..
Tangerang, 2010-2024, dan Proyeksinya 87
Gambar 4.17 Trend Analysis Kontribusi Sektor Industri terhadap.....
PDRB Kabupaten Tangerang..... 88
Gambar 4.18 Peta Kawasan Industri di Kabupaten Tangerang 89

Gambar 4.19 Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten..... Tangerang 91
Gambar 4.20 Trend Analisis Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan .... Gas terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang..... 92
Gambar 4.21 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tangerang, ... 2021-2023 94
Gambar 4.22 Trend Analisis Kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap.. PDRB Kabupaten Tangerang..... 95
Gambar 4.23 Trend Analisis IPM di Kabupaten Tangerang 99
Gambar 4.24 Trend Analisis Dependency Ratio di Kabupaten ..... Tangerang 103
Gambar 4.25 Kawasan Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang..... 107
Gambar 4.26 Kawasan Lahan Tanaman Pangan di Kabupaten ..... Tangerang 107
Gambar 4.27 Trend Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di..... Kabupaten Tangerang..... 109
Gambar 4.28 Trend Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di..... Provinsi Banten 110
Gambar 4.29 Trend Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional.... 110

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi di Indonesia dilaksanakan melalui pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan aspirasi dan kebutuhan lokal. Pelaksanaannya diharapkan dapat mendekatkan fungsi-fungsi pemerintahan dengan masyarakat, sehingga pengambilan keputusan publik, perencanaan pembangunan, dan penyediaan layanan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, terdapat sejumlah daerah dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduk yang tinggi, serta kompleksitas persoalan sosial ekonomi yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan beban kerja pemerintahan terlalu berat dan rentang kendali birokrasi semakin melebar. Kapasitas birokrasi yang terbatas berdampak pada rendahnya jangkauan dan kualitas pelayanan publik, lemahnya efektivitas koordinasi pemerintahan, serta tidak meratanya pembangunan dalam satu daerah. Selain itu, representasi politik dan pengakuan identitas lokal kurang terakomodasi, dan potensi ekonomi di beberapa wilayah belum termanfaatkan secara optimal.

Faktor-faktor tersebut menjadi alasan akademik maupun praktis untuk mempertimbangkan pemekaran daerah sebagai instrumen penataan pemerintahan dan percepatan pembangunan. Pembentukan daerah otonom baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali birokrasi, meningkatkan efisiensi administratif, memperkuat representasi politik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Studi menunjukkan bahwa apabila direncanakan dan dikelola secara baik, pemekaran daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Widada, Hakim, dan Mulatsih (2014) terhadap 45 kabupaten/kota hasil pemekaran pada periode 2008–2010 menunjukkan bahwa pemekaran daerah yang diikuti dengan

pengelolaan fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Setiap kenaikan belanja daerah sebesar 1% di kabupaten/kota hasil pemekaran meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,11%, kenaikan panjang jalan 1% berkontribusi pada peningkatan PDRB sebesar 0,26%, dan setiap kenaikan 1% kesempatan kerja meningkatkan PDRB sebesar 0,3%. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pemekaran daerah dapat menjadi instrumen efektif untuk mempercepat pembangunan, sepanjang didukung oleh kapasitas kelembagaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai.

Konteks tersebut di atas relevan dengan kondisi Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Secara administratif, Kabupaten Tangerang memiliki 29 kecamatan, 28 kelurahan dan 246 desa, dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 3.459.706 jiwa (BPS Kabupaten Tangerang, 2025). Dengan wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang besar, rentang kendali pemerintahan di Kabupaten Tangerang relatif panjang. Pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa berjarak cukup jauh dari kawasan pesisir dan utara, sehingga pelayanan publik di wilayah tersebut kurang optimal. Hal ini menunjukkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

Secara geografis, wilayah utara Kabupaten Tangerang merupakan kawasan pesisir yang berbatasan dengan laut jawa memiliki karakter tersendiri, potensi terkena abrasi, terdapat daerah pelabuhan rakyat, kawasan logistik dan industri, serta area perumahan modern yang berkembang cepat. Pusat pemerintahan yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa kurang efisien bagi warga Tangerang Bagian Utara karena harus melayani kawasan pesisir yang secara jarak dapat memakan waktu hingga dua jam lebih untuk mengakses layanan administratif dasar, akibat letak dan infrastruktur yang menantang. Hal ini menandakan bahwa pelayanan publik di wilayah pesisir-utara belum memperoleh jangkauan yang efisien.[1] Disisi lain wilayah pesisir Tangerang Bagian Utara atau pesisir dapat dipastikan tidak terabaikan dari pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

[1] https://lintascakrawalanews.com/2025/06/13/percepatan-kabupaten-tangerang-utara-jalan-menuju-pemerintahan-yang-lebih-dekat-dan-resfonsif/

Secara ekonomi, wilayah utara Kabupaten Tangerang telah mengalami perkembangan pesat sebagai wilayah aktivitas ekonomi skala regional. Kawasan ini menjadi tulang punggung pertumbuhan Kabupaten Tangerang, dengan keberadaan pergudangan, pelabuhan rakyat, dan proyek properti besar yang menjadikannya pusat ekonomi baru. Sayangnya, transformasi cepat tersebut juga menimbulkan tantangan, terjadi ketimpangan ekonomi yang mencolok di antara masyarakat lokal. Misalnya, komunitas nelayan mengalami marginalisasi akibat reklamasi dan alih fungsi lahan, sementara petani kehilangan akses terhadap lahan produktif, sehingga kebutuhan infrastruktur transportasi yang lebih baik agar pertumbuhan dapat merata.[2] Kehadiran pemerintahan daerah yang lebih dekat diharapkan mampu menyeimbangkan pembangunan cepat dengan perlindungan sosial-ekonomi bagi warga lokal, sehingga Tangerang Bagian Utara harus mendapatkan perhatian pembangunan agar tidak terbelakang dalam sisi ekonomi.

Secara sosial, permasalahan sosial yang terjadi di Tangerang Bagian Utara dikarenakan pembangunan yang belum merata, sehingga pelayanan publik masih sulit dijangkau masyarakat yang berada di pesisir utara. Sulitnya akses pelayanan publik bagi masyarakat yang berada di pesisir utara sehingga dapat menempuh waktu selama dua jam atau lebih hanya untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan maupun pelayanan dasar lainnya.[3] Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang berkaitan dengan akses terhadap layanan pemerintahan dalam wilayah kabupaten yang sama. Di bagian yang lain, kemiskinan ekstrim yang dominan di Provinsi Banten berada di Kabupaten Tangerang sebanyak 370.319 jiwa,[4] dari kondisi komiskinan yang ada di Kabupaten Tangerang, tentunya Tangerang Bagian Utara termasuk daerah yang mesti segera dilakukan penanganan kemiskinan.[5]

Secara demografis, wilayah bagian utara Kabupaten Tangerang diperkirakan meliputi luas sekitar 450,1 km² dan memiliki populasi sekitar 1,14 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk di calon wilayah utara per km²

[2] https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528960563/pemekaran-kabupaten-tangerang-utara-solusi-atau-tantangan-baru?page=all
[3] https://lintascakrawalanews.com/2025/06/13/percepatan-kabupaten-tangerang-utara-jalan-menuju-pemerintahan-yang-lebih-dekat-dan-resfonsif/
[4] https://www.radarbanten.co.id/2025/08/19/1-juta-warga-banten-masuk-miskin-ekstrem-kabupaten-tangerang-sumbang-jumlah-terbesar/
[5] https://banten.antaranews.com/berita/336917/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-tangerang-utara

cukup tinggi 2.548 jiwa/km².[6] Urbanisasi yang intensif dan pertumbuhan penduduk di kawasan pesisir juga menciptakan tekanan terhadap infrastruktur, lingkungan, dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Demografi kawasan ini menunjukkan komposisi sosial sebagai *melting-pot* dari berbagai kelompok etnis, namun tetap dengan dominasi budaya pesisir yang khas, termasuk komunitas Betawi Pesisir, masyarakat nelayan, dan akar keagamaan yang kuat, yang dapat menjadi pondasi sosial dalam pembangunan daerah otonom itu sendiri. Kepadatan dan pertumbuhan penduduk yang kuat sering menuntut layanan pemerintah yang lebih dekat dan efisien; jika wilayah besar/populasi besar tapi pusat layanan jauh, bisa menimbulkan tekanan demografis.

Bagian utara Kabupaten Tangerang memiliki posisi strategis secara politik. Wilayah ini berbatasan langsung dengan ibukota negara dan menjadi penyangga penting bagi aktivitas industri, pemukiman, dan jasa. Secara politik, wilayah ini memerlukan pendekatan tata kelola pemerintahan yang lebih spesifik dan terfokus. Kawasan ini memerlukan arah pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Disisi lain adanya aspirasi politik lokal untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih dekat dan layanan yang lebih responsif untuk wilayah utara. Jadi bisa dikatakan ada "ketidakpuasan" atau "kebutuhan representasi" tersendiri di Tangerang Bagian Utara.[7]

Sejalan dengan perkembangan tersebut, saat ini berkembang wacana pemekaran Kabupaten Tangerang di wilayah bagian utara. Wacana ini muncul sebagai respons terhadap pesatnya pembangunan wilayah, meningkatnya kebutuhan pelayanan publik, serta perlunya penguatan kelembagaan pemerintahan di wilayah ini. Sejumlah variasi usulan mengenai batas dan cakupan wilayah telah mengemuka, yang pada umumnya meliputi kecamatan-kecamatan di wilayah pesisir dan utara Kabupaten Tangerang.

[6] https://www.timenews.co.id/nasional/99514340333/tangerang-utara-siap-mekar-pusat-ekonomi-baru-di-provinsi-banten-yang-siap-tumbuh-pesat
[7] https://www.neraca.co.id/article/220030/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-otonomi-baru?utm_source=chatgpt.com

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan kajian ini bermaksud untuk menyediakan pertimbangan akademis pemekaran kabupaten Tangerang wilayah utara. Untuk itu kegiatan ini akan mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan umum, yaitu menyediakan analisis kewilayahan pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian Utara.
2. Tujuan Khusus, yaitu menyusun rekomendasi kewilayahan dan tata kelola yang diperlukan bagi pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian utara.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan dalam penyusunan kajian ini adalah:

1. Mengumpulkan dan menganalisa data sekunder dari BPS, organisasi pemerintah dan sumber resmi lainnya yang diperlukan untuk penyusunan kajian kewilayahan potensi pemekaran kabupaten Tangerang Bagian Utara.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang berfokus pada aspek kewilayahan dan tata kelola pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian Utara.

1.4 Manfaat Kegiatan

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mempertimbangkan kelayakan pemekaran wilayah bagian utara. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan dan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam pembentukan kebijakan daerah otonom baru di Tangerang Bagian Utara.

1.5 Target/Sasaran

Target/Sasaran kegiatan adalah tersusunnya dokumen kajian yang berisikan analisis kewilayahan, peta tematik, rancangan model alternatif pemekaran, serta rencana aksi yang harus dilakukan dalam tiga sampai lima tahun ke depan untuk mengelola pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian Utara.

1.6 Keluaran/Hasil Pekerjaan

Output/luaran pekerjaan adalah dokumen kajian yang berisikan analisis kewilayahan, peta tematik, rancangan model alternatif pemekaran, serta rencana aksi yang harus dilakukan dalam tiga sampai lima tahun ke depan untuk mengelola pemekaran Kabupaten Tangerang Bagian Utara.

1.7 Definisi Operasional

Kajian Kewilayahan Pemekaran Kabupaten Tangerang bagian Utara dilakukan sesuai definisi operasional berikut:

1. Kajian kewilayahan adalah analisis mendalam terhadap karakteristik, potensi, dan permasalahan kewilayahan yang akan menjadi dasar penilaian apakah suatu wilayah layak untuk dimekarkan menjadi daerah otonom baru. Fokus analisis adalah pada aspek spasial, geografis, administratif, dan infrastruktur wilayah untuk menilai kesesuaian batas, keterjangkauan pelayanan pemerintahan, serta daya dukung sumber daya ruang terhadap pembentukan daerah baru.
2. Kabupaten Tangerang bagian Utara meliputi 13 kecamatan, yaitu Gunung Kaler, Kosambi, Kresek, Kronjo, Mauk, Mekar Baru, Pakuhaji, Sepatan, Sepatan Timur, Sukadiri, Sukamulya, Teluknaga, dan Kemiri.

BAB II

TINJAUAN LEGALISTIK DAN KONSEPTUAL

2.1 Desentralisasi dan Penataan Daerah

2.1.1 Desentralisasi

Mengacu pada konstitusi UUD 1945 amandemen ke-4 pada Pasal 18 ayat (1) menekankan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara desentralisasi. Dalam pelaksanaan desentralisasi dapat dilakukan dengan penataan daerah, baik dilakukan penyatuan maupun pemekaran wilayah pemerintahan. Mengenai hal itu akan dikemukakan lebih lanjut.

Kajian terhadap otonomi dan pemerintahan daerah di Indonesia selalu dihadapkan pada pasal 18 UUD 1945, sebagai sumber utama kebijakan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan yang perlu diperhatikan adalah pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan (penjelasannya). Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, sebelum diamandemen menyatakan: "*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar Permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa*".

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar Permusyawaratan.

Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat $\pm$ *250 Zelfbesturende landschappen* dan *Volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun, marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu

mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.

Mengacu pada pasal di atas, terlihat bahwa pasal tersebut tidak memberikan ketegasan mengenai pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Baru di dalam penjelasannya dikemukakan bahwa daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka. Hal ini berbeda dengan bunyi pasal 18 UUD 1945 berdasarkan perubahan kedua tahun 2000 sebagai berikut:

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten , dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A:

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B:

(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
(2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Mengkaji pasal 18 UUD 1945 hasil amandemen, Bagir Manan (2001), menyatakan terjadi perubahan sangat mendasar berkenaan dengan struktur maupun substansi. *Secara struktur*, pasal 18 yang tadinya hanya satu pasal menjadi tiga pasal. Terjadi penggantian yang menyeluruh termasuk penjelasannya. Jadi sekarang ini yang menjadi dasar konstitusional dalam pemerintahan daerah adalah Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sedangkan *secara substansi* Bagir menjelaskan, baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan yang baru pula, yaitu;

(1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [pasal 18 ayat (2)].
(2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya [pasal 18 ayat (5)].
(3) Prinsip kekhususan dan keragaman daerah [pasal 18A, ayat (1)].
(4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya [pasal 18B, ayat (2)].

(5) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa [pasal 18B, ayat (1)].
(6) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum [pasal 18 ayat (3)].
(7) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil [pasal 18A ayat (2)].

Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18, 18A dan 18B Undang-undang Dasar 1945 yang diubah menjadi pedoman berkaitan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah Daerah Provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
3. Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam Daerah Otonom. Dengan demikian, Wilayah Administrasi yang berada dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota dapat dijadikan Daerah Otonom atau dihapus.
4. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut undang-undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah Kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya mengacu pada Desentralisasi sebagai prakarsa baik mengenai penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan segi-segi pembiayaan dan perangkat pelaksanaannya adalah perangkat Daerah, teknik operasional yang melaksanakannya antara lain Dinas-dinas Daerah. Lebih lanjut dikemukakan penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi.

Secara Etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *de* = lepas dan *centrum* = pusat, artinya melepaskan dari pusat. Menurut Koesoemahatmadja, (1978), bahwa di dalam arti ketatanegaraan yang dimaksud dengan desentralisasi adalah,

> Pelimpahan kekuasaan Pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri (daerah-daerah otonom). Desentralisasi adalah juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan Negara.

Sedangkan menurut *Webster Dictionary*, diungkapkan bahwa *"to decentralizie means to devide and distribute as governmental administration, to withdraw from the center or place of concentration"* (desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi). Melengkapi pendapat ini menurut Suryaningrat (1980:7) bahwa kata desentralisasi di dalamnya mengandung arti gerak yang menjauhi sesuatu yang dipandang sebagai pusat. Gerak tersebut dapat berbentuk pelimpahan, pemudaran, pemberian, penyerahan, pembagian dan distribusi pengeluaran bahkan pencabutan dan istilah lainnya.

Masih menurut Suryaningrat (1980), dikenal istilah:

1. Desentralisasi Jabatan (*ambtelijke decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan (*ambt*) dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja. Oleh karena itu desentralisasi macam ini disebut juga dekonsentrasi, jika demikian maka apa yang disebut dekonsentrasi adalah tidak lain daripada salah satu jenis desentralisasi. Dekonsentrasi adalah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu berarti dekonsentrasi.
2. Desentralisasi Kenegaraan (*Staatkundige decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara. Di dalam desentralisasi, rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta (*participation*) dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Desentralisasi Kenegaraan dapat dibedakan antara lain:
    a. Desentralisasi Teritorial (*territoriale decentralisatie*) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri (*autonomie*) batas pengaturan termaksud adalah daerah.

b. Desentralisasi Fungsional (*functionale decentralisatie*) yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah jenis fungsi, misalnya pendidikan, pengairan dan sebagainya.

Ada beberapa keuntungan dari penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Asas Desentralisasi:

1. Desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beranekaragam.
2. Desentralisasi meringankan beban pemerintah pusat karena pemerintah pusat tidak mudah mengenal seluruh daerah secara spesifik dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan daerah. Disisi lain, Pemerintah daerahlah yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana cara memenuhinya.
3. Desentralisasi dapat mencegah beban yang melampaui batas dari Perangkat Pusat yang disebabkan tunggakan kerja.
4. Desentralisasi dapat mendorong masyarakat setempat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga ia tidak hanya merasa sebagai obyek saja.
5. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku Pemerintah, dan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.

Sedangkan Kaho (1991:13), berpendapat bahwa keuntungan-keuntungan dari dianutnya desentralisasi adalah:

1. Mengurangi bertumpuk-tumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah-masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, Daerah tidak perlu menunggu instruksi dari Pemerintah Pusat.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan pelaksanaannya dapat segera diambil.

4. Dalam sistem desentralisasi dapat diadakan pembedaan (*differensiasi*) dan pengkhususan (*spesialisasi*) yang berguna bagi kepentingan tertentu, serta lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan keadaan daerah.
5. Adanya desentralisasi, memberikan peluang bagi daerah menjadi laboratorium dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan yang dapat bermanfaat bagi Negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di daerah lainnya, sedangkan hal-hal yang kurang baik dapat di lokalisasi/dibatasi pada daerah tertentu saja sehingga lebih mudah ditiadakan.
6. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Pusat. Lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya lebih langsung, ini merupakan faktor psikologis.

Lebih jauh diungkapkan bahwa disamping keuntungan, desentralisasi juga mengundang beberapa kelemahan yaitu:

1. Besarnya struktur pemerintahan akan berakibat pada bertambah kompleks dan mempersulit koordinasi.
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan/Daerah mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi sosial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut Daerahisme atau provinsialisme
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena membutuhkan perundingan- perundingan yang lama.
5. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Mengacu beberapa pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, di samping ada hal-hal yang menguntungkan, juga terdapat hal-hal yang tidak menguntungkan. Dengan sudah diketahuinya faktor kekuatan dan faktor kelemahan asas desentralisasi, maka penerapan asas desentralisasi tidak perlu dipersoalkan. Justru akan menjadi tantangan bagi pelaksana dan fungsionaris

administrasi pemerintahan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Ada beberapa alasan yang mendukung dilaksanakannya desentralisasi, yaitu:

1. *Dari sudut Geografi*. Negara Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau baik yang besar maupun yang kecil yang jumlahnya 13.000 lebih yang memiliki berbagai adat, budaya dan terdiri dari berbagai suku bangsa, memerlukan satu bentuk pemerintahan yang memperhatikan kondisi daerah yang bervariasi, oleh karenanya penerapan asas desentralisasi merupakan sistem yang dipandang tepat, karena dengan desentralisasi akan terekomendasikan kepentingan/kebutuhan/aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
2. *Dari sudut Demografi*. Jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai ± 280 juta yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten/kota dan desa berkenaan dengan aspirasinya, dengan sistem desentralisasi akan memungkinkan penduduk masing-masing daerah bersangkutan terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.
3. *Dari sudut kebudayaan*. Indonesia terdapat bervariasi kebudayaan seperti Budaya Minangkabau, Aceh, Batak, Bugis, Bali, Maluku, Papua, Dayak, Banjar, Melayu, Sunda, Jawa dan masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sifat dari budaya-budaya tersebut ada yang mendukung maupun menghambat. Dengan penggunaan asas desentralisasi budaya-budaya mendapat tempat dan diperhatikan, dalam arti pembuatan kebijakan-kebijakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan juga memperhitungkan budaya-budaya yang bervariasi.

Gie (1995) berpendapat bahwa alasan-alasan dianutnya desentralisasi adalah:

1. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan. Desentralisasi dimaksudkan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

2. Dalam bidang Politik. Penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan. Ulasan mengadakan desentralisasi adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh Pemerintah Pusat setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah, hal-hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh Pemerintah Pusat.
4. Dari sudut kultural. Desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah, seperti Geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi. Desentralisasi diperlukan karena Pemerintah Daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan di daerah tersebut.

2.1.2 Penataan Daerah

Penataan daerah merupakan suatu proses kebijakan, strategi, administrasi, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur, mengembangkan, dan mengelola wilayah, serta untuk menata ulang struktur, batas, dan tata kelola wilayah daerah otonom (provinsi dan kabupaten/kota) dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan, pemerataan pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penataan daerah juga berkaitan erat dengan otonomi daerah, desentralisasi, dan pembangunan wilayah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berbagai regulasi turunannya.

Hal itu menjadi salah satu instrumen penting dalam menata hubungan pusat-daerah dan mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Intinya, Penataan Daerah adalah strategi untuk "merapikan peta" administrasi Indonesia agar lebih efisien,

efektif, dan sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penataan daerah umumnya meliputi:

1. Pemekaran, Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Daerah.

   Ini adalah bentuk penataan daerah yang paling umum dan sering dibicarakan. Pemekaran adalah proses membagi satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom baru. Pemekaran wilayah seperti pemekaran atau pembentukan provinsi yakni Sebuah provinsi dimekarkan menjadi dua atau lebih provinsi baru. Pemekaran atau pembentukan kabupaten/kota yakni sebuah kabupaten atau kota dimekarkan menjadi dua atau lebih kabupaten/kota. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan mendorong pemerataan pembangunan.
2. Penataan Batas Wilayah.

   Penetapan dan merevisi batas-batas administratif antar daerah otonom yang selama ini belum jelas guna menghindari konflik, memudahkan perencanaan pembangunan, dan mempertegas kewenangan pemerintahan, serta memastikan kepastian hukum dalam perencanaan pembangunan.
3. Penyesuaian daerah mencakup penyesuaian terhadap batas, nama, dan/atau status daerah.
4. Penataan Kewenangan Antar Tingkatan Pemerintahan.

   Mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan menciptakan tata kelola yang efektif.
5. Penataan Perangkat Daerah.

   Pengaturan struktur organisasi pemerintah daerah agar proporsional, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
6. Penyelarasan Pembangunan Antar-Daerah.

   Koordinasi lintas wilayah untuk mengelola sumber daya bersama, infrastruktur kewilayahan, dan program strategis nasional agar pembangunan tidak terpusat dan lebih menyeluruh.

7. Penggabungan Daerah.

   Kebalikan dari pemekaran. Penggabungan adalah penyatuan dua atau lebih daerah otonom menjadi satu daerah otonom baru. Bentuk ini jarang terjadi karena kompleksitas politik dan administratifnya.

Tujuan Penataan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan.

   Wilayah yang "tepat ukuran", birokrasi dapat berjalan lebih lancar, anggaran dapat disalurkan lebih tepat sasaran, dan koordinasi antar-instansi menjadi lebih baik.
2. Mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

   Daerah baru diharapkan dapat fokus pada pembangunan di wilayahnya, sehingga pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat lebih cepat dinikmati masyarakat di pelosok.
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
4. Mempercepat Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Memperpendek Rentang Kendali Pelayanan Publik.

   Memekarkan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, maupun dalam menyediakan layanan yang lebih baik sehingga akses untuk mengurus administrasi dan menyampaikan aspirasi menjadi lebih mudah.
5. Meningkatkan Daya Saing Nasional serta Mendorong Potensi dan Daya Saing Daerah.

   Setiap daerah memiliki potensi unggulan yang berbeda. Penataan daerah memungkinkan suatu daerah fokus mengembangkan potensi spesifiknya (seperti pariwisata, pertanian, atau kelautan) tanpa terbebani oleh urusan wilayah lain yang terlalu luas sehingga lebih fokus mengoptimalkan potensi daerah agar mampu bersaing.
6. Memperkuat Integrasi Nasional dan Keutuhan NKRI. Kehadiran negara melalui pemerintahan daerah yang efektif di seluruh pelosok nusantara dapat memperkuat rasa persatuan dan mencegah disintegrasi.
7. Memelihara Keunikan Adat Istiadat, Tradisi, dan Budaya Daerah dalam hal ini penataan daerah turut menjaga kekhasan lokal.

Dampak Positif pelaksanaan Penataan Daerah dapat dilihat dari peningkatan pelayanan publik yang lebih merata dan cepat di daerah, kemudian akselerasi pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dapat dilakukan dengan secepatnya, pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal dan berpihak pada masyarakat lokal karena kehadiran pemerintah yang semakin dekat dengan masyarakat, dan peningkatan partisipasi politik masyarakat karena relasi antara pemerintah dan rakyat yang juga semakin dekat.

Isu dan Tantangan dalam Penataan Daerah sebagai berikut:

1) Beban APBN dan Daerah Induk.
   Pembentukan daerah baru membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangun kantor pemerintahan, menggaji PNS, dan membiayai operasional. Banyak daerah baru tidak mandiri secara fiskal.
2) Motif Politik.
   Pemekaran daerah sering dijadikan alat untuk kepentingan elite lokal.
3) Kapasitas SDM dan Tata Kelola.
   Daerah baru kerap kesulitan menyiapkan ASN yang kompeten.
4) Konflik Batas Wilayah. Perselisihan antar-daerah karena batas administratif yang tidak jelas.
5) Efisiensi yang Dipertanyakan.
   Banyak daerah hasil pemekaran yang ternyata tidak mandiri secara finansial dan masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat, sehingga justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
6) Konflik Sosial dan Politik.
   Dapat memicu konflik perebutan jabatan, konflik batas wilayah dengan daerah induk, dan sentimen kedaerahan.
7) Kerusakan Lingkungan.
   Pemekaran seringkali diikuti oleh pembangunan infrastruktur besar-besaran dan eksploitasi SDA yang tidak terkendali untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
8) Birokrasi yang Membengkak.
   Terciptanya struktur birokrasi baru yang cenderung gemuk dan berpotensi inefisien.

2.2 Pendekatan Wilayah: Dimensi Geografis, Demografis, Ekonomis, Sosial, dan Politik

Teori kewilayahan merupakan sebuah kerangka konsep yang digunakan untuk memahami karakteristik, potensi, masalah, mengklasifikasikan, dan menganalisis dinamika suatu wilayah dan menelaah suatu wilayah terbentuk, berkembang, dan berfungsi dalam satu kesatuan sistem ruang, serta bagian dari permukaan bumi berdasarkan ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan wilayah lain. Setiap wilayah memiliki karakteristik unik (*spatial uniqueness*) yang membedakannya dari wilayah lain, karena dibentuk oleh interaksi antara faktor geografis, demografis, ekonomi, sosial, dan politis.

Wilayah merupakan satuan geografis yang terbentuk dari perpaduan unsur alam dan manusia yang saling berinteraksi dalam suatu ruang tertentu. Bintarto (1983) mendefinisikan wilayah sebagai kesatuan geografis yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional antara unsur fisik dan sosial. Dalam perspektif geografi, teori kewilayahan memandang wilayah sebagai sistem kompleks dan dinamis yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan untuk mencapai keseimbangan.

Pendekatan kewilayahan tidak hanya menyoroti kondisi fisik atau spasial, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor manusia, ekonomi, sosial, dan politik yang memengaruhi dinamika pembangunan wilayah. Oleh karena itu, analisis kewilayahan harus mencakup lima dimensi utama, yaitu geografi, demografi, ekonomi, sosial, dan politis (Yunus, 2010). Setiap dimensi memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk karakter, potensi, dan permasalahan suatu wilayah.

Analisis kewilayahan umumnya menggunakan berbagai dimensi untuk menggambarkan karakteristik dan potensi suatu daerah secara komprehensif. Dimensi-dimensi utama tersebut mencakup aspek fisik dan aspek sosial. Berikut adalah penjelasan mengenai dimensi geografi, demografi, ekonomi, sosial, dan politis dalam teori kewilayahan. Pendekatan lima dimensi ini digunakan untuk menganalisis sebuah wilayah secara komprehensif dan holistik.

1. Dimensi Geografi

Dimensi geografi menjadi dasar dalam teori kewilayahan karena berkaitan langsung dengan aspek ruang dan lokasi, serta unsur-unsur alamiah yang membentuk karakter fisik dan lingkungan suatu wilayah yang ditentukan oleh koordinat garis lintang dan bujur. Sedangkan unsur-unsur seperti letak geografis, aspek lokasi, luas wilayah, bentuk muka bumi, topografi, iklim, zona waktu, dan akses terhadap sinar matahari, serta potensi sumber daya alam menentukan corak kehidupan masyarakat dan potensi pembangunan. Itu semua adalah fondasi dasar bagi semua aktivitas manusia. Menurut Haggett (2001), ruang geografis adalah wadah interaksi antara manusia dan lingkungan yang menghasilkan pola-pola tertentu.

Kondisi geografis suatu wilayah menentukan potensi dan keterbatasan wilayah, serta sangat memengaruhi corak kehidupan masyarakatnya, baik dari segi pola permukiman, kegiatan ekonomi, interaksi sosial, maupun budaya. Tetapi juga memengaruhi distribusi penduduk, jaringan transportasi, dan hubungan antar wilayah. Kondisi fisik wilayah menentukan pola pemanfaatan ruang dan potensi ekonomi. Misalnya, wilayah pesisir cenderung berkembang pada sektor perikanan, pelabuhan, dan perdagangan laut, sementara wilayah pegunungan berorientasi pada pertanian, kehutanan, atau pariwisata alam. Dalam konteks pengembangan wilayah, pemahaman terhadap dimensi geografis menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan daya dukung lingkungan.

Dimensi ini menekankan ruang dan lokasi yang membentuk "wadah" sebagai dasar pembentukan wilayah. Oleh karena itu, pemahaman dimensi geografis penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, dimensi geografi tidak hanya berbicara tentang “di mana” suatu wilayah berada, tetapi juga “bagaimana” kondisi fisik wilayah tersebut memengaruhi struktur sosial dan ekonomi di dalamnya. Termasuk Posisi suatu wilayah dalam kaitannya dengan wilayah lain. Misalnya, apakah wilayah tersebut strategis (dekat jalur pelayaran, pintu perdagangan) atau terisolir (dikelilingi pegunungan/hutan). Secara lebih rinci mengenai dimensi geografi akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Dimensi Geografi

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Topografi	Bentuk permukaan bumi (daratan rendah, pegunungan, lembah), ketinggian, dan kemiringan lahan.	Mempengaruhi aksesibilitas, pola permukiman, dan jenis kegiatan masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, dll.
2.	Iklim	Unsur cuaca jangka panjang, seperti suhu, curah hujan, dan kelembaban.	Menentukan jenis vegetasi, komoditas pertanian unggulan, dan potensi bencana alam, seperti kekeringan dan banjir.
3.	Hidrologi	Keadaan perairan (sungai, danau, air tanah, laut)	Mempengaruhi ketersediaan air bersih, irigasi, dan potensi transportasi air.
4.	Sumber Daya Alam	Ketersediaan bahan tambang, kesuburan tanah, dan potensi energi.	Menentukan basis ekonomi (misalnya wilayah pertambangan, atau wilayah pertanian subur)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

2. Dimensi Demografi

Dimensi demografi menyoroti penduduk sebagai faktor utama penggerak wilayah, sehingga pada dimensi demografi mengkaji karakteristik penduduk yang tinggal di suatu wilayah, yang merupakan subjek dan objek dari pembangunan dan pengembangan wilayah. Analisis demografi meliputi jumlah penduduk, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, struktur umur, tingkat pendidikan, serta mobilitas penduduk (Todaro & Smith, 2015).

Faktor-faktor demografis berperan penting dalam menentukan daya dukung dan daya tampung wilayah. Terdapat wilayah-wilayah tertentu dengan penduduk yang memiliki ciri khas yang berbeda dari penduduk yang berada wilayah yang lainnya. Demikian halnya dengan wilayah yang memiliki penduduk

yang jarang akan memiliki kebutuhan dan permasalahan yang berbeda dengan wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang berlebih karena wilayah dengan penduduk berlebih dapat mengalami tekanan terhadap sumber daya alam dan infrastruktur. Selain itu konsentrasi penduduk di perkotaan (*urban*) atau tersebar di perdesaan (*rural*) juga memiliki kebutuhan yang permasalahan yang berbeda.

Karakteristik demografis menentukan arah dan kebutuhan layanan publik, daya saing tenaga kerja, serta arah pembangunan wilayah. Digambarkan dalam *population pyramid*. Wilayah dengan jumlah penduduk usia produktif tinggi memiliki potensi tenaga kerja besar, membutuhkan banyak lapangan kerja, berpotensi menjadi pusat pertumbuhan industri kreatif, memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi, dan pendidikan. Adapun tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan tenaga kerja. Ini adalah indikator penting dari human capital. Sedangkan wilayah dengan penduduk usia lanjut tinggi menghadapi tantangan jaminan sosial, memerlukan kebijakan sosial, dan kesehatan yang berbeda. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas sumber daya alam dapat menimbulkan tekanan lingkungan maupun sosial. Oleh karena itu, analisis demografi menjadi bagian penting dalam pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Selain itu, kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk, baik migrasi (baik internal maupun internasional) maupun urbanisasi, turut memengaruhi perkembangan wilayah. Dengan demikian, dimensi demografi menjadi indikator utama dalam pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Secara lebih rinci mengenai dimensi demografi akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.2

Dimensi Demografi

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Jumlah dan Kepadatan	Total populasi dan distribusinya per satuan luas.	Mempengaruhi kebutuhan infrastruktur, layanan publik, dan tingkat urbanisasi.
2.	Komposisi Penduduk	Struktur usia, jenis kelamin, dan rasio	Menentukan ketersediaan tenaga kerja produktif dan proyeksi kebutuhan

		ketergantungan.	layanan (misalnya sekolah atau panti jompo).
3.	Migrasi	Perpindahan penduduk masuk (*in-migration*) dan keluar (*out-migration*).	Menciptakan wilayah fungsional (seperti Jabodetabek) dan memengaruhi laju pertumbuhan di pusat dan pinggiran.
4.	Kualitas SDM	Tingkat pendidikan, kesehatan, dan keterampilan penduduk.	Menentukan daya saing wilayah dalam menarik investasi dan mengembangkan sektor bernilai tambah tinggi.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

3. Dimensi Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam teori kewilayahan berkaitan dengan bagaimana aktivitas ekonomi tersebar dan berinteraksi di dalam ruang wilayah, sehingga dimensi ekonomi menjelaskan bagaimana aktivitas ekonomi membentuk struktur dan peran wilayah. Untuk itu dimensi ekonomi dapat menganalisis kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran yang terjadi di wilayah tersebut. Friedmann dan Alonso (1964) dalam *Regional Development Theory* menegaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah menjadi penggerak utama dalam pembentukan hierarki dan struktur ruang.

Disisi lain Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*) membagi kegiatan ekonomi menjadi sektor basis (yang mengekspor ke luar wilayah) dan non-basis (melayani kebutuhan dalam wilayah). Kemakmuran suatu wilayah sangat ditentukan oleh kekuatan sektor basisnya, sehingga wilayah yang memiliki basis ekonomi kuat cenderung menjadi pusat pertumbuhan regional. Dalam kerangka teori pusat pertumbuhan (*growth pole theory*), wilayah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi tertentu dapat menimbulkan efek penyebaran (*spread effect*) dan efek serapan (*backwash effect*) terhadap wilayah sekitarnya.

Wilayah yang memiliki basis ekonomi yang kuat cenderung menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*), menarik migrasi penduduk serta modal dan menimbulkan efek penyebaran (*spread effect*) terhadap wilayah sekitarnya

(Perroux, 1950). Namun, jika tidak diimbangi dengan pemerataan, dapat muncul efek serapan (*backwash effect*) yang memperlebar kesenjangan antar wilayah.

Oleh karena itu, dimensi ekonomi menuntut adanya kebijakan pembangunan yang mampu menciptakan keseimbangan antara pusat dan daerah, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi wilayah yang efektif memerlukan keterpaduan antara potensi sumber daya, tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, dimensi ekonomi menjadi motor penggerak utama yang menentukan dinamika dan tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Aspek yang dikaji pada dimensi ekonomi berkaitan dengan sumber daya ekonomi, struktur sektor produksi, ketersediaan lapangan kerja, sektor unggulan, tingkat pendapatan masyarakat, dan investasi. Untuk itu dalam menganalisis kewilayahan juga memerhatikan struktur perekonomian Sektor-sektor apa yang dominan (primer/pertanian, sekunder/industri, tersier/jasa, kuaterner/informasi-teknologi). Termasuk sumber daya alam dan modal yang meliputi ketersediaan bahan baku, energi, dan modal investasi untuk mendorong industri. Dalam dimensi ekonomi kehadiran infrastruktur seperti ketersediaan jalan, pelabuhan, listrik, internet, dan telekomunikasi yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, dan mendukung kehadiran pasar termasuk ukuran pasar yang ada di wilayah, dan daya beli sebagai kemampuan konsumsi masyarakat.

Dimensi ekonomi juga memperhitungkan keterkaitan antar wilayah yakni suatu wilayah berperan sebagai penyedia bahan baku (*hinterland*) atau sebagai pusat industri dan jasa (*node*). Secara lebih rinci mengenai dimensi ekonomi akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.3

Dimensi Ekonomi

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Struktur Ekonomi	Dominasi sektor-sektor ekonomi (pertanian, industri, jasa).	Menentukan basis ekonomi wilayah (misalnya "kota industri" atau "daerah agraris").

2.	Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).	Menunjukkan kemajuan dan daya tarik investasi suatu wilayah.
3.	Infrastruktur	Ketersediaan dan kualitas sarana transportasi, energi, dan komunikasi.	Mempengaruhi konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik.
4.	Kesenjangan Regional	Perbedaan tingkat kemakmuran dan pembangunan antar wilayah dalam satu kesatuan administrasi.	Menjadi fokus kebijakan pemerataan pembangunan (misalnya pembangunan dari pinggiran).

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

4. Dimensi Sosial (kultural)

Dimensi sosial berhubungan dengan pola interaksi masyarakat dalam suatu ruang wilayah. Untuk itu dimensi sosial mencakup nilai-nilai, norma, pola interaksi, budaya, kelembagaan, pendidikan, kesehatan, kohesi masyarakat, dan kualitas hidup. Adapun kualitas hidup yang terbaik ditandai dengan rendahnya kriminalitas, kemudahan akses terhadap hiburan, dan adanya rasa aman. Selain itu, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang menentukan daya saing dan kemampuan wilayah untuk beradaptasi terhadap perubahan ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan sosial tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi juga faktor strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah secara menyeluruh.

Pola interaksi masyarakat dan institusi sosial, stratifikasi sosial, kelembagaan adat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan yang membentuk pola kehidupan masyarakat di wilayah, akan membentuk identitas serta karakter suatu wilayah. Setiap wilayah memiliki struktur sosial dan budaya yang unik, yang menjadi dasar terbentuknya solidaritas, rasa kebersamaan, dan kepercayaan (*social trust*) dalam masyarakat. Misalnya, wilayah pedesaan umumnya memiliki ikatan sosial yang kuat melalui budaya gotong royong, sedangkan wilayah perkotaan lebih didominasi oleh hubungan fungsional dan profesional.

Menurut Soetomo (2009), struktur sosial dan budaya masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan wilayah karena memengaruhi tingkat partisipasi dan kohesi sosial, yang ditandai dengan kemampuan suatu wilayah mengintegrasikan pendatang tanpa menimbulkan gesekan sosial, sebab bahasa, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Hal itu dapat menjadi pemersatu sekaligus sumber konflik.

Wilayah dengan budaya lokal yang baik, tingkat kesejahteraan dan solidaritas sosial yang tinggi cenderung memiliki kemampuan adaptasi dan partisipasi yang lebih baik terhadap program pembangunan. Dengan demikian, dimensi sosial berfungsi sebagai perekat yang menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem kewilayahan, sekaligus menciptakan identitas lokal yang khas bagi setiap daerah. Secara lebih rinci mengenai dimensi sosial akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.4

Dimensi Sosial

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Budaya dan Nilai	Adat istiadat, kearifan lokal, dan norma masyarakat.	Mempengaruhi penerimaan terhadap pembangunan dan konservasi lingkungan.
2.	Lembaga Sosial	Keberadaan dan peran organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan kesehatan.	Menentukan kualitas kohesi sosial dan kesejahteraan dasar masyarakat.
3.	Pola Permukiman	Tata letak perumahan, hubungan desa-kota, dan tata ruang.	Berkaitan erat dengan perencanaan tata ruang dan penyediaan layanan dasar.
4.	Masalah Sosial	Kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas.	Menjadi sasaran utama intervensi kebijakan kewilayahan.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

5. Dimensi Politik

Dimensi politik merupakan aspek yang mengatur dan menggambarkan distribusi kekuasaan, kebijakan publik, dan tata kelola wilayah dan hubungannya dengan wilayah lain. Dimensi politik juga berkaitan dengan sistem pemerintahan, administrasi, kebijakan publik, struktur kekuasaan, partisipasi politik, otonomi daerah, stabilitas politik, maupun stabilitas pemerintahan, dan tata kelola wilayah yang mengatur pemanfaatan ruang dan sumber daya di wilayah. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber daya sesuai karakteristik wilayahnya (UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), sehingga produk pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang diterbitkan pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya, seperti peraturan tata ruang, perpajakan, dan insentif investasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi kebijakan pemerintah tersebut tidak terpisahkan dari para elit politik, pengusaha, dan tokoh masyarakat memengaruhi pengambilan keputusan.

Kekuatan politik dan kebijakan publik menjadi faktor penentu dan memiliki peran sentral dalam mengarahkan serta menentukan arah pembangunan wilayah, termasuk dalam hal distribusi sumber daya dan anggaran, penentuan prioritas pembangunan, dan hubungan antar wilayah. Disamping itu dalam memperkokoh kekuatan politik maka diperlukan adanya distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk desentralisasi. Melalui desentralisasi dan kebijakan otonomi daerah, memberi ruang bagi setiap daerah untuk mengelola potensi sumber daya sendiri secara lebih efektif dan menentukan prioritas pembangunan sesuai karakteristiknya. Namun, efektivitas kebijakan ini bergantung pada kapasitas pemerintahan daerah dan tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi politik masyarakat juga berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (Miura et al., 2025).

Stabilitas politik yang baik sangat penting untuk terciptanya iklim investasi yang kondusif dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah untuk memperkuat integrasi nasional. Sebaliknya, konflik politik dan ketimpangan ekonomi maupun ketimpangan kebijakan dapat menjadi penghambat dalam pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan disparitas regional sehingga

berdampak bagi pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Secara lebih rinci mengenai dimensi politis akan dibahas dalam tabel berikut.

Tabel 2.5

Dimensi Politik

No.	Aspek	Fokus Kajian	Relevansi Kewilayahan
1.	Batas Administratif	Penetapan batas-batas wilayah pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota).	Menentukan kewenangan dan tanggung jawab institusi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2.	Kebijakan Publik	Regulasi tata ruang (RTRW), kebijakan investasi, dan otonomi daerah.	Memengaruhi keputusan lokasi, zonasi kegiatan, dan distribusi sumber daya fiskal.
3.	Tata Kelola (*Governance*)	Kualitas birokrasi, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan wilayah.	Menentukan efektivitas pembangunan dan daya tarik bagi investasi.
4.	Jaringan Politik	Hubungan dan konflik kepentingan antar aktor (pemerintah, swasta, masyarakat) dalam penentuan arah pembangunan wilayah.	Membentuk arena pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan proyek strategis.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2025

Teori kewilayahan memandang wilayah sebagai sistem yang kompleks, dinamis, multidimensional, dan saling berinteraksi antar dimensi. Dimensi geografis sebagai wadah yang menyediakan ruang dan sumber daya. Dimensi demografis sebagai penggerak yang menghadirkan tenaga dan dinamika manusia. Dimensi ekonomi sebagai dinamika penggerak aktivitas dan kesejahteraan. Dimensi sosial sebagai perekat yang membentuk kohesi dan identitas masyarakat. Dimensi politis sebagai pengatur arah dan kebijakan pembangunan untuk memastikan tata kelola yang adil dan berkelanjutan.

Memahami kelima dimensi tersebut secara integratif terhadap seluruh dimensi ini menjadi dasar penting dalam merancang perencanaan dan pengembangan wilayah dapat dilakukan secara lebih inklusif, tepat, efisien, dan berkeadilan, sehingga menghasilkan kehadiran pemerintahan bagi kebutuhan masyarakat dan kewilayahan, maupun berkaitan dengan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, teori kewilayahan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di daerah.

Disisi lain mengintegrasikan kelima dimensi tersebut, dapat menghasilkan pola perwilayahan yang utuh, baik sebagai Wilayah Formal (homogen berdasarkan ciri tertentu, seperti wilayah pegunungan) maupun Wilayah Fungsional (*nodal region*) yang heterogen namun saling terhubung secara fungsional (misalnya, pusat kota sebagai pusat pelayanan yang dihubungkan dengan wilayah pinggiran).

2.3 Studi Pendahuluan Pemekaran Wilayah Di Indonesia

Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sebelumnya dalam UU No. 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri melalui otonomi daerah.

Tujuan utama pemekaran wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat stabilitas politik dan pemerataan ekonomi antar wilayah. Namun, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini tidak selalu berjalan sesuai harapan. Berikut merupakan telaah beberapa studi terdahulu yang meneliti dampak, tantangan, dan evaluasi kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia.

1. Studi Tentang Latar Belakang dan Motif Pemekaran.

   Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong utama pemekaran wilayah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan sosial-budaya.

- Fitrani, Hofman, & Kaiser (2005) dalam artikel *Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia* (World Bank Policy Research Paper) menemukan bahwa lebih dari 200 daerah baru terbentuk antara 1999–2004. Pemekaran sering kali didorong oleh motif politik lokal, seperti distribusi kekuasaan, etnisitas, dan akses terhadap sumber daya, bukan semata-mata efektivitas pelayanan publik.
- Syarif (2012) juga menegaskan bahwa pemekaran banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite lokal yang melihat otonomi sebagai peluang memperluas jaringan kekuasaan dan akses terhadap dana transfer pusat (DAU dan DAK).

Pada konteks awal isu pemekaran wilayah menggema, pemekaran lebih berfungsi sebagai proses politik daripada proses administratif pembangunan. Disamping itu proses pemekaran seringkali digerakkan oleh elit lokal (mantan birokrat, politisi, pengusaha) yang melihat peluang untuk menduduki posisi-posisi strategis seperti menjadi bupati, walikota, atau anggota DPRD di daerah baru. Pemekaran menciptakan "kue" baru dalam bentuk jabatan politik dan anggaran. Pemekaran juga sebagai arena pertarungan elit lokal untuk merebut sumber daya dan kekuasaan yang sebelumnya dipegang pusat. Pemekaran dipandang sebagai cara untuk meredam gerakan separatisme dan memenuhi tuntutan keadilan etnis/identitas.

2. Studi Tentang Dampak Pemekaran terhadap Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.

Hasil penelitian mengenai dampak ekonomi pemekaran menunjukkan temuan yang beragam:

- Firman (2009) dalam *Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia* (Asian Survey) menemukan bahwa pemekaran belum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah dan penurunan kemiskinan. Banyak

daerah baru justru bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

- Lewis (2014) dalam *Local Government Formation and Regional Income Disparities in Indonesia* (*Bulletin of Indonesian Economic Studies*) menyatakan bahwa pemekaran tidak serta-merta memperkecil kesenjangan antar wilayah. Peningkatan jumlah daerah baru tidak selalu diikuti peningkatan kapasitas fiskal dan ekonomi.
- Kuncoro dan Idris (2017) menyoroti bahwa di beberapa kasus, pemekaran di wilayah dengan potensi sumber daya tinggi (seperti Kalimantan dan Sulawesi) mampu meningkatkan akses pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
- Nugraha, (2021) menyoroti efisiensi fiskal dan tata kelola keuangan daerah.

Dengan demikian, efek ekonomi dari pemekaran bersifat tergantung konteks (*context-specific*) dan tidak dapat digeneralisasi secara nasional. Hasil penelitian juga sangat beragam dan kontradiktif. Beberapa studi menemukan bahwa pemekaran mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan efektivitas belanja publik, dan mempercepat pembangunan karena layanan pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Peningkatan alokasi anggaran daerah untuk pembangunan fisik di wilayah DOB.

Sedangkan yang lainnya menunjukkan hasil yang berbeda, daerah otonom baru (DOB) yang gagal mencapai kemandirian fiskal. Mereka tetap sangat bergantung pada dana transfer dari pusat maupun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta belum mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biaya operasional pemerintahan daerah yang baru seperti gaji pegawai, pembangunan kantor justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengurangi dana untuk pembangunan. Padahal pemekaran sebagai upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah pusat dengan daerah pinggiran di wilayah induk. Termasuk adanya keinginan untuk

menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah baru yang selama ini belum tergarap secara maksimal.

3. Studi Tentang Dampak Pemekaran terhadap Pelayanan Publik dan Tata Kelola.
    a. Said & Sjaf (2010) dalam *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah: Antara Harapan dan Realita* (LIPI Press) menyimpulkan bahwa pelayanan publik di daerah hasil pemekaran cenderung belum efisien karena lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur nya.
    b. Subarsono (2016) dalam kajiannya di *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik* menegaskan bahwa fragmentasi kelembagaan akibat pemekaran justru menimbulkan beban birokrasi baru, termasuk tumpang tindih kewenangan dan pemborosan anggaran.
    c. Sebaliknya, Rasyid (2018) menemukan bahwa daerah yang melakukan pemekaran berbasis perencanaan matang (contohnya di Papua Barat dan NTB) berhasil memperpendek rantai pelayanan pemerintahan, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
    d. Simanjuntak, (2022) menyoroti kapasitas birokrasi daerah hasil pemekaran.

Kesimpulannya, keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Disisi lain yang perlu diantisipasi adalah bila kualitas pelayanan mengalami penurunan yang disebabkan inefisiensi anggaran. Padahal pemekaran diharapkan dapat mempercepat dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang sebelumnya terhambat oleh wilayah induk yang terlalu luas atau terisolasi.

4. Studi Tentang Dampak Sosial Budaya dan Identitas Lokal.

   Pemekaran wilayah juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang kuat. Dalam hal ini melihat pemekaran dari sudut pandang identitas, partisipasi masyarakat, dan kohesi sosial.

   a. Klinken (2007) dalam *Communal Violence and Democratization in Indonesia* menyoroti bahwa beberapa kasus pemekaran di daerah beretnis majemuk (seperti Maluku, Kalimantan, dan Sulawesi Tengah) berpotensi menimbulkan konflik horizontal jika tidak disertai rekonsiliasi dan kesepahaman identitas lokal.
   b. Sukmana (2020) menyatakan bahwa di beberapa daerah, pemekaran justru memperkuat identitas etnis dan lokalitas, yang secara positif meningkatkan partisipasi politik dan rasa memiliki terhadap daerah baru.

   Dengan demikian, dimensi sosial pemekaran dapat berfungsi ganda, memperkuat identitas lokal di satu sisi, pemekaran didorong oleh aspirasi yang didasarkan pada ikatan sejarah, adat, atau etnis tertentu. Namun berisiko memicu fragmentasi sosial di sisi lain. Pemekaran seringkali memanfaatkan sentimen identitas kesukuan atau kedaerahan (*etnonasionalisme*) sebagai legitimasi. Meski awalnya mempersatukan kelompok tertentu, dalam jangka panjang dapat memicu konflik horizontal terutama terkait perebutan batas wilayah dan sumber daya. Bahkan partisipasi masyarakat hanya bersifat simbolis dalam proses pemekaran.

5. Studi yang berkaitan dengan evaluasi umum.

   Seiring dengan banyaknya Daerah Otonomi Baru (DOB) yang bermasalah, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran. Merespon kebijakan tersebut, terdapat studi-studi pemekaran yang fokus pada evaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mulai melakukan moratorium pemekaran wilayah sejak 2014 karena banyak daerah baru belum mampu mandiri secara fiskal dan administrasi (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Fokus penelitian terkini beralih dari “mengapa pemekaran terjadi” menjadi

"bagaimana memperbaiki tata kelolanya." Terdapat beberapa studi yang berkaitan dengan evaluasi pemekaran:

- Hidayat dan Anwar, (2023), fokus pada evaluasi dampak pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan.
- Bambang Brodjonegoro dan Blane D. Lewis, (2003), banyak mengevaluasi indikator keberhasilan DOB. Mereka menyimpulkan bahwa diperlukan indikator yang ketat, tidak hanya syarat administratif, tetapi juga kapasitas fiskal, ekonomi, dan sosial budaya sebelum sebuah daerah dimekarkan. Pemekaran yang lebih *feasible* adalah di tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota, untuk menghindari inefisiensi. Bahkan, mempertimbangkan opsi penggabungan kembali daerah-daerah yang gagal ke daerah induknya.

Arah penelitian masih memiliki kelemahan karena penelitian yang berkaitan dengan pemekaran perlu menekankan indikator kinerja pembangunan dan partisipasi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan pemekaran wilayah, bukan hanya jumlah daerah baru yang terbentuk. Penelitian terdahulu mengenai pemekaran wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan mulia untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, hasilnya masih bervariasi. Sebagian besar penelitian menyoroti keterbatasan kapasitas kelembagaan, ketergantungan fiskal tinggi, dan pengaruh politik lokal sebagai hambatan utama.

Namun demikian, pemekaran juga membuka peluang bagi penguatan identitas lokal dan pemerataan pembangunan di wilayah tertinggal jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Secara umum, studi terdahulu mengenai pemekaran telah memberikan pelajaran bahwa pemekaran bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

2.4 Kerangka Analisis

1. Indikator Kewilayahan (Pra-Pemekaran)

Indikator kewilayahan digunakan untuk menilai potensi dan kesiapan daerah sebelum dilakukan pemekaran. Indikator ini membantu memastikan bahwa

wilayah yang akan dimekarkan memiliki dasar geografis, sosial, ekonomi, dan administratif yang kuat.

a. Aspek Geografis dan Demografis.
    - Kondisi Geografis, kondisi topografi (pegunungan, dataran, kepulauan) yang mempengaruhi aksesibilitas dan biaya pemerintahan.
    - Luas wilayah dan jarak ke pusat pemerintahan induk.
    - Topografi dan aksesibilitas wilayah (transportasi, konektivitas).
    - Jumlah dan kepadatan penduduk.
    - Persebaran penduduk dan perbandingan wilayah perkotaan vs perdesaan.

b. Aspek Ekonomi dan Keuangan.
    - Ketersediaan sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal.
    - Struktur ekonomi daerah (sektor dominan: pertanian, industri, jasa, dll, atau sudah terdiversifikasi).
    - Pendapatan per kapita dan kontribusi PDRB terhadap daerah induk.
    - Kemandirian fiskal (kemampuan PAD): Proyeksi realistik penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

c. Aspek Sosial dan Budaya
    - Homogenitas sosial dan budaya masyarakat.
    - Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
    - Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
    - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
    - Dukungan Masyarakat.

d. Aspek Kelembagaan dan Administratif
    - Ketersediaan aparatur pemerintahan dan kapasitas kelembagaan.
    - Kesiapan infrastruktur pemerintahan dan pelayanan publik.
    - Dukungan politik dan administratif dari pemerintah daerah induk.

e. Aspek Infrastruktur

- Ketersediaan Infrastruktur Dasar, seperti kondisi jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
- Lokasi Ibu Kota, menunjukkan kesiapan dan kelayakan calon ibu kota baru sebagai pusat pemerintahan.
- Infrastruktur Pelayanan Publik, adanya ketersediaan gedung perkantoran, sekolah, puskesmas, dan pasar.

2. **Model Evaluasi Kelayakan Pemekaran Wilayah**

Model evaluasi kelayakan digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah calon pemekaran layak dibentuk sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Beberapa model analisis yang umum digunakan adalah:

a. Analisis Kelayakan Finansial dan Ekonomi.

Cost-Benefit Analysis (Analisis Biaya-Manfaat). Menganalisis Kemampuan Fiskal (*Fiscal Capacity*) yakni menghitung perkiraan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio, semakin layak secara fiskal. Peningkatan akses layanan, percepatan pembangunan, peningkatan PAD, stabilitas politik. Dalam hal ini memproyeksikan kemampuan keuangan DOB dalam 5-10 tahun pertama, termasuk ketergantungan pada DAU/DAK.

b. Analisis Dampak terhadap Daerah Induk.

- Dampak Fiskal, melakukan analisis kapasitas fiskal daerah induk masih memadai pasca-melepaskan wilayah dan PAD-nya.
- Dampak Sosial-Politik, upaya menganalisis dampak pemekaran yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat daerah induk dan Daerah Otonomi Baru (DOB).

c. Model Skoring dan Pembobotan (*Weighted Scoring Model*).

- Setiap indikator (geografis, demografis, ekonomi, sosial, politik, administratif) diberi bobot sesuai tingkat kepentingan.

- Skor total menunjukkan tingkat kelayakan wilayah (layak, cukup layak, tidak layak).
- Model ini menilai setiap indikator berdasarkan bobot tertentu. Hasil total skor menunjukkan tingkat kelayakan daerah untuk dimekarkan.

Tabel 2.6

Model Skoring dan Pembobotan (*Weighted Scoring Model*)

Aspek	Bobot	Indikator Utama	Skor Maksimal
Geografis dan Demografis	20%	Luas, aksesibilitas, jumlah penduduk	20
Ekonomi	30%	PAD, PDRB, potensi SDA	30
Sosial dan Budaya	20%	IPM, kohesi sosial	20
Administratif	15%	Aparatur, pelayanan publik	15
Politik dan Dukungan Publik	15%	Legitimasi lokal	15

Sumber: Santoso (2015) dan Nurmiati (2019).

d. Model Evaluasi Multi-Kriteria (*Multi-Criteria Decision Analysis / MCDA*).

Model ini menilai kelayakan berdasarkan gabungan aspek kuantitatif dan kualitatif sebagai sebuah model komprehensif dengan memberikan bobot dan skor pada setiap indikator kewilayahan. MCDA digunakan dalam kajian pemekaran karena memperhitungkan interaksi antar indikator. Contoh pembobotan pada MCDA seperti Kapasitas Ekonomi (40%), Kapasitas Sosial (25%), Kapasitas Administrasi-Wilayah (20%), Kapasitas Teknis (15%). Setiap calon DOB dinilai (*scoring*) untuk setiap indikator. Total skor akhir menentukan kelayakannya.

e. Model Institusional dan Tata Kelola (*Institutional Readiness Model*).

Menekankan pada kesiapan kelembagaan, SDM aparatur, dan kapasitas fiskal. Kelayakan dinilai berdasarkan kemampuan daerah mengelola pemerintahan baru tanpa ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Analisis pada model ini berupa Analisis Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM):

- Kesiapan Kelembagaan, melaksanakan evaluasi terhadap rancangan organisasi perangkat daerah (OPD), sistem keuangan daerah, dan sistem pelayanan publik.
- Ketersediaan dan Kualitas SDM, menganalisis jumlah dan kualifikasi ASN yang akan dialihkan dari daerah induk serta rencana rekrutmen.

f. Pedoman Penilaian sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring terhadap setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.7

Pedoman Penilaian Kelayakan Pemekaran Daerah Menurut PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

No	Faktor dan Indikator	Bobot
1	**Kependudukan**	**20**
	1. Jumlah Penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	**Kemampuan Ekonomi**	**15**
	1. PDRB non migas perkapita	5
	2. Pertumbuhan ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5
3	**Potensi Daerah**	**15**
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1

No	Faktor dan Indikator	Bobot
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	**Kemampuan Keuangan**	**15**
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk	5
	3. Rasio PDS terhadap PDRB	5
5	**Sosial Budaya**	**5**
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	**Sosial Politik**	**5**
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif thd penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	**Luas Daerah**	**5**
	1. Luas wilayah keseluruhan	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	**Pertahanan**	**5**
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	**Keamanan**	**5**
	1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan terhadap jumlah	5

No	Faktor dan Indikator	Bobot
	penduduk	
10	**Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**	**5**
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	**Rentang Kendali**	**5**
	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten)	3
	Total	**100**

Sumber: PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

3. **Indikator Kinerja Pasca-Mekar (Evaluasi Dampak Pemekaran)**

Setelah daerah baru terbentuk, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan, tata kelola, dan kesejahteraan masyarakat.

a. Aspek Ekonomi dan Fiskal.
   - Pertumbuhan ekonomi dengan melihat perbandingan antara PDRB daerah baru vs induk.
   - Peningkatan PAD dan kemandirian fiskal.
   - Efektivitas Fiskal memerhatikan efisiensi belanja daerah yakni melihat belanja modal untuk infrastruktur lebih besar dari belanja rutin.
   - Perubahan tingkat kemiskinan dan pengangguran di DOB.
   - Perkembangan infrastruktur ekonomi (jalan, pasar, irigasi, dll).

b. Aspek Pelayanan Publik.
   - Akses masyarakat terhadap layanan dasar berkaitan dengan:
     - Pendidikan, berkaitan dengan akses dan kualitas pendidikan termasuk angka partisipasi sekolah (APM/APK), rasio guru-siswa, peningkatan jumlah sekolah.

- Kesehatan, berkaitan dengan akses dan kualitas kesehatan termasuk angka harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan jumlah puskesmas dan rumah sakit.
- Infrastruktur Dasar, berupa peningkatan persentase rumah tangga dengan akses air bersih, listrik, dan jalan berkualitas.

- Rasio aparatur terhadap jumlah penduduk.
- Efektivitas Pemerintahan berupa kemampuan pemerintah daerah menyerap dan melaksanakan program pembangunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik, transparansi anggaran, keterbukaan informasi APBD, dan indeks persepsi korupsi.

c. Aspek Sosial dan Kelembagaan.

- Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
- Stabilitas sosial dan politik lokal, berkaitan dengan tingkat konflik sosial dan politik di daerah baru tersebut. Pemekaran memberikan dampak mempersatukan atau memecah belah.
- Peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan Indeks Kebahagiaan Masyarakat.
- Pelestarian Budaya, dengan adanya DOB mampu melestarikan dan memajukan identitas budaya lokal.

d. Aspek Tata Kelola Pemerintahan

- Kinerja kelembagaan dan sinergi dengan pemerintah induk.
- Akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah.
- Penerapan prinsip *good governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas).

4. **Kerangka Analisis Terpadu**

Tahapan Fokus Kajian Pendekatan Analisis Hasil yang Diharapkan:

a. **Pra-Pemekaran**. Potensi dan kelayakan wilayah Indikator kewilayahan dan model skoring rekomendasi kelayakan DOB.

b. **Proses Pemekaran**. Aspek politik dan kelembagaan Analisis kelembagaan & kebijakan Model tata kelola DOB.

c. **Pasca-Mekar**. Kinerja pembangunan dan pelayanan Indikator Kinerja Daerah Baru evaluasi efektivitas pemekaran.

Tabel 2.8

Kerangka Analisis Terpadu Menghubungkan Tiga Tahapan Utama Pemekaran Wilayah

Tahapan	Fokus Kajian	Pendekatan Analisis	Hasil yang Diharapkan
Pra-Pemekaran	Potensi dan kelayakan wilayah	Indikator kewilayahan dan model skoring	Rekomendasi kelayakan DOB
Proses Pemekaran	Aspek politik dan kelembagaan	Analisis kelembagaan dan kebijakan	Model tata kelola DOB
Pasca-Mekar	Kinerja pembangunan dan pelayanan	Indikator kinerja daerah baru	Evaluasi efektivitas pemekaran

Sumber: Olahan Penulis, 2025

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN DAN SUMBER DATA

3.1 Metodologi Yang Digunakan

3.1.1 Persiapan Kajian

Tahap persiapan dimulai dengan kegiatan mobilisasi Tim Konsultan setelah kesepakatan kerja yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja dikeluarkan. Komposisi Tim yang ditugaskan diharapkan dapat memberikan hasil yang optimal dalam pekerjaan kajian ini. Kegiatan pada tahap persiapan meliputi:

- mobilisasi tim dan pemantapan organisasi kerja
- penyusunan ulang rencana kerja dan pemantapan metodologi

Keluaran pada tahap ini adalah Rencana Kerja untuk disepakati bersama antara Tim Konsultan dan Pemberi Kerja, memuat kegiatan dan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan secara menyeluruh. Penyusunan ulang Rencana Kerja didasarkan pada tahapan kerja. Kegiatan klarifikasi diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan keluaran yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan harapan dan permintaan. Kegiatan klarifikasi dilakukan melalui telaah ulang terhadap dokumen KAK, Usulan Teknis dan diskusi secara intensif untuk menggali keinginan dan kebutuhan pemberi kerja dan unit pemanfaatannya.

Konsultan menyusun ulang rencana kerja terinci mengenai semua tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana ini antara lain dimaksud untuk memonitor dan mengatur aktivitas kegiatan dikaitkan dengan pemanfaatan sumber-sumber daya. Rencana kerja ini juga akan digunakan sebagai acuan konsultan dalam melakukan penyelesaian pekerjaan dan pemantauan kemajuan pekerjaan. Untuk menghasilkan konsep awal yang sesuai dengan yang diharapkan. Hasil pada tahap ini dituangkan dalam bentuk Laporan Pendahuluan.

3.1.2 Pendekatan Kajian

Setelah laporan pendahuluan disepakati antara Tim Penyusun Naskah Akademik dan pengguna jasa. Tim Penyusun Naskah Akademik akan segera melakukan pengumpulan data sekunder dan primer lewat wawancara dan observasi.

3.1.3 *Metode Mixed System*

3.1.3.1 Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk memperoleh gambaran empiris dan terukur mengenai kondisi demografi, sosial ekonomi, dan kapasitas fiskal wilayah Kabupaten Tangerang Bagian Utara. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan pemekaran daerah berdasarkan indikator objektif yang dapat dibandingkan dengan wilayah induk dan wilayah sekitarnya.

Analisis kuantitatif dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Analisis Statistik Demografi

   Meliputi pengolahan data jumlah penduduk, tingkat kepadatan, laju pertumbuhan, struktur umur, rasio ketergantungan, serta distribusi penduduk antar kecamatan. Hasil analisis ini digunakan untuk menilai beban pelayanan publik, kebutuhan infrastruktur sosial, dan potensi tenaga kerja.

2. Analisis Ekonomi Regional

   Dilakukan dengan mengolah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi sektoral. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor unggulan serta tingkat kemandirian ekonomi wilayah calon daerah otonom baru.

3. Proyeksi Fiskal dan Kapasitas Keuangan Daerah

   Mencakup perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, serta kebutuhan belanja daerah dalam skenario pemekaran. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan *trend projection* terhadap data keuangan daerah selama lima tahun terakhir untuk memperkirakan kemampuan fiskal daerah baru dalam membiayai pemerintahan dan pelayanan publik.

4. Penilaian Kemampuan Calon Daerah Otonom Baru dan Wilayah Induk Pasca Pemekaran

   Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring dengan metode rata-rata. Pedoman yang digunakan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tahapannya sebagai berikut:

a. Data dikumpulkan sesuai faktor dan indikator yang tercantum dalam PP No. 78 tahun 2007.
b. Pemberian skor untuk pembentukan DOB Kabupaten Tangerang Utara dan Wilayah Induk yang ditinggalkan menggunakan pembanding kabupaten di wilayah Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.
c. Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
d. Besaran/nilai rata-rata pembanding digunakan untuk menyusun interval skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.
e. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori:

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

No	Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
1	Sangat Mampu	420 s/d 500	Rekomendasi
2	Mampu	340 s/d 419	Rekomendasi
3	Kurang Mampu	260 s/d 339	Ditolak
4	Tidak mampu	180 s/d 259	Ditolak
5	Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	Ditolak

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

f. Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).
g. Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

3.1.3.2 Metode Kualitatif

Metode kualitatif digunakan untuk memahami aspek sosial, politik, kelembagaan, dan regulasi yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi teoretis serta kesesuaian norma dan kebijakan dengan kondisi lapangan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. *Focus Group Discussions* (FGDs)

   FGDs dilaksanakan dengan melibatkan unsur pemerintah daerah (kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan), tokoh masyarakat, pelaku ekonomi, serta akademisi. Diskusi ini bertujuan untuk menggali persepsi, harapan, dan kekhawatiran para pemangku kepentingan terhadap rencana pemekaran. Hasil FGD akan memperkaya analisis mengenai kesiapan sosial dan kelembagaan wilayah calon daerah otonom baru.
2. Analisis Dokumen Peraturan dan Kebijakan

   Dilakukan terhadap berbagai dokumen hukum seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta dokumen perencanaan (RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, dan lain-lain). Tujuannya adalah

untuk memastikan kesesuaian rencana pemekaran dengan kerangka hukum dan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional. Analisis ini juga menilai sejauh mana dukungan regulatif telah tersedia untuk pelaksanaan pemekaran.

3.1.4 Sumber Data

Kajian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder yang bersumber dari instansi resmi, dokumen perencanaan, dan hasil lapangan. Sumber data utama meliputi:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kabupaten dan kecamatan, mencakup data demografi, sosial ekonomi, dan indikator pembangunan wilayah.
2. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang, sebagai penyedia data keuangan daerah, rencana pembangunan, serta informasi kelembagaan pemerintahan.
3. Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sebagai rujukan kebijakan dan pedoman penilaian pemekaran daerah otonom baru.
4. Dokumen Peraturan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), digunakan untuk menilai aspek tata ruang, batas wilayah, dan kesesuaian peruntukan lahan dengan kebutuhan pembangunan daerah baru.

3.1.5 Prosedur dan Validasi Data

Prosedur pengumpulan dan validasi data dilakukan secara sistematis untuk memastikan keandalan dan akurasi hasil analisis. Tahapan yang dilakukan meliputi:

1. Inventarisasi dan Kompilasi Data Sekunder

   Seluruh data dari BPS, instansi pemerintah, dan dokumen resmi dikumpulkan dan dikompilasi dalam format data *base* tematik. Data yang diperoleh diverifikasi kesesuaiannya dengan tahun rujukan, satuan, dan metode pengumpulan aslinya.
2. Pengumpulan Data Primer

   Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan FGD. Proses ini dilakukan dengan panduan instrumen survei yang

telah disusun agar hasilnya konsisten dan dapat dibandingkan antar kecamatan.

3. Validasi dan Triangulasi Data

   Validasi dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan hasil dari data sekunder, survei lapangan, dan hasil FGD. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap temuan memiliki dasar yang kuat dan tidak bersifat parsial.

4. Sinkronisasi dan Konsistensi Data Spasial

   Untuk aspek kewilayahan, dilakukan validasi spasial melalui pencocokan antara data administrasi wilayah dengan peta digital RTRW dan data geospasial resmi dari instansi pemerintah.

5. *Quality Control* dan *Review Internal*

   Setiap hasil pengolahan data dianalisis ulang oleh tim teknis dan dikonsultasikan dengan pihak pengguna jasa untuk memastikan relevansi, kelengkapan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan kajian.

3.2 Sistematika Penyusunan Laporan Kajian Antara dan Akhir

Struktur penulisan Laporan terdiri 5 Bab, yaitu:

BAB I **PENDAHULUAN**, terdiri dari sub bab latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan, manfaat kegiatan, target/sasaran, keluaran/hasil pekerjaan, dan definisi operasional.

BAB II **DESENTRALISASI, PENATAAN DAERAH, DAN STUDI PENDAHULUAN**

BAB III **METODOLOGI PENULISAN**

BAB IV **ANALISIS KAJIAN**

BAB V **PENUTUP**

3.3 Waktu Kegiatan

Kajian akan dilaksanakan di daerah yang memiliki kategori *smart city* yang sangat baik, maupun yang sangat buruk. Alasan tersebut dipilih sebagai lokasi kajian karena memiliki dinamika komunikasi dan informasi yang signifikan menjadi faktor utama dalam perkembangan daerah.

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama tiga bulan, dimulai pada Oktober 2025 hingga Desember 2025. Selama periode ini, kajian akan mencakup pengumpulan data primer dan sekunder.

Tabel 3.2

Pelaksanaan Pekerjaan (*work plan*)

No.	Kegiatan	Okt.	Nov.	Des.
1.	Menelaah pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan regulasi sektoral terkait.			
2.	Identifikasi masalah implementasi di daerah			
3.	Inventarisasi data sekunder dan studi komparatif			
4.	Penyusunan kerangka analisis.			
5.	Perumusan rekomendasi arah kebijakan			
6.	Penyusunan draft perubahan pasal dan penajaman substansi			
7.	Penyusunan draf Laporan Pendahuluan			
8.	Persiapan bahan konsultasi antar pemangku kepentingan			
9.	Pengambilan data lapangan			
10.	Pelaksanaan FGD / konsultasi dengan *stakeholders* daerah			
11.	Penyesuaian dokumen hasil masukan			
12.	Revisi Laporan Antara			
13.	Finalisasi Laporan Antara			
14.	Penyusunan Laporan Akhir			

Sumber: *ToR* Perubahan UU No. 23 Tahun 2014

Dengan rentang waktu yang ditetapkan, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi komunikasi dan informasi di daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi, sehingga perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Geografis dan Demografis

4.1.1 Analisis Geografis

Kabupaten Tangerang berada di sisi timur Provinsi Banten. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tangerang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah selatan dengan Kabupaten Bogor; sebelah barat dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak; serta sebelah timur dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kota Jakarta Barat.

Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah 1.034,510 Km² dan saat ini terdiri atas 29 kecamatan, 28 kelurahan, serta 246 desa. Luas wilayah per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Tangerang

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (km2)	Persentase (%)
	Wilayah Induk	**588.71**	**56.89**
1	Cisoka	31.21	3.02
2	Solear	34.07	3.29
3	Tigaraksa	55.3	5.35
4	Jambe	28.25	2.73
5	Cikupa	46	4.45
6	Panongan	36.15	3.49
7	Curug	30.83	2.98
8	Kelapa Dua	26.22	2.53
9	Legok	37.28	3.6
10	Pagedangan	50.75	4.91
11	Cisauk	30.05	2.9
12	Pasar Kemis	30.73	2.97
13	Sindang Jaya	41.39	4
14	Balaraja	32.3	3.12
15	Jayanti	24.88	2.4
16	Rajeg	53.3	5.15
	Wilayah Utara	**445.8**	**43.1**
17	Sukamulya	25.44	2.46
18	Kresek	29.99	2.9

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (km2)	Persentase (%)
19	Gunung Kaler	32.77	3.17
20	Kronjo	46.51	4.5
21	Mekar Baru	25.78	2.49
22	Mauk	44.94	4.34
23	Kemiri	33.45	3.23
24	Sukadiri	24.99	2.42
25	Sepatan	19.22	1.86
26	Sepatan Timur	19.66	1.9
27	Pakuhaji	54.55	5.27
28	Teluknaga	52.41	5.07
29	Kosambi	36.09	3.49
	Kabupaten Tangerang	**1034.54**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila dilakukan pemekaran wilayah di bagian utara yang mencakup 13 kecamatan, maka luas Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut mencapai 445 km², atau setara dengan 43,1% dari total luas Kabupaten Tangerang saat ini. Sementara itu, wilayah induk yang terdiri atas 16 kecamatan akan memiliki luas 588,71 km², atau sebesar 56,89% dari total luas Kabupaten Tangerang. Ini artinya luas daerah otonomi baru di wilayah utara masih tetap lebih kecil dibanding luas wilayah kabupaten induk.

4.1.1.1 Aksesibilitas

Aksesibilitas wilayah sangat ditentukan oleh faktor fisiografis dan jarak tempuh. Secara fisiografi, Kabupaten Tangerang didominasi oleh dataran rendah dengan kemiringan tanah rata-rata 0–3%. Kawasan dataran rendah ini terutama berada di bagian utara. Selain itu, terdapat wilayah dataran tinggi di bagian tengah hingga selatan dengan kemiringan tanah rata-rata 0–8% yang menurun ke arah utara. Dataran rendah dengan ketinggian 0–25 mdpl tersebar di sejumlah kecamatan seperti Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Gunung Kaler, Kronjo, Mekarbaru, Pakuhaji, Sepatan, dan Sepatan Timur. Bagian utara Kabupaten Tangerang juga merupakan wilayah pesisir dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 50 km.

Tingkat ketinggian permukaan tanah serta jarak masing-masing kecamatan ke pusat ibu kota kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Tingkat Ketinggian Permukaan Tanah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten

No	Kecamatan	Ketinggian Wilayah	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km)
	Wilayah Induk (rata-rata)	**29.35**	**10.69**
1	Cisoka	33.54	4.18
2	Solear	42.76	7.43
3	Tigaraksa	31.47	0
4	Jambe	37.19	6.15
5	Cikupa	28.29	6.97
6	Panongan	35.25	7.08
7	Curug	35.77	10.78
8	Kelapa Dua	25.5	16.39
9	Legok	44	12.65
10	Pagedangan	30.09	16
11	Cisauk	53.97	21.05
12	Pasar Kemis	16.86	13.41
13	Sindang Jaya	15.81	12.49
14	Balaraja	20.77	7.29
15	Jayanti	15.71	10.91
16	Rajeg	2.68	18.2
	Wilayah Utara (rata-rata)	**5.53**	**22.45**
17	Sukamulya	12.76	11.96
18	Kresek	10.23	16.41
19	Gunung Kaler	4.2	20.72
20	Kronjo	1.81	20.48
21	Mekar Baru	2.66	24.6
22	Mauk	1.08	22.68
23	Kemiri	2.12	19.73
24	Sukadiri	6.1	24.2
25	Sepatan	6.71	19.88
26	Sepatan Timur	9.04	21.85
27	Pakuhaji	3.13	26.81
28	Teluknaga	9.56	31
29	Kosambi	2.48	31.55
	Kabupaten Tangerang	**18.67**	-

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata ketinggian wilayah kecamatan di bagian utara adalah 5,53 meter di atas permukaan laut. Adapun jarak rata-rata kecamatan di wilayah utara ke ibu kota kabupaten saat ini adalah 22,45

km. Sementara itu, kecamatan-kecamatan di wilayah induk memiliki jarak rata-rata 10,69 km dari ibu kota kabupaten.

Sumber daya air di Kabupaten Tangerang berasal dari air permukaan dan air tanah. Air tanah memiliki potensi cadangan yang cukup tinggi, meskipun beberapa kecamatan seperti Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluknaga, dan Kosambi mengalami intrusi air laut serta tekanan akibat eksploitasi untuk kebutuhan industri. Di sisi lain, air permukaan antara lain berasal dari aliran sungai yang memiliki debit relatif tinggi meskipun berfluktuasi pada musim kemarau. Namun, kualitas air sungai mulai menurun akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat di sekitar daerah aliran sungai. Kondisi pencemaran ini perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat tingginya pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kebutuhan air seiring berkembangnya aktivitas masyarakat.

Dari sisi geografis dan luas wilayah, pemekaran Kabupaten Tangerang berpotensi menciptakan struktur kewilayahan yang lebih proporsional dan mudah dikelola. Wilayah utara, yang mencakup sekitar 43,1% luas kabupaten, memiliki karakteristik dataran rendah dan pesisir dengan tantangan khas seperti intrusi air laut, kualitas air sungai yang menurun, serta kebutuhan pengelolaan pesisir dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Pembentukan daerah otonom baru di wilayah utara akan memungkinkan fokus kebijakan yang lebih spesifik, terutama terkait pengelolaan sumber daya air, penanganan pencemaran, mitigasi risiko banjir, serta pengembangan infrastruktur pesisir. Dengan tata kelola yang lebih dekat dan terfokus pada kebutuhan lokal, pemerintah daerah baru dapat merespons permasalahan strategis tersebut secara lebih cepat dan efektif.

Sementara itu, wilayah induk yang lebih dekat ke pusat pertumbuhan perkotaan dan pusat pemerintahan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam konsolidasi layanan publik serta pengelolaan pembangunan berbasis perkotaan dan perdesaan. Jarak yang lebih dekat antar kecamatan ke ibu kota kabupaten—rata-rata 10,69 km—mendukung efisiensi pemerintahan, distribusi layanan, serta koordinasi pembangunan. Pemekaran juga berpotensi mengurangi beban administratif wilayah induk yang selama ini mencakup area yang sangat luas dan heterogen. Dengan pemisahan wilayah, kebijakan pembangunan dapat disesuaikan secara lebih presisi: wilayah utara diarahkan pada penguatan ekonomi

pesisir dan penanganan lingkungan, sedangkan wilayah induk fokus pada pengembangan kawasan permukiman, pusat industri, dan layanan publik perkotaan. Artinya aksesibilitas daerah otonom baru dan induk akan memiliki diferensiasi pada aspek layanan rural dan urban. Dengan demikian pelayanan pada masyarakat desa untuk berkembang akan jauh lebih baik dibagian utara, dan pelayanan perkotaan akan lebih fokus di wilayah selatan tangerang perkotaan.

4.1.2 Analisis Demografis

Proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh dua jenis faktor, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi mencakup sumber daya alam, sumber daya manusia, permodalan, serta tenaga kerja manajerial yang mengorganisir dan mengatur proses produksi. Keseluruhan unsur tersebut disebut sebagai faktor-faktor produksi. Selain itu, perlu pula diperhatikan adanya spesialisasi atau pembagian kerja, perkembangan teknologi, dan berbagai unsur lain yang dapat menunjang efektivitas faktor-faktor produksi dalam proses pembangunan. Di sisi lain, terdapat pula faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor ini meliputi bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas, sikap, adat istiadat, nilai-nilai sosial, tujuan dan motivasi masyarakat, serta struktur politik dan kelembagaan di negara yang bersangkutan.

Tenaga kerja dalam proses produksi dan pembangunan memegang peranan yang sangat penting. Peran sumber daya manusia ini pada dasarnya ditentukan oleh jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas) tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja yang berkualitas, dengan keahlian dan keterampilan yang baik, sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi nasional. Oleh karena itu, peningkatan mutu sumber daya manusia menjadi hal yang krusial, antara lain melalui pendidikan, pelatihan, serta penyesuaian dengan bidang usaha dan lapangan kerja yang terus berkembang seiring proses pembangunan.

Selain itu, produktivitas dan peran sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh aspek sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, baik yang bersifat mendorong maupun yang menghambat perubahan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, perlu diupayakan perubahan

perilaku dan kebiasaan masyarakat, serta pembaruan lembaga-lembaga sosial melalui pendidikan, bimbingan, dan penyuluhan agar tercipta lingkungan sosial yang kondusif bagi pembangunan.

Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pembangunan ekonomi dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, dalam jangka pendek, pertumbuhan penduduk cenderung berdampak negatif karena dapat menekan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dalam jangka panjang, pertumbuhan penduduk justru dapat memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi, karena peningkatan jumlah penduduk dapat mendorong berkembangnya proses pembangunan secara lebih luas.

Permasalahan yang muncul di bidang kependudukan bukan hanya pada jumlahnya, tetapi juga pada persebaran penduduk, kualitas penduduk, kecukupan dari sisi konsumsi, struktur penduduk yang sebagian besar masih muda, modal dan teknologi. Dalam konteks Kabupaten Tangerang dan hubungannya dengan potensi pemekaran Tangerang Bagian Utara, analisis demografis dapat dilihat pada subbab berikut.

4.1.2.1 Jumlah Penduduk

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai lebih dari 3,31 juta jiwa, terdiri atas 1,68 juta laki-laki dan 1,62 juta perempuan. Jumlah tersebut setara dengan 27,32 persen dari total penduduk Provinsi Banten yang mencapai lebih dari 12,30 juta jiwa. Dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Banten, Kabupaten Tangerang menempati peringkat pertama sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Distribusi per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang, 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	Wilayah Induk	**2,163,017**
1	Cisoka	97,591
2	Solear	101,969
3	Tigaraksa	163,531

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
4	Jambe	55,650
5	Cikupa	209,140
6	Panongan	129,996
7	Curug	176,617
8	Kelapa Dua	167,553
9	Legok	124,324
10	Pagedangan	111,222
11	Cisauk	91,438
12	Pasar Kemis	255,345
13	Sindang Jaya	95,575
14	Balaraja	124,129
15	Jayanti	70,728
16	Rajeg	188,209
	Wilayah Utara	**1,146,348**
17	Sukamulya	74,309
18	Kresek	71,795
19	Gunung Kaler	56,160
20	Kronjo	65,599
21	Mekar Baru	44,152
22	Mauk	91,382
23	Kemiri	50,977
24	Sukadiri	66,679
25	Sepatan	112,289
26	Sepatan Timur	105,994
27	Pakuhaji	127,330
28	Teluknaga	167,977
29	Kosambi	111,705
	Total Kabupaten Tangerang	3,309,365

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Jumlah penduduk Kabupaten Tangerang yang sangat besar memberikan implikasi strategis bagi rencana pemekaran. Dengan komposisi penduduk yang

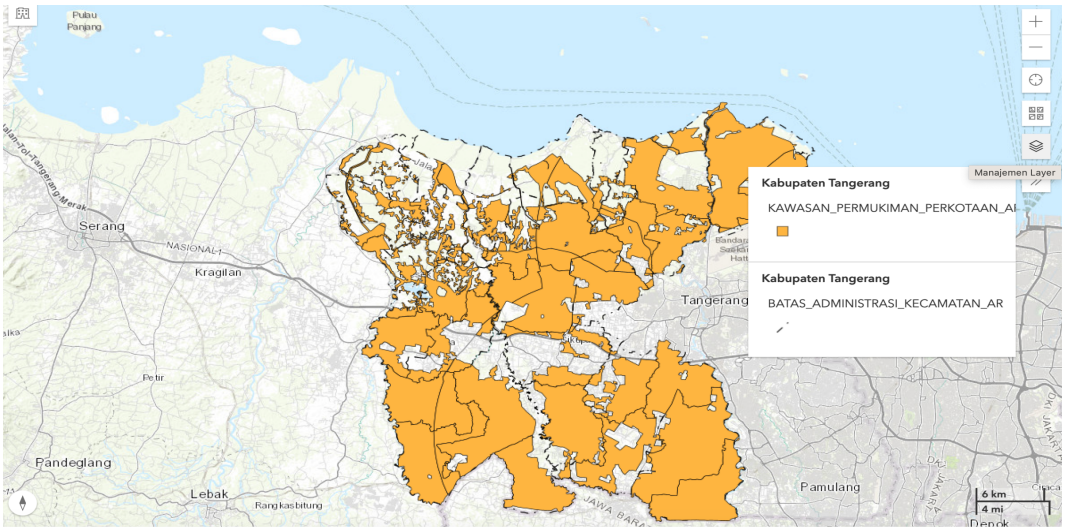
terbagi sekitar 2,16 juta jiwa di wilayah induk dan 1,14 juta jiwa di wilayah utara, pemekaran akan membantu distribusi pelayanan publik menjadi lebih efektif dan dekat dengan masyarakat, terutama di wilayah utara yang selama ini memiliki kepadatan tinggi. Skala penduduk yang besar juga menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, menyediakan infrastruktur dasar, dan mengelola pertumbuhan kawasan secara lebih terfokus. Selain itu, beban administrasi yang selama ini dipikul oleh pemerintah kabupaten akan berkurang, sehingga kedua wilayah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi masing-masing. Dengan demikian, pemekaran tidak hanya menjadi solusi administratif, tetapi juga strategi percepatan pembangunan berbasis demografi, terutama untuk memastikan bahwa wilayah utara memperoleh porsi pembangunan yang proporsional dan mampu berkembang secara mandiri.

4.1.2.2 Kepadatan Penduduk

Peta kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang adalah sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.1

Peta Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tangerang cukup tinggi, dimana pada tahun 2024 adalah sebesar 3.261 orang per kilometer persegi. Angka ini meningkat tajam dari lima tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2.400 orang per

kilometer persegi. Angka ini mencerminkan pertumbuhan kepadatan sebesar lebih dari 35 persen dalam kurun waktu lima tahun, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.4

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Tangerang, 2019-2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Data Disdukcapil) (Jiwa/Km Persegi)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wilayah Induk						
- Cisoka	2964,14	3238,13	2946,23	3053,84	3126,43	3205
- Solear	2743,88	3042,64	2757,75	2874,38	2992,66	3085
- Tigaraksa	2834,02	3093,27	2840,86	2921,9	2956,91	3011
- Jambe	1728,09	1905,61	1859,05	1923,58	1969,8	2018
- Cikupa	4443,37	4741,61	4476,31	4544,26	4546,97	4594
- Panongan	3102,52	3397,85	3450,13	3554,12	3596,36	3675
- Curug	5560,42	6044,04	5524,92	5664,97	5728,25	5835
- Kelapa Dua	6109,4	6483,99	6313,77	6377,58	6390,51	6507
- Legok	3019,07	3300,17	3220,14	3301,98	3335,09	3405
- Pagedangan	1940,23	2157,82	2049,78	2138,27	2191,49	2261
- Cisauk	2673,75	2970,72	2847,51	2966,66	3043,14	3124
- Pasar Kemis	9020,45	9614,81	8279,32	8356,43	8308,34	8411
- Sindang Jaya	2180,11	2361,72	2212,2	2282,19	2308,88	2363
- Balaraja	3273	3497,62	3721,43	3814,54	3843,46	3906
- Rajeg	2634,64	2994,02	3242,13	3412,95	3531,07	3638
- Jayanti	2517,16	2727,92	2731,48	2808,13	2842,82	2880
Wilayah Utara						
- Suka Mulya	2295,47	2522,01	2810,67	2891,84	2921,01	2954
- Kresek	2371,74	2563,88	2321,4	2381,45	2393,99	2428
- Gunung Kaler	1540,97	1710,83	1622,36	1686,17	1713,82	1740
- Kronjo	1171,4	1340,85	1346,45	1392,87	1410,3	1429
- Mekar Baru	1465,49	1689,71	1640,9	1693,57	1712,34	1743
- Mauk	1546,3	1654,14	1975,14	2023	2033,21	2062
- Kemiri	1309,14	1438,2	1464,69	1507,5	1524	1555
- Sukadiri	2363,5	2538,15	2558,4	2625,26	2667,7	2718

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan (Data Disdukcapil) (Jiwa/Km Persegi)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Sepatan	5388,97	5988,22	5640,31	5795,95	5841,31	5962
- Sepatan Timur	4761,19	5328,24	5203,57	5353,19	5390,78	5505
- Pakuhaji	2021,59	2236,84	2243,22	2316,33	2334,29	2376
- Teluknaga	3343,57	3808,11	3099,16	3189,98	3204,78	3263
- Kosambi	3336,73	3604,1	3059,28	3099,12	3095,05	3154
Kabupaten Tangerang	2400,17	2653,16	2638,58	2719,23	2749,25	3261

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang

Jika data di atas dipilah menjadi dua wilayah, yaitu bagian utara yang terdiri dari 13 kecamatan, wilayah induk sejumlah 16 kecamatan, serta diperbandingkan dengan Kabupaten Tangerang secara keseluruhan, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5

Rata-rata Kepadatan Penduduk per wilayah, 2019-2024

Kecamatan	Rata rata kepadatan dalam per tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bagian Utara	2.532	2.802	2.691	2.766	2.788	2.838
Bagian induk	3.547	3.848	3.655	3.750	3.795	3.870
Tangerang seluruhnya	2.400	2.653	2.639	2.719	2.749	3.261

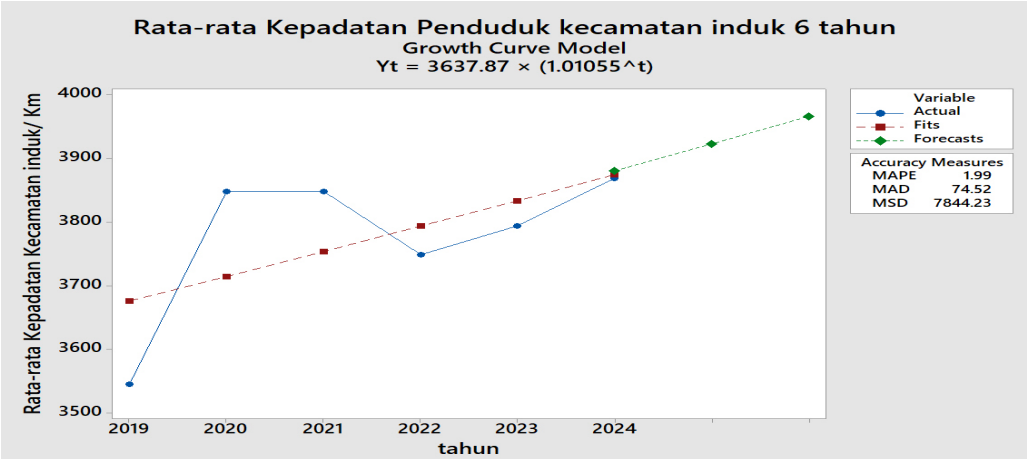
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Data di atas menunjukkan bahwa kepadatan penduduk sama-sama mengalami kenaikan di masing masing wilayah, baik di bagian utara maupun wilayah induknya. Meningkatnya kepadatan penduduk disebabkan oleh semakin terbukanya industrialisasi atau semakin baiknya pembangunan di daerah tersebut. Meskipun terdapat perbedaan tingkat kepadatan, kedua wilayah menunjukkan pola yang serupa, yaitu peningkatan yang stabil namun disertai dengan indikasi perlambatan laju pertumbuhan.

Jika diproyeksikan selama tiga tahun kedepan, kedua wilayah tersebut sama-sama akan terus mengalami kenaikan kepadatan penduduk, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.2

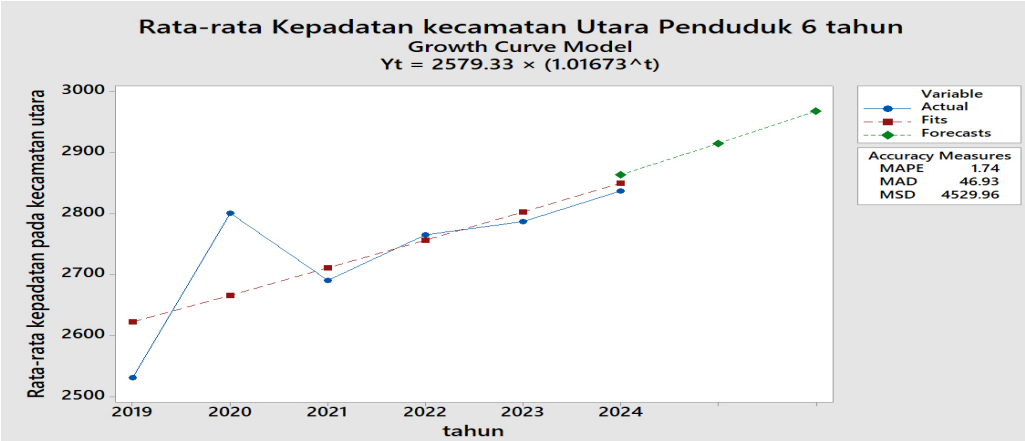
Projeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar 4.3

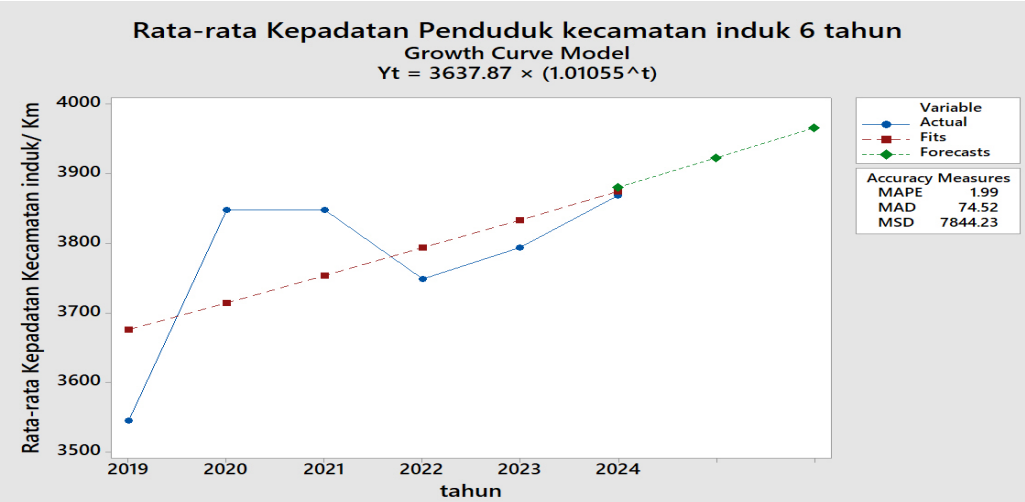
Proyeksi Kepadatan Penduduk Tangerang Utara



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar 4.4

Proyeksi Kepadatan Penduduk Wilayah Induk



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Jika dituliskan dalam rumus matematika, wilayah Tangerang Utara mengalami perkembangan positif (Growth Curve Model Yt = 2579.33 × (1.01673^t), kecamatan induk juga mengalami perkembangan positif (Growth Curve Model Yt = 3637.87 × (1.01055 ^t). Data *fore cast* (ditandai dengan garis hijau) dalam masing masing grafik trend mengalami pelandaian kenaikan kepadatan penduduk, baik di bagian utara, di wilayah induk, serta kecamatan seluruhnya di Kabupaten Tangerang. Dalam rata-rata bergeraknya selama 6 tahun yakni kurun waktu 2019-2024 (ditandai dengan garis merah) mengalami kenaikan, demikian juga hasil prediksi untuk 2 tahun ke depan yakni 2025-2006 juga mengalami kenaikan.

Dari sisi tata ruang dan pemerataan pembangunan, hasil proyeksi di atas dapat dimaknai dua hal. Pertama, peningkatan kepadatan yang terus terjadi menandakan adanya tekanan terhadap kapasitas infrastruktur dan layanan publik di wilayah yang saat ini masih berada di bawah satu administrasi Kabupaten Tangerang. Kedua, pelandaian laju pertumbuhan memberi peluang untuk melakukan pengelolaan wilayah yang lebih efektif karena tekanan penduduk tidak lagi terlalu eksplosif sehingga masih dapat diimbangi dengan penyediaan fasilitas baru di wilayah hasil pemekaran.

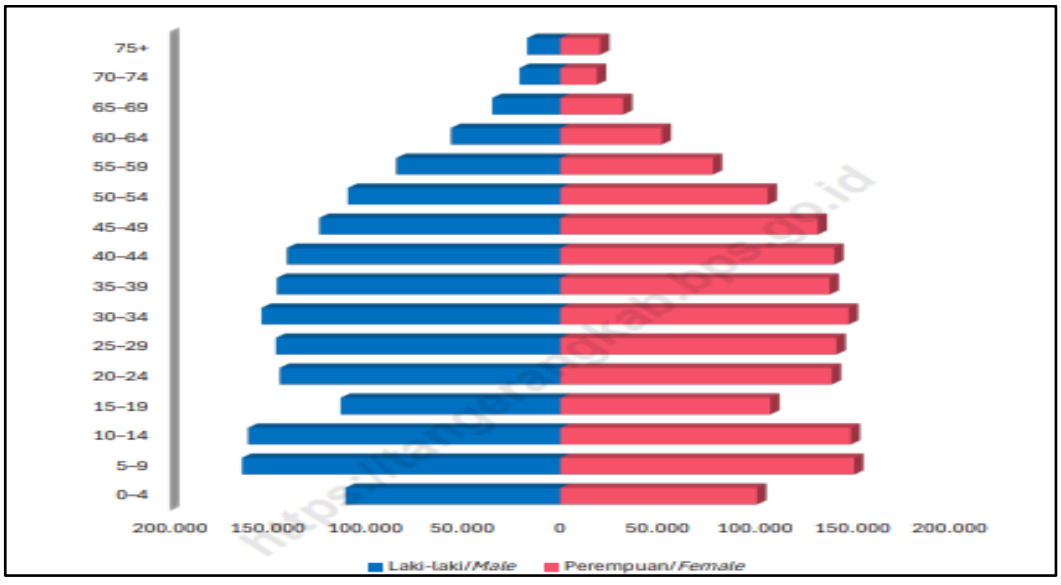
4.1.2.3 Struktur Demografi

Dari sisi struktur demografi, rasio jenis kelamin Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 103,64. Artinya, untuk setiap 100 perempuan terdapat sekitar 103 laki-laki. Sementara itu, rasio ketergantungan penduduk mencapai 40,80 persen, yang menunjukkan bahwa dalam setiap 100 orang usia produktif (15–64 tahun), terdapat sekitar 40 hingga 41 orang usia tidak produktif (anak-anak usia 0–14 tahun dan lansia berusia 65 tahun ke atas) yang menjadi tanggungan secara ekonomi.

Jika dilihat dari bentuk piramida penduduk yang mulai mengerucut di bagian bawah, terlihat bahwa komposisi penduduk Kabupaten Tangerang masih didominasi oleh kelompok usia muda. Kelompok usia 5–9 tahun merupakan yang terbanyak dengan jumlah 301.731 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 10–14 tahun sebanyak 301.731 jiwa, dan kelompok usia produktif 30–34 tahun sebanyak 298.840 jiwa. Secara umum, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding perempuan. Namun, pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), justru penduduk perempuan yang lebih dominan.

Gambar 4.5

Piramida Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2024



Sumber: BPS (2025)

Struktur piramida penduduk diatas menunjukkan dominasi usia produktif, yang berarti bahwa terdapat daya dukung jika akan dilakukan pembentukan daerah otonom baru. Kapasitas tenaga kerja yang ada tersebut memberikan

peluang pertumbuhan pembangunan bagi wilayah yang baru, sepanjang disertai dengan perencanaan pembangunan yang tepat.

4.1.2.4 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk suatu daerah pada waktu tertentu dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Jika pertumbuhan penduduk di suatu daerah semakin meningkat dan lahan yang diciptakan terbatas, maka akan semakin banyak orang yang menganggur. Pertumbuhan penduduk sebenarnya merupakan keseimbangan dinamis antara dua kekuatan yang menambah atau yang mengurangi jumlah penduduk. Perkembangan penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir tetapi secara bersamaan pula akan dikurangi oleh jumlah kematian yang dapat terjadi pada semua golongan umur. Dalam konteks spasial, mobilitas penduduk juga berpengaruh terhadap perubahan dalam jumlah penduduk, dimana imigrasi akan menambah jumlah penduduk dan emigrasi akan mengurangi jumlah penduduk dalam suatu wilayah.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah merupakan hal yang positif karena dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun disisi lain, jumlah penduduk yang besar bisa saja menjadi beban bagi pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan yang semakin lama semakin banyak pula seiring dengan perkembangan jumlah penduduk tersebut. Pandangan pesimis seperti ini didukung oleh teori Malthus yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menurut deret ukur sementara pertumbuhan bahan makanan menurut deret hitung. Simpulan dari pandangan pesimis ini adalah bukan kesejahteraan yang didapat tapi justru kemelaratan akan ditemui bilamana jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik.

Setiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk kerap mengalami peningkatan di berbagai daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk pada suatu wilayah atau daerah tak selalu sama dan akan selalu berubah. Bahkan setiap tahunnya, jumlah tersebut bisa mengalami peningkatan.

Terkait dengan tingkat kelahiran (fertilitas), jika angkanya tinggi maka akan menyebabkan pertumbuhan populasi yang cepat, sementara tingkat kelahiran yang rendah cenderung menghasilkan pertumbuhan yang lambat. Selain itu, di sisi lain terdapat pula istilah anti-natalitas, yakni berbagai faktor yang menjadi penghambat kelahiran. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran meliputi kebijakan keluarga, tingkat kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kondisi ekonomi.

Selanjutnya terkait dengan tingkat kematian (mortalitas), angka yang yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan populasi, sementara tingkat kematian yang rendah akan mempercepat pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian meliputi akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi, gizi, penyakit menular, perang, dan bencana alam. Bila kualitas kesehatan di suatu daerah tergolong rendah, biasanya tingkat mortalitas di daerah tersebut akan tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Terakhir terkait dengan migrasi, baik itu migrasi internal (antara wilayah dalam suatu negara) maupun migrasi internasional (antara negara-negara), yang juga merupakan faktor penting dalam pertumbuhan penduduk. Migrasi neto positif (masuknya lebih banyak penduduk daripada yang keluar) akan meningkatkan pertumbuhan populasi suatu wilayah, sementara migrasi netto negatif (keluarnya lebih banyak penduduk daripada yang masuk) akan mengurangi pertumbuhan populasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi meliputi faktor ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan budaya.

Di Kabupaten Tangerang, data empat tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 9,4%, kemudian menurun menjadi 4,2%, 2,8%, dan 1% pada tahun 2023. Bila dibedakan antara wilayah utara (13 kecamatan) dan wilayah lainnya (16 kecamatan), perbedaannya tidak terlalu signifikan. Wilayah utara mencatat pertumbuhan masing-masing 10,7%, 4,7%, 2,9%, dan 0,9%, sedangkan wilayah lainnya mencatat 9,1%, 4,3%, 3%, dan 1,5%. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.6

Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan

di Kabupaten Tangerang, 2020-2023

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang (Persen (%)			
Wilayah Induk	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
- Cisoka	9,24	5,54	3,65	2,38
- Solear	10,89	6,46	4,23	4,11
- Tigaraksa	9,15	4,21	2,85	1,2
- Jambe	10,27	5,92	3,47	2,4
- Cikupa	6,71	1,74	1,52	0,06
- Panongan	9,52	5,07	3,01	1,19
- Curug	8,7	2,83	2,53	1,12
- Kelapa Dua	6,13	2,95	1,01	0,2
- Legok	9,31	3,54	2,54	1
- Pagedangan	11,22	5,52	4,32	2,49
- Cisauk	11,11	3,71	4,18	2,58
- Pasar Kemis	6,59	2,1	0,93	-0,58
- Sindang Jaya	8,33	4,37	3,16	1,17
- Balaraja	6,86	2,39	2,5	0,76
- Jayanti	8,37	4,28	2,81	1,24
- Rajeg	13,64	7,48	5,27	3,46
Wilayah Utara				
- Suka Mulya	9,87	5,24	2,89	1,01
- Kresek	8,1	4,56	2,59	0,53
- Gunung Kaler	11,02	4,87	3,93	1,64
- Kronjo	14,47	5,6	3,45	1,25
- Mekar Baru	15,3	5,12	3,21	1,11
- Mauk	6,97	4,37	2,42	0,5
- Kemiri	9,86	4,18	2,92	1,09
- Sukadiri	7,39	4,37	2,61	1,62
- Sepatan	11,12	4,54	2,76	0,78
- Sepatan Timur	11,91	5,1	2,88	0,7
- Pakuhaji	10,65	5,46	3,26	0,78
- Teluknaga	13,89	5,12	2,93	0,46
- Kosambi	8,01	2,94	1,3	-0,13
Kabupaten Tangerang	9,4	4,18	2,76	1,1

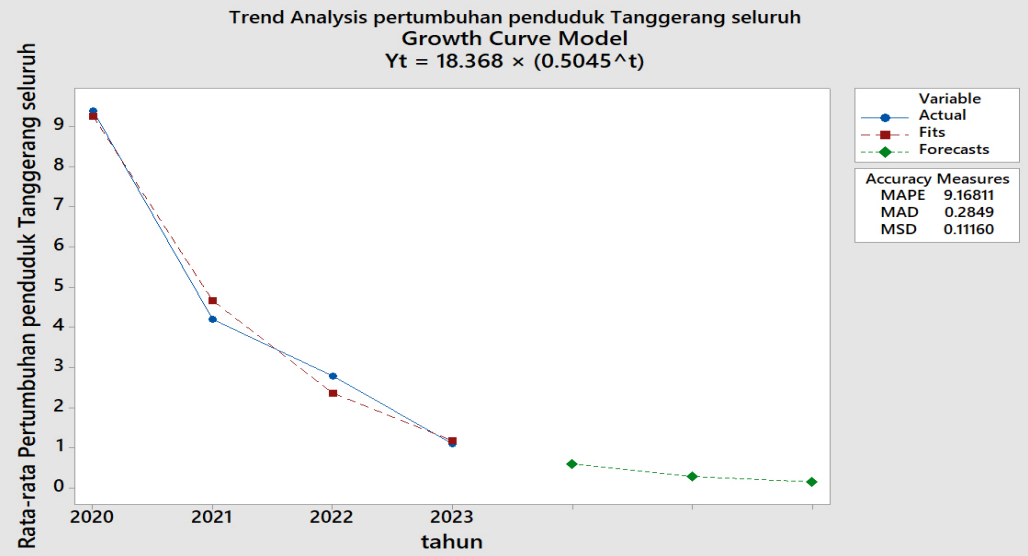
Sumber: BPS (2025)

Jika dilakukan proyeksi untuk tiga tahun ke depan, laju pertumbuhan penduduk di kedua wilayah diperkirakan akan terus melambat tanpa menunjukkan

perbedaan yang signifikan antara keduanya. Meskipun demikian, perlambatan laju pertumbuhan tersebut tidak berarti akan terjadi penurunan jumlah penduduk secara absolut. Dengan kata lain, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang diperkirakan tetap meningkat, hanya saja dengan kecepatan pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tren laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.6

Trend Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tangerang

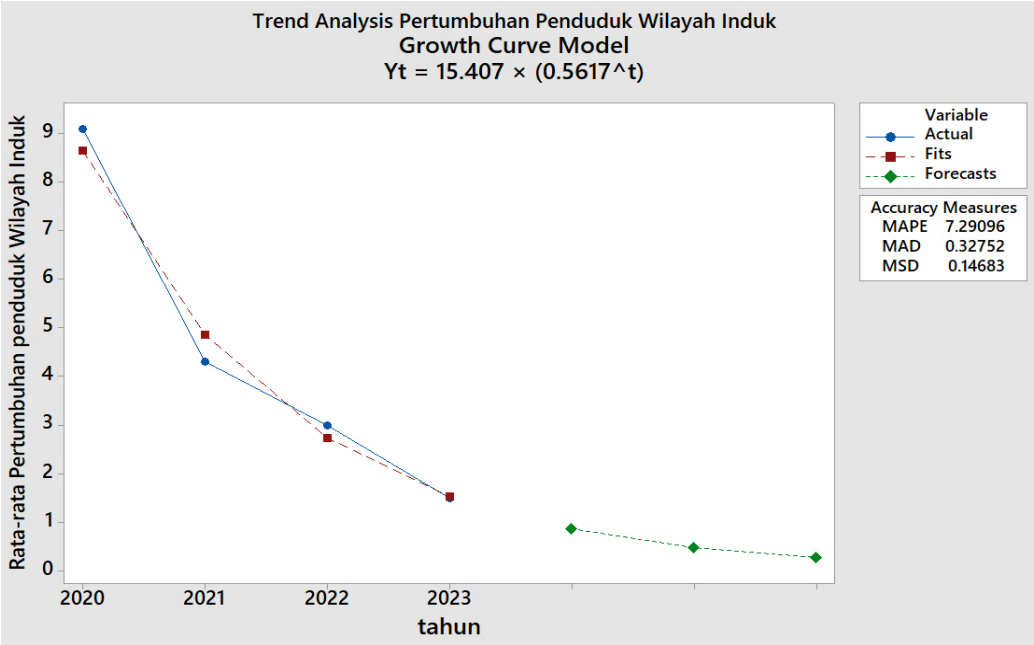


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Trend laju pertumbuhan penduduk pada wilayah induk dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.7

Trend Laju Pertumbuhan Penduduk di Wilayah Induk

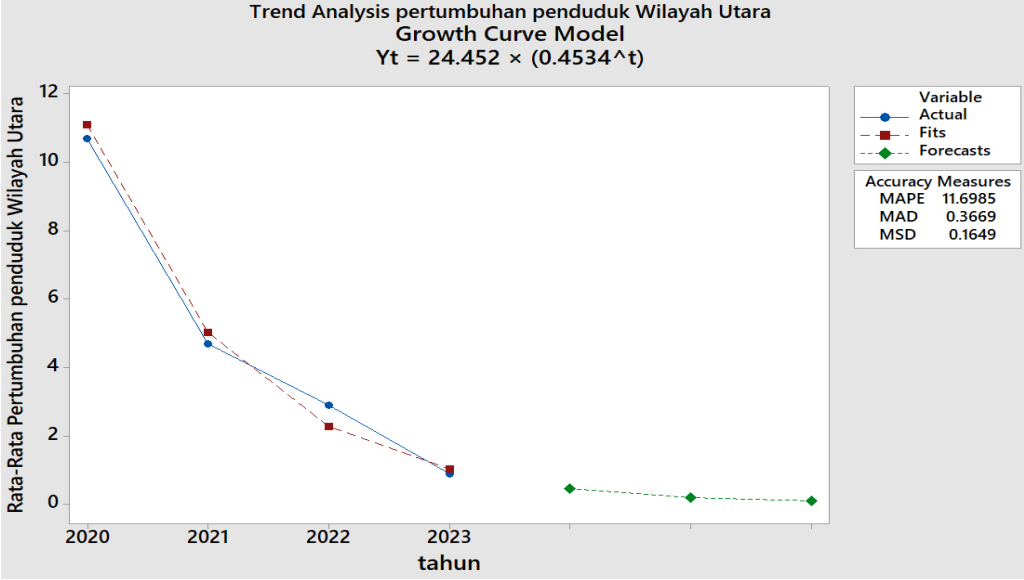


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Trend laju pertumbuhan penduduk di wilayah utara dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.8

Trend Laju Pertumbuhan Penduduk di Tangerang Bagian Utara



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Uraian di atas menunjukan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tangerang, baik di wilayah utara maupun wilayah induknya, menunjukkan tren yang relatif seimbang dalam empat tahun terakhir. Meskipun laju pertumbuhan

cenderung menurun, jumlah penduduk di kedua wilayah tetap meningkat setiap tahunnya. Artinya, secara demografis, wilayah utara memiliki potensi yang cukup kuat untuk berdiri sebagai daerah otonom baru karena memiliki basis penduduk yang cukup besar dan pertumbuhannya masih positif.

Tren perlambatan laju pertumbuhan penduduk di kedua wilayah juga menunjukkan bahwa tekanan terhadap sumber daya wilayah dapat dikelola dengan lebih baik dalam jangka menengah. Artinya, dari sisi kependudukan, pemekaran tidak akan menimbulkan beban populasi yang berlebihan pada wilayah baru. Sebaliknya, pembentukan Kabupaten Tangerang Utara dapat berpotensi menciptakan pengelolaan yang lebih efektif terhadap kepadatan penduduk, terutama di wilayah pesisir dan kawasan pertumbuhan baru yang saat ini masih terpusat di bawah satu administrasi.

4.1.2.5 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Pembangunan

Penduduk sebagai sumber daya manusia merujuk pada pandangan bahwa populasi suatu wilayah tidak hanya dipandang sebagai beban, tetapi juga sebagai potensi yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Setiap individu memiliki kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan dan pengembangan kualitas penduduk yang tepat, populasi dapat menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta kemajuan sosial.

Hubungan antara perkembangan penduduk dan pembangunan terlihat dari bagaimana jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan apabila diimbangi dengan kualitas dan produktivitas yang memadai. Di Kabupaten Tangerang, jumlah penduduk yang besar sebenarnya berpotensi mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan hasil pembangunan. Namun demikian, peningkatan jumlah penduduk tidak selalu sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan penduduk dan PDRB Kabupaten Tangerang pada periode 2020–2025 yang tidak menunjukkan hubungan positif yang signifikan. Bahkan, hubungan keduanya bersifat negatif, dengan nilai Pearson correlation antara penduduk dan PDRB sebesar -0.948. Temuan lainnya

menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan penduduk belum mampu mendorong kenaikan pertumbuhan PDRB (persamaan hubungan: Pertumbuhan Penduduk = 6.471 – 0.782 PDRB). Artinya, peningkatan jumlah penduduk justru diikuti penurunan PDRB Kabupaten Tangerang.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk belum sepenuhnya menjadi sumber daya yang kuat dalam menopang perekonomian daerah, antara lain karena produktivitas penduduk yang rendah serta tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembangunan, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja berbasis industrialisasi. Industrialisasi berpotensi meningkatkan PDRB sekaligus menyerap tenaga kerja lokal secara lebih optimal.

Pemerintah perlu melakukan intervensi kebijakan yang dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja dan menempatkan penduduk sebagai aset pembangunan. Salah satu langkah strategis adalah pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Tangerang Utara, yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Dalam konteks ini, penduduk menjadi sumber daya manusia yang dapat menggerakkan perekonomian di wilayah otonomi baru tersebut.

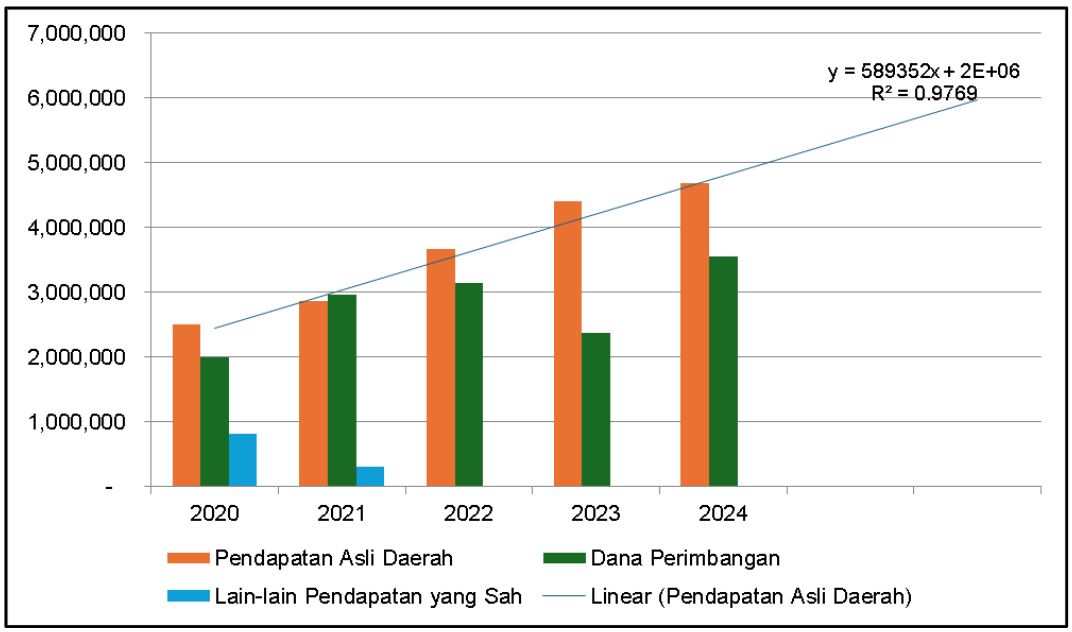
4.2 Analisis Ekonomi

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Pendapatan (APBD) kabupaten Tangerang selama lima tahun terakhir telah mengalami peningkatan signifikan, dari Rp. 5,3 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 8,12 Triliun di tahun 2025. Sebagian besar penerimaan APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang rata-rata berkontribusi 53% terhadap APBD selama lima tahun terakhir, sebagaimana Grafik berikut.

Gambar 4.9

Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

PAD Kabupaten Tangerang menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat. Berdasarkan data tahun 2020–2024, PAD meningkat dari sekitar Rp. 2,15 Triliun pada tahun 2020 menjadi lebih dari Rp. 4,61 Triliun pada tahun 2024. Laju pertumbuhan ini menggambarkan peningkatan kemampuan fiskal yang signifikan, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan mencapai sekitar 22–25%. Kinerja tersebut menempatkan Kabupaten Tangerang sebagai Pemda dengan kapasitas fiskal tertinggi di Indonesia, sejajar dengan daerah-daerah metropolitan lain. Kekuatan fiskal ini menjadi fondasi utama jika akan dilakukan pemekaran wilayah.

Selama lima tahun terakhir, struktur PAD Kabupaten Tangerang didominasi oleh Pajak Daerah, yang pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp3,6 Triliun, atau hampir 80% total PAD. Dominasi pajak daerah menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Tangerang memiliki basis yang kuat pada aktivitas ekonomi modern, yang memberikan kontribusi melalui Bea Perolehan Hak Tanah Dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Parkir, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Tanah. Komponen hasil retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi tambahan yang relatif kecil tetapi stabil. Komponen lain-lain PAD yang sah tetap menjadi sumber penting, terutama dari

pengelolaan aset dan kerja sama daerah. Komposisi seperti ini mencerminkan kapasitas fiskal yang mapan dan berkelanjutan, karena sebagian besar pendapatan berasal dari sumber-sumber internal yang dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah sendiri. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tangerang, 2020-2024

(dalam juta rupiah)

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Pajak Daerah	1.701.901	2.056.963	2.886.077	3.490.364	3.615.836
Hasil Retribusi Daerah	136.547	100.549	61.867	123.597	210.913
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.607	55.167	61.765	64.854	60.606
Lain-lain PAD yang Sah	570.310	657.250	656.002	723.377	729.520
Total PAD	**2.465.365**	**2.869.929**	**3.665.710**	**4.402.192**	**4.616.875**

Sumber: Bappenda Kabupaten Tangerang, 2025

Pertumbuhan PAD yang konsisten juga menunjukkan adanya peningkatan dalam efisiensi administrasi perpajakan dan kinerja ekonomi lokal. Realisasi PAD yang selalu melampaui target anggaran (dengan rasio realisasi di atas 110 persen setiap tahun) menandakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan. Selanjutnya, jika dikelompokan menjadi dua wilayah, realisasi pajak daerah di wilayah utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Realisasi Pajak Daerah Wilayah Utara, 2022-2024 (dalam Juta Rupiah)

No	Kecamatan	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Gunung Kaler	5.722	7.399	8.359
2	Kemiri	10.081	11.295	12.297
3	Kosambi	160.770	509.619	423.284
4	Kresek	7.865	10.284	11.448
5	Kronjo	8.584	17.862	28.189
6	Mauk	17.446	25.459	29.571
7	Mekar Baru	5.832	6.999	7.502
8	Pakuhaji	100.339	103.036	144.283
9	Sepatan	37.253	44.189	45.821
10	Sepatan Timur	24.103	24.717	28.640
11	Sukadiri	14.681	14.941	16.212
12	Sukamulya	12.696	16.147	15.354
13	Teluknaga	102.433	80.506	118.041
	Total Wilayah Utara	507.806	872.453	889.002

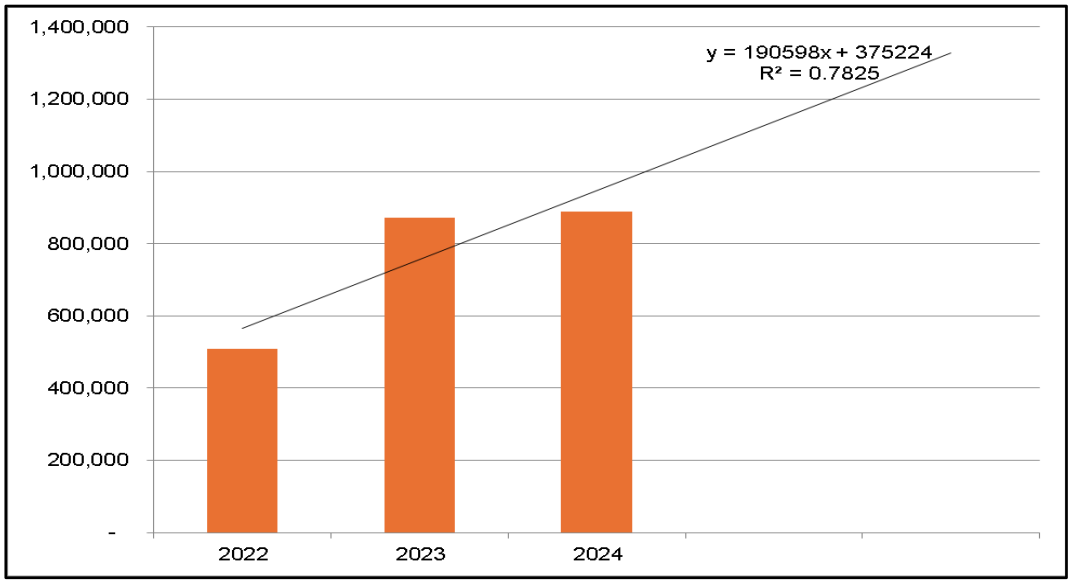
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah).

Keterangan: dihitung dari penerimaan Pajak Air Tanah, Hiburan, Hotel, Parkir, PPJ, Reklame, Restoran, PBB, BPHTB.

Jika diakumulasikan semua jenis pajak daerah di wilayah utara tersebut, pada tahun 2024 mencapai Rp. 889 Milyar. Analisa proyeksi yang dilakukan menunjukan bahwa pendapatan pajak daerah di wilayah ini akan terus meningkat, dan diprediksi mencapai Rp. 1,13 Triliun pada tahun 2025, Rp. 1,328 Triliun pada tahun 2026, dan Rp. 1,518 Triliun pada tahun 2027. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.10

Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Utara tahun 2022-2024 dan Proyeksi Tahun Berikutnya

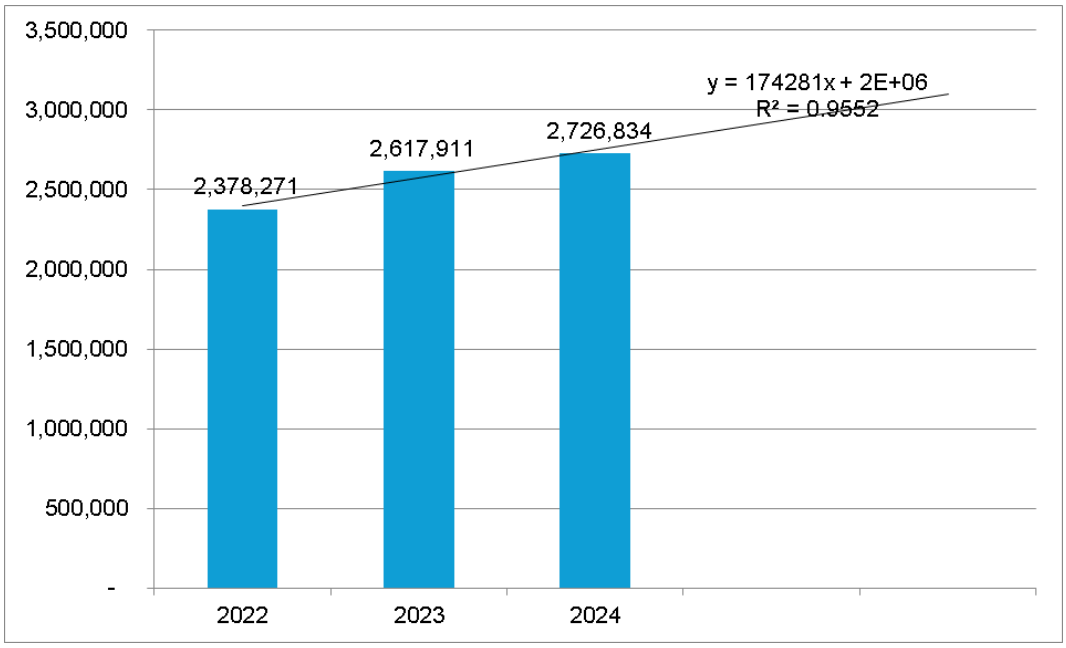


Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Secara umum, kapasitas fiskal wilayah utara saat ini menunjukkan kemampuan kuat untuk menopang pembentukan daerah otonom baru. Dengan manajemen fiskal yang baik dan penataan kelembagaan yang hati-hati, pemekaran dapat memperkuat kinerja pelayanan publik serta memperpendek jarak fiskal dan administratif antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan pemekaran akan tetap bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mengelola transisi fiskal, terutama dalam pembagian aset, sumber pajak, dan beban belanja antar wilayah baru.

Bagi daerah induk yang ditinggalkan, secara umum masih tersedia ruang fiskal yang mencukupi dan akan tetap mendapatkan pajak daerah yang signifikan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.11
Pendapatan Pajak Daerah di Wilayah Induk tahun 2022-2024 dan Proyeksi Tahun Mendatang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Pada tahun 2024, dari 16 kecamatan di wilayah Induk memperoleh pajak daerah Rp. 2,7 Triliun, dan diprediksi akan memperoleh Rp.2,69 Triliun pada tahun 2025, Rp.2,87 Triliun pada tahun 2026, dan Rp. 3,04 Triliun pada tahun 2027.

4.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

4.2.2.1 Struktur Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita riil masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi biasanya diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa melihat apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk, atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi. Meski demikian, dalam praktiknya banyak ekonom yang menggunakan kedua istilah ini secara hampir sama, yakni sekadar merujuk pada kenaikan GDP atau GNP. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah "pembangunan ekonomi" lebih sering dipakai untuk menggambarkan perkembangan perekonomian di negara-negara berkembang.

Todaro (2001:75) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup perubahan besar dalam struktur ekonomi dan sosial, pengurangan kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan, dan penanggulangan pengangguran dalam kerangka pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai bagian dari pembangunan ekonomi, di mana pertumbuhan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, data PDRB juga sering dimanfaatkan untuk berbagai tujuan lain, seperti pengembangan model ekonomi untuk perumusan kebijakan, analisis kecepatan peredaran uang *(velocity of money),* pendalaman sektor keuangan *(financial deepening),* penetapan pajak, serta kajian ekspor–impor.

Struktur ekonomi merujuk pada sektor atau lapangan usaha yang menjadi pembentuk PDRB. Struktur perekonomian diukur melalui distribusi persentase PDRB dalam tiga sektor: primer, sekunder, dan tersier. Kelompok lapangan usaha primer mencakup Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian. Kelompok sekunder meliputi Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; serta Konstruksi. Sementara itu, kelompok tersier terdiri dari Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta berbagai jenis jasa lainnya.

Struktur ekonomi Kabupaten Tangerang selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.9

Struktur Ekonomi Kabupaten Tangerang, 2022-2024

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Setiap Sektor terhadap Total PDRB (%)		
		2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.33	6.3	6.16
2	Pertambangan dan Penggalian	0.03	0.03	0.03
3	Industri Pengolahan	33.2	33.65	33.74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.08	2.82	2.18
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.06
6	Konstruksi	16.81	16.35	16.36
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.05	11.15	11.35
8	Transportasi dan Pergudangan	3.33	3.51	3.61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.46	1.49	1.56
10	Informasi dan Komunikasi	3.47	3.54	3.54
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.99	5.64	5.36
12	Real Estate	7.93	7.99	8.08
13	Jasa Perusahaan	0.98	1.02	1.06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.71	1.7	2.05
15	Jasa Pendidikan	2.52	2.54	2.66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.51	0.53	0.57
17	Jasa Lainnya	1.54	1.67	1.65
Total PDRB		100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Secara spasial, struktur ekonomi Kabupaten Tangerang juga menunjukkan perbedaan antara wilayah utara (pesisir) dan wilayah selatan. Wilayah utara cenderung didominasi oleh aktivitas industri manufaktur, logistik, serta sektor-sektor terkait kawasan pelabuhan dan pergudangan, sejalan dengan lokasinya yang dekat dengan Bandara Soekarno–Hatta dan jalur distribusi utama. Sementara itu, wilayah selatan berkembang sebagai pusat permukiman, perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata perkotaan. Perbedaan karakter ini mencerminkan dinamika pembangunan yang tidak seragam, di mana pesisir utara lebih berorientasi pada industri dan aktivitas skala besar, sedangkan bagian

selatan lebih bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, dan aktivitas ekonomi berbasis komunitas.

4.2.2.2 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk menganalisis proses pembangunan yang terjadi di suatu negara ataupun daerah. Indikator ini menunjukkan sejauhmana aktivitas ekonomi mampu menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada periode tertentu. Karena pada dasarnya kegiatan ekonomi melibatkan penggunaan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses tersebut juga menciptakan aliran balas jasa bagi pemilik faktor produksi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi diharapkan ikut meningkat (Susanti, 2006:23).

Dalam teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha), (2) pendekatan pengeluaran atau permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran), dan (3) pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan). Secara teori, ketiga pendekatan ini akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Di Kabupaten Tangerang, PDRB semua sektor mengalami pertumbuhan pada kisaran 4-5% selama beberapa tahun terakhir. Jika di *breakdown* menjadi tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, terlihat bahwa sektor sekunder memiliki laju pertumbuhan PDRB yang menurun selama beberapa tahun terakhir, sementara sektor tersier mengalami laju pertumbuhan yang terus meningkat. Sektor primer disini terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan pertambangan dan penggalian. Selanjutnya, sektor sekunder terdiri dari kategori industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, serta konstruksi. Sedangkan sektor tersier terdiri dari kategori perdagangan), transportasi dan pergudangan, (informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan real estate. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang, 2021-2024

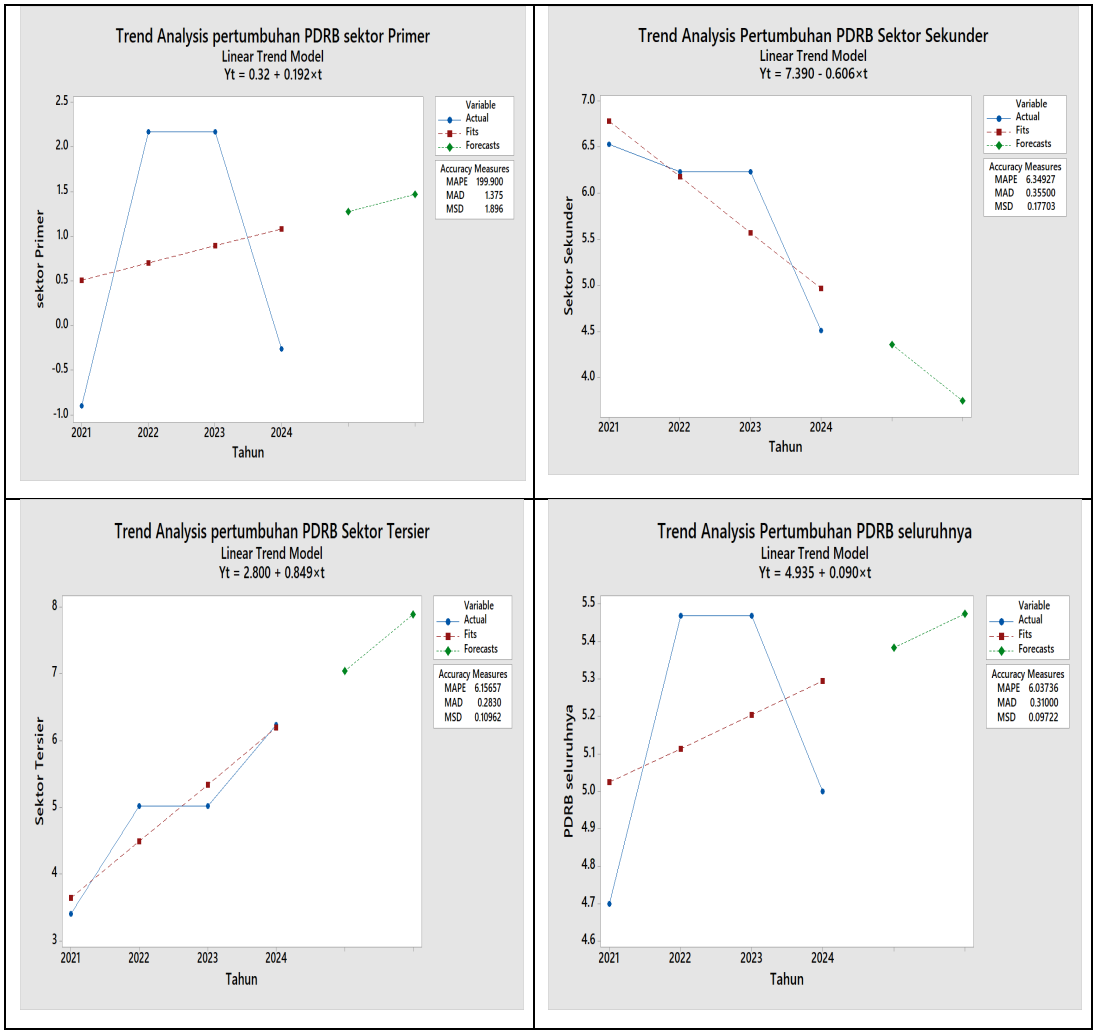
Tahun	Pertumbuhan PDRB per sektor			
	Sektor Primer	Sektor Sekunder	Sektor Tersier	PDRB semua sektor
2021	-0,9	6,53	3,41	4,7
2022	2,17	6,23	5,02	5,47
2023	2,17	6,23	5,02	5,47
2024	-0,26	4,51	6,24	5

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Projeksi pertumbuhan PDRB selama beberapa tahun ke depan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.12

Grafik Pertumbuhan PDRB tahun 2021-2024 dan Proyeksinya di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar pertumbuhan sektoral PDRB di Kabupaten Tangerang tersebut di atas menunjukkan bahwa sektor sekunder, yang selama ini menjadi tulang punggung industri dan penyerapan tenaga kerja, justru mengalami perlambatan dalam beberapa tahun terakhir. di saat yang sama, sektor tersier meningkat dan menjadi motor pertumbuhan baru. Jika Kabupaten Tangerang dimekarkan menjadi dua wilayah, misalnya Tangerang Utara dan Tangerang Selatan, maka perbedaan struktur ekonomi ini akan sangat memengaruhi arah pembangunan masing-masing daerah baru.

Pemekaran berpotensi menghasilkan dua daerah dengan karakter ekonomi berbeda. Wilayah Utara umumnya lebih banyak ditopang oleh kawasan industri,

manufaktur, logistik, dan aktivitas yang berhubungan dengan sektor sekunder. Dengan tren penurunan pertumbuhan sektor ini, wilayah Utara mungkin akan menghadapi tekanan terkait stabilitas pembangunan. Sebaliknya, wilayah Selatan lebih bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perumahan, dan aktivitas ekonomi tersier diperkirakan memiliki pertumbuhan yang lebih stabil karena sektor tersier sedang berada dalam tren positif. Perbedaan ini akan berdampak langsung pada kemampuan fiskal kedua daerah setelah pemekaran. Daerah Selatan berpeluang memperoleh pendapatan asli daerah yang lebih cepat tumbuh karena aktivitas jasa, perdagangan, dan konsumsi cenderung menghasilkan penerimaan pajak yang lebih stabil. Sebaliknya, daerah utara berbasis industri akan sangat bergantung pada strategi revitalisasi sektor sekunder. Hal ini mengisyaratkan perlunya sebuah kebijakan daerah yang spesifik, terfokus dan terukur agar dapat membalik tren penurunan yang ada menjadi kembali stabil bahkan mengalami kenaikan.

Pemekaran juga membuka peluang bagi masing-masing wilayah untuk memiliki kebijakan ekonomi yang lebih fokus. Selama ini, Kabupaten Tangerang harus mengakomodasi dua karakter ekonomi yang berbeda dalam satu wilayah besar. Jika dimekarkan, wilayah utara bisa lebih terarah dalam memperkuat daya saing industri, memperbaiki infrastruktur logistik, dan mendorong modernisasi manufaktur. Sementara itu, wilayah Selatan dapat merancang kebijakan yang lebih cocok untuk pengembangan jasa, perdagangan, dan pelayanan perkotaan.

Secara keseluruhan, pemekaran Kabupaten Tangerang dapat menghasilkan wilayah Selatan yang lebih stabil berkat pertumbuhan sektor tersier, dan wilayah Utara yang perlu berfokus dan bekerja lebih keras untuk kembali memulihkan performa sektor industrinya. Pemekaran itu sendiri tidak otomatis menjadi solusi atau masalah. Semuanya sangat bergantung pada bagaimana masing-masing daerah baru menyusun strategi ekonomi berdasarkan struktur sektoral yang mereka miliki.

Selanjutnya, data juga menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Tangerang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang perlu dicermati, terutama ketika ditinjau dari komponen pengeluaran. Data menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, sementara pengeluaran pemerintah justru mengalami penurunan. Kedua komponen ini memiliki peran strategis dalam pembentukan PDRB, sehingga perubahan-

perubahan yang terjadi memberikan gambaran tentang arah pergerakan ekonomi daerah. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.11

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang berdasarkan Konsumsi, 2011-2024

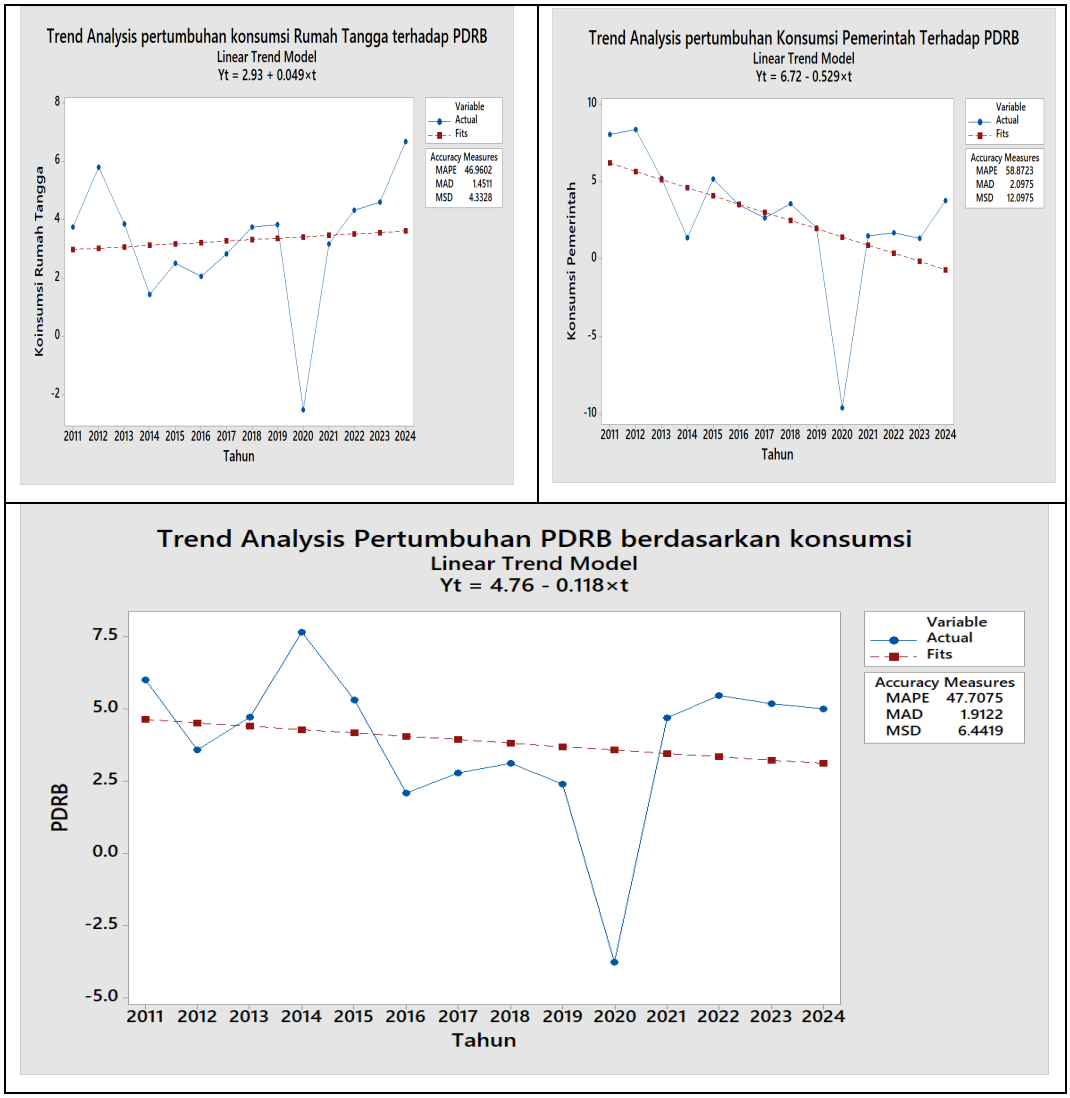
Tahun	Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga (%)	Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah (%)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)
2011	3,76	8,03	6
2012	5,8	8,35	3,59
2013	3,87	5,2	4,73
2014	1,45	1,37	7,67
2015	2,52	5,16	5,31
2016	2,07	3,5	2,09
2017	2,84	2,64	2,79
2018	3,75	3,59	3,12
2019	3,83	2	2,41
2020	-2,52	-9,6	-3,76
2021	3,18	1,49	4,7
2022	4,33	1,68	5,47
2023	4,62	1,35	5,18
2024	6,69	3,76	5

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Trend analysis yang dilakukan menghasilkan pola sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.13

Trend Analysis Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan Belanja Pemerintah di Kabupaten Tangerang, 2011-2024



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan pola yang menarik. Di satu sisi, peningkatan konsumsi rumah tangga mengindikasikan adanya perbaikan daya beli dan kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, disisi lain, turunnya pengeluaran pemerintah dapat mengurangi dorongan fiskal yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam konteks penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Analisis di atas juga menunjukkan bahwa baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan PDRB Kabupaten Tangerang. Konsumsi rumah tangga terbukti menjadi

penggerak penting aktivitas ekonomi lokal, mengingat struktur ekonomi Tangerang yang semakin bergeser menuju sektor perdagangan dan jasa. Peningkatan konsumsi masyarakat mendorong permintaan terhadap barang dan jasa, dan secara langsung mempengaruhi peningkatan produksi. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDRB, meskipun trend penerapannya dalam beberapa tahun terakhir menjadi sinyal perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah. Belanja pemerintah tetap diperlukan untuk menjaga layanan dasar, mendukung produktivitas, dan menciptakan efek pengganda dalam kegiatan ekonomi.

Hasil analisa lanjutan juga menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah secara bersama-sama hanya menjelaskan sebagian dari variasi pertumbuhan PDRB, yakni sekitar 48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh faktor pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang berasal dari variabel lain seperti investasi, ekspor-impor, kegiatan industri, maupun dinamika eksternal. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya peran belanja pemerintah yang efektif dan terarah agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara geografis dan struktural, wilayah selatan Kabupaten Tangerang yang didominasi sektor jasa dan perdagangan memiliki peluang lebih besar untuk mandiri secara fiskal. Sebaliknya, wilayah utara yang lebih bergantung pada sektor industri dan logistik harus secepatnya menata kebijakan daerah di bidang industri supaya segera bangkit. Secara keseluruhan, dinamika konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di Kabupaten Tangerang mengindikasikan bahwa pemekaran perlu ditopang oleh penguatan sektor ekonomi utama dan skema pendampingan fiskal untuk wilayah yang baru terbentuk.

4.2.3 Infrastruktur

4.2.3.1 Infrastruktur Transportasi

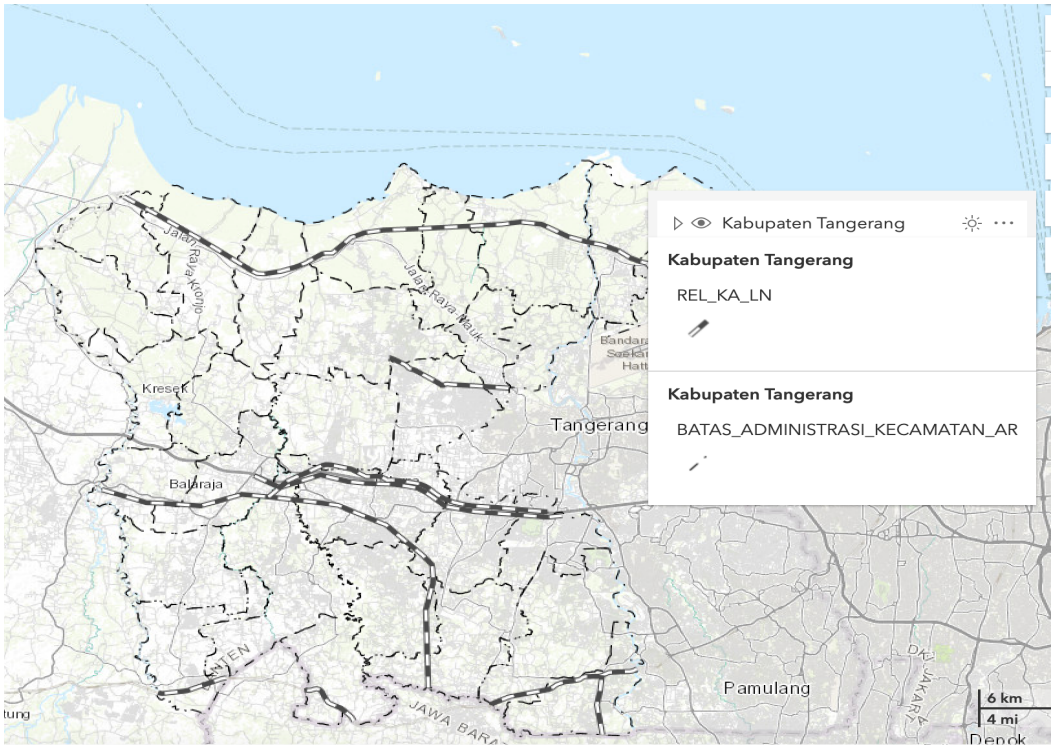
Transportasi merupakan salah satu mata rantai utama dalam jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang. Sektor ini berkembang sangat dinamis dan berperan penting dalam mendukung seluruh aspek kehidupan, termasuk pembangunan politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi mencerminkan pertumbuhan ekonomi

secara langsung, sehingga posisinya menjadi strategis baik pada level makro maupun mikro. Secara makro, keberhasilan sektor transportasi tercermin melalui kontribusi nilai tambah terhadap pembentukan PDB, adanya efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor-sektor lain, serta kemampuannya menjaga stabilitas harga dengan memperlancar distribusi barang dan jasa di seluruh wilayah. Karena itu, ketersediaan infrastruktur transportasi yang andal dan memadai menjadi kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh pemerintah daerah.

Peta sebaran jaringan transportasi di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.14

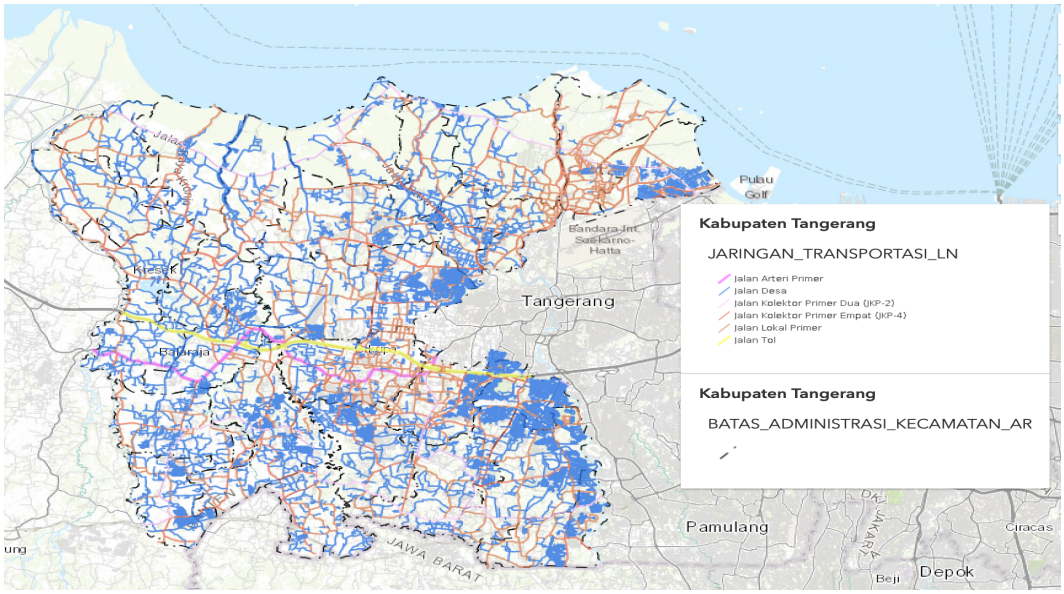
Peta Jaringan Transportasi Kereta Api di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar 4.15

Peta Jaringan Jalan di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

PDRB sektor transportasi dan pergudangan di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.12

PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan Kabupaten Tangerang, 2010-2024

Tahun	PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (Rp Miliar Rupiah)	Persentase Kontribusi Sektor terhadap PDRB (%)
2010	1371,15	2,4
2011	1516,49	2,4
2012	1655,24	2,5
2013	1757,15	2,5
2014	1920,1	2,6
2015	2085,52	2,7
2016	2267,12	2,8
2017	2461,27	2,8
2018	2697,43	2,9
2019	2955,03	3,0
2020	2797,73	3,0
2021	3074,77	3,1
2022	3317,46	3,2
2023	3511,1	3,2
2024	3723,23	3,3

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Dari data di atas terlihat bahwa kontribusi sektor transportasi dan pergudangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang cukup besar dan menunjukkan tren peningkatan. Kabupaten Tangerang memiliki jaringan infrastruktur jalan yang luas dengan kondisi sebagian besar yang baik, serta didukung oleh layanan kereta api sebagai moda transportasi massal yang memperlancar mobilitas penduduk menuju wilayah lain, terutama ke Jakarta.

Ketersediaan infrastruktur jalan dan kereta api tersebut membuat banyak masyarakat yang bekerja di Jakarta memilih tinggal di Kabupaten Tangerang. Pertimbangan utamanya adalah harga hunian dan ketersediaan lahan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan wilayah Jakarta. Kondisi ini kemudian mendorong peningkatan aktivitas di sektor real estate. Hal ini tercermin dari kenaikan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Tangerang sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 4.13

Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, 2010-2024

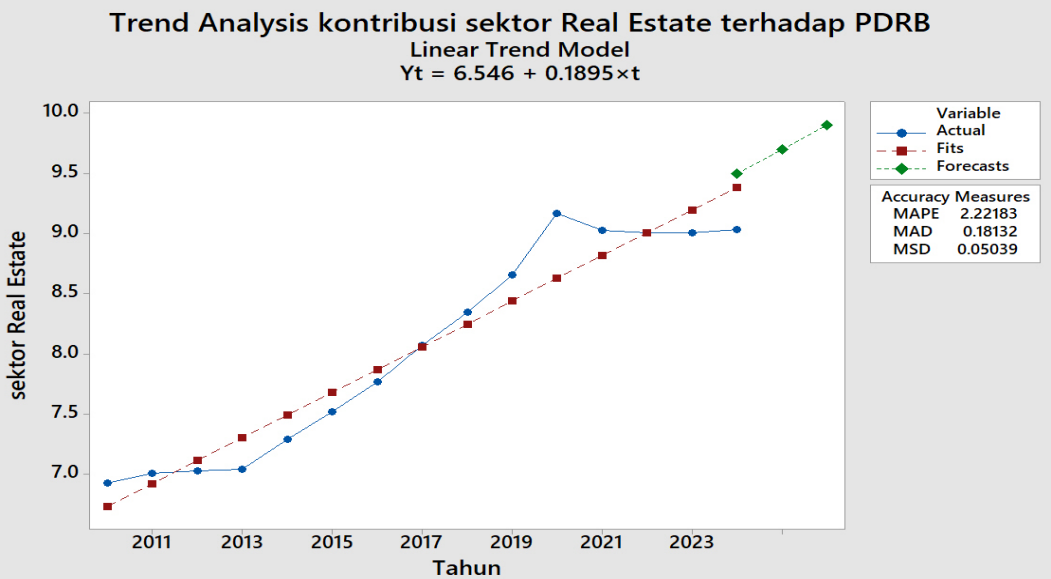
Tahun	Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB (%)
2010	6,9
2011	7,0
2012	7,0
2013	7,0
2014	7,3
2015	7,5
2016	7,8
2017	8,1
2018	8,3
2019	8,7
2020	9,2
2021	9,0
2022	9,0
2023	9,0
2024	9,0

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Jika dilakukan trend analysis, hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.16

Kontribusi Sektor Real Estate terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, 2010-2024, dan Proyeksinya



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Perkembangan kontribusi sektor real estate terhadap PDRB tidak terlepas dari kemajuan infrastruktur transportasi di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan perhitungan korelasi Spearman antara data sektor transportasi dan sektor real estate menggunakan SPSS versi 25, diperoleh nilai korelasi sebesar 0,996429. Angka ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua sektor tersebut bersifat positif, sangat erat, dan signifikan. Artinya, pertumbuhan sektor transportasi mendorong peningkatan sektor real estate di Kabupaten Tangerang. Hal ini masuk akal mengingat Kabupaten Tangerang berbatasan langsung dengan kawasan industri, termasuk wilayah Jakarta Utara.

Pertumbuhan ekonomi sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya transportasi. Ketersediaan transportasi yang memadai berkaitan erat dengan kelancaran mobilitas serta distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur transportasi yang baik tidak hanya mempermudah mobilitas, tetapi juga menarik investasi karena wilayah dengan aksesibilitas tinggi cenderung menawarkan efisiensi dan kepastian bagi pelaku usaha. Ketika kualitas jaringan transportasi meningkat, akses antar wilayah semakin mudah, dan kegiatan ekonomi pun tumbuh lebih cepat.

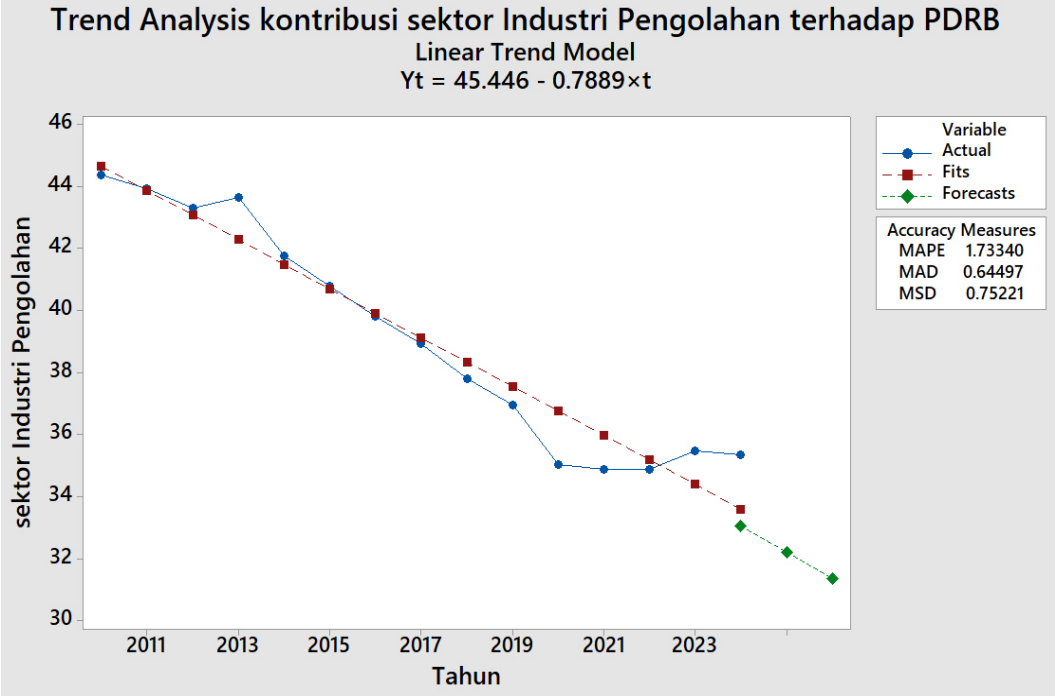
Di Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah termasuk kawasan utara telah terlayani jaringan transportasi jalan yang cukup baik. Selain itu, di sebagian wilayah lain juga tersedia jalur kereta api. Kondisi ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan utara Kabupaten Tangerang.

4.2.3.2 Infrastruktur Kawasan Industri

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.17

Trend Analysis Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tangerang



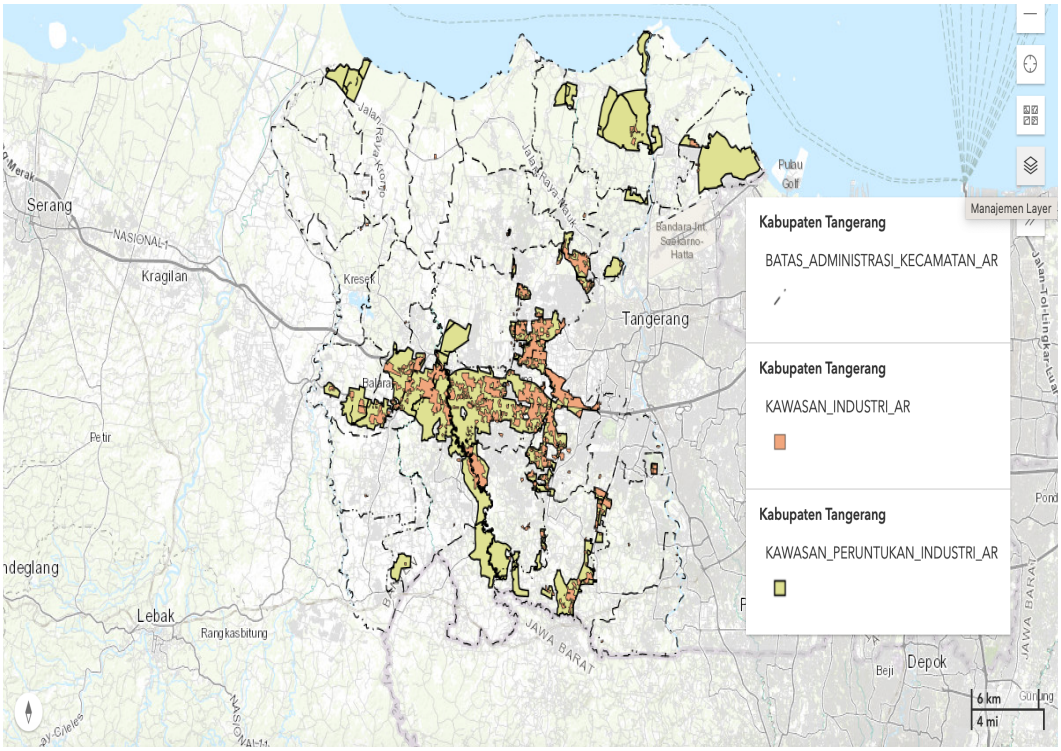
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, sektor industri pengolahan menunjukkan tren penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tangerang. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menetapkan kebijakan tata ruang yang memasukkan beberapa kawasan sebagai peruntukan industri. Namun, dari peta kawasan industri terlihat bahwa tidak semua area yang ditetapkan sebagai kawasan industri telah terisi oleh industri-industri baru. Bahkan, kawasan

peruntukan industri di wilayah utara Kabupaten Tangerang masih banyak yang belum terisi. Hal ini dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 4.18

Peta Kawasan Industri di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Peluang pengembangan industri perlu didukung dengan kebijakan tambahan, terutama berupa kemudahan regulasi perizinan. Pemberian insentif bagi pengembangan kawasan industri dapat mendorong peningkatan investasi, khususnya di wilayah utara Kabupaten Tangerang. Kawasan peruntukan industri di wilayah utara meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, serta sebagian kecil wilayah Kecamatan Pakuhaji. Kecamatan Kosambi dan Teluknaga yang berbatasan langsung dengan kawasan industri di Jakarta Utara turut merasakan dampak perkembangan industri di wilayah tersebut. Ke depan, ketika kawasan industri di Jakarta Utara mulai stagnan akibat keterbatasan lahan, wilayah utara Kabupaten Tangerang memiliki peluang besar untuk menjadi lokasi pengembangan industri sebagai limpahan dari Jakarta Utara.

Peluang ini akan semakin optimal apabila dapat dimanfaatkan dengan baik oleh wilayah utara Kabupaten Tangerang. Bahkan, pertumbuhan sektor industri

berpotensi meningkat lebih cepat jika kawasan utara Kabupaten Tangerang menjadi daerah otonomi baru, karena adanya fleksibilitas dalam penyusunan regulasi dan kemudahan investasi oleh pemerintah daerah yang baru.

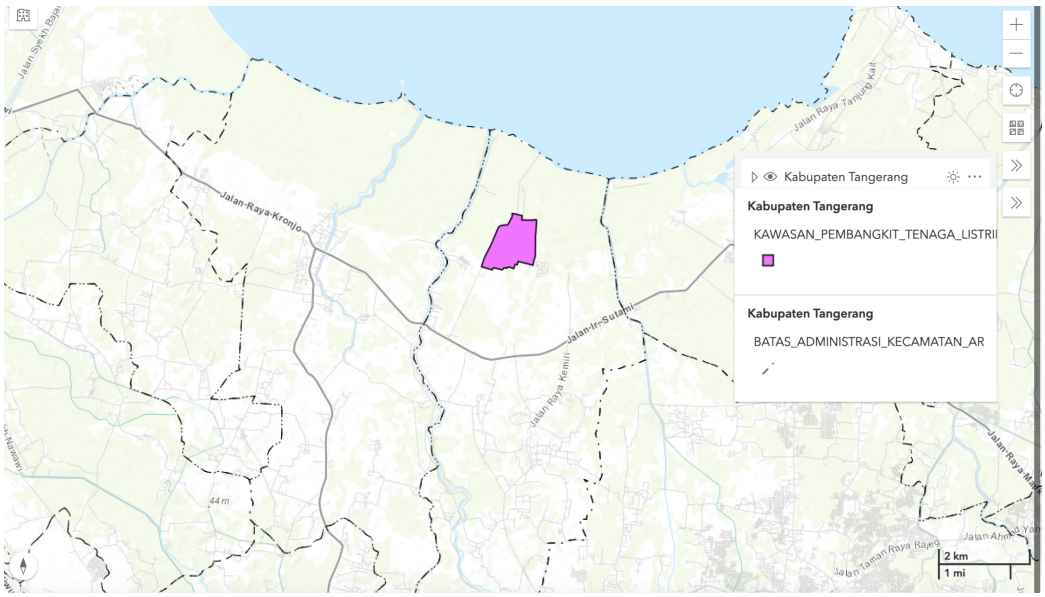
Sepanjang disertai dengan kebijakan daerah yang terfokus dan terarah, pemekaran wilayah di bagian utara Kabupaten Tangerang berpotensi mempercepat pengembangan kawasan industri yang saat ini belum optimal terisi, karena daerah otonomi baru akan memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menetapkan regulasi, memberi insentif investasi, dan mempercepat proses perizinan. Dengan stagnasinya kawasan industri di Jakarta Utara dan tersedianya lahan luas di Kecamatan Kosambi, Teluknaga, Kronjo, dan sebagian Pakuhaji, pemekaran dapat meningkatkan daya tarik investasi melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku industri. Pada akhirnya, pemekaran dapat menjadi katalis untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB wilayah baru, sekaligus mengoreksi tren penurunan kontribusi industri pada Kabupaten Tangerang secara keseluruhan.

4.2.3.3 Infrastruktur Energi

Industrialisasi berkembang pesat apabila didukung oleh infrastruktur energi, khususnya listrik. Hal ini karena ketersediaan pasokan listrik sangat menentukan keputusan investasi sektor industri. Tanpa energi listrik, industrialisasi mustahil untuk tumbuh. Berdasarkan peta lokasi pembangkit listrik, terlihat bahwa pembangkit listrik di Kabupaten Tangerang berpusat di wilayah utara, terutama di Kecamatan Mauk, baik yang dimiliki oleh PLN maupun perusahaan pembangkit listrik swasta. Hal ini dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 4.19

Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik di Kabupaten Tangerang



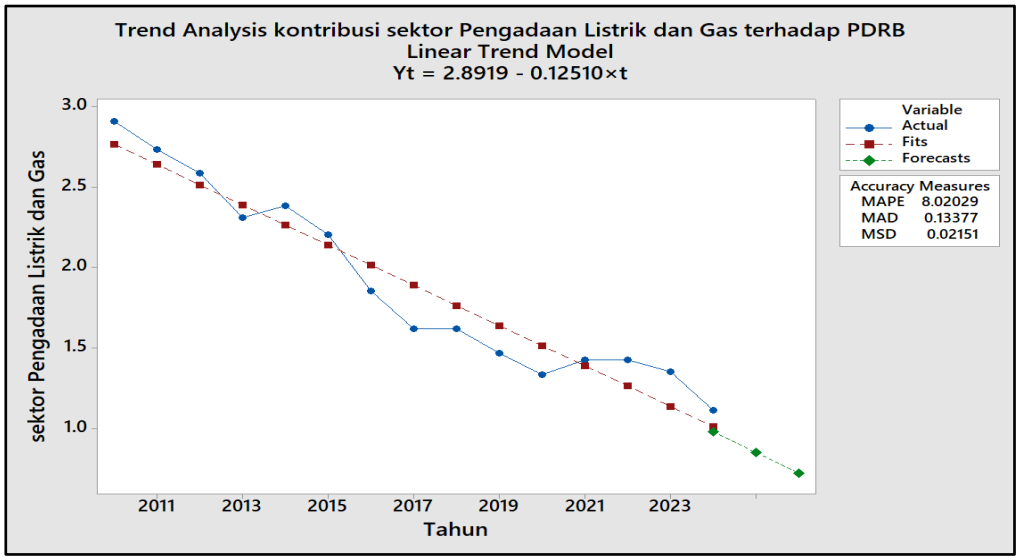
Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Keberadaan infrastruktur energi sebagaimana diuraikan di atas mendorong potensi berkembangnya industri-industri baru di wilayah tersebut. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan nilai 0,962 yang menandakan hubungan yang sangat signifikan antara ketersediaan listrik dan perkembangan sektor industri.

Selanjutnya, untuk mengukur seberapa besar kontribusi sektor listrik dan gas terhadap sektor industri pengolahan, digunakan regresi linier sederhana. Persamaan regresinya adalah: Industri Pengolahan = 27,715 + 6,039 (Pengadaan Listrik dan Gas). Pada saat yang sama, Sektor pengadaan listrik dan gas juga berkontribusi kepada pertumbuhan PDRB, meskipun terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.20

Trend Analisis Kontribusi Sektor Pengadaan Listrik dan Gas terhadap PDRB di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Artinya, sektor industri pengolahan memiliki hubungan positif dan sangat kuat dengan sektor listrik dan gas, di mana peningkatan sektor industri pengolahan akan diikuti oleh kenaikan sektor listrik dan gas sebesar 6,039 poin. Dengan kata lain, penguatan sektor industri secara otomatis akan meningkatkan pemanfaatan infrastruktur energi yang sudah tersedia, sehingga sinergi antar-sektor dapat terbentuk dan menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian daerah. Sektor manufaktur atau industri pengolahan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang. Data tahun 2011–2024 menunjukkan bahwa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDRB cukup signifikan, namun keduanya juga mengalami penurunan secara bersamaan (lihat grafik di atas). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong kembali pertumbuhan sektor industri agar infrastruktur listrik dan gas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan ekonomi wilayah utara Kabupaten Tangerang.

Dengan infrastruktur energi yang relatif lengkap, korelasi kuat antara listrik dan pertumbuhan industri, serta ketersediaan lahan yang masih luas, wilayah utara memiliki dasar ekonomi yang cukup untuk dikembangkan sebagai daerah otonomi baru. Pemekaran dapat memberikan keleluasaan regulasi bagi pemerintah daerah baru untuk mengarahkan investasi, mempercepat perizinan, dan memaksimalkan

pemanfaatan pembangkit listrik yang sudah beroperasi. Dengan demikian, pemekaran bukan hanya isu administratif, tetapi juga strategi percepatan pembangunan ekonomi berbasis industri di wilayah utara Kabupaten Tangerang

4.2.3.4 Infrastruktur Kelembagaan Ekonomi

Keterkaitan antara industri dengan kelembagaan ekonomi masyarakat sangat erat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam industri melalui berbagai kelembagaan ekonomi, seperti koperasi. Dalam PDRB, koperasi masuk ke dalam sektor Jasa Keuangan. Jumlah koperasi juga terus meningkat, termasuk di wilayah utara Kabupaten Tangerang, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.14
Jumlah Koperasi di Kabupaten Tangerang, 2021-2023

Kecamatan	Tahun		
	2021	2022	2023
Cisoka	7	5	37
Solear	14	12	10
Tigaraksa	47	36	103
Jambe	5	7	34
Cikupa	100	84	33
Panongan	21	15	14
Curug	47	46	24
Kelapa Dua	86	63	30
Legok	30	22	12
Pagedangan	36	20	10
Cisauk	27	22	5
Pasar Kemis	65	52	32
Sindang Jaya	7	2	2
Balaraja	42	25	103
Jayanti	15	8	23
Suka Mulya	10	8	8
Kresek	9	7	2
Gunung Kaler	7	7	2
Kronjo	10	7	10
Mekar Baru	2	2	20
Mauk	11	8	8
Kemiri	7	6	5
Sukadiri	7	5	7
Rajeg	26	18	15
Sepatan	26	23	15
Sepatan Timur	6	3	3
Pakuhaji	10	10	3
Teluknaga	34	29	17

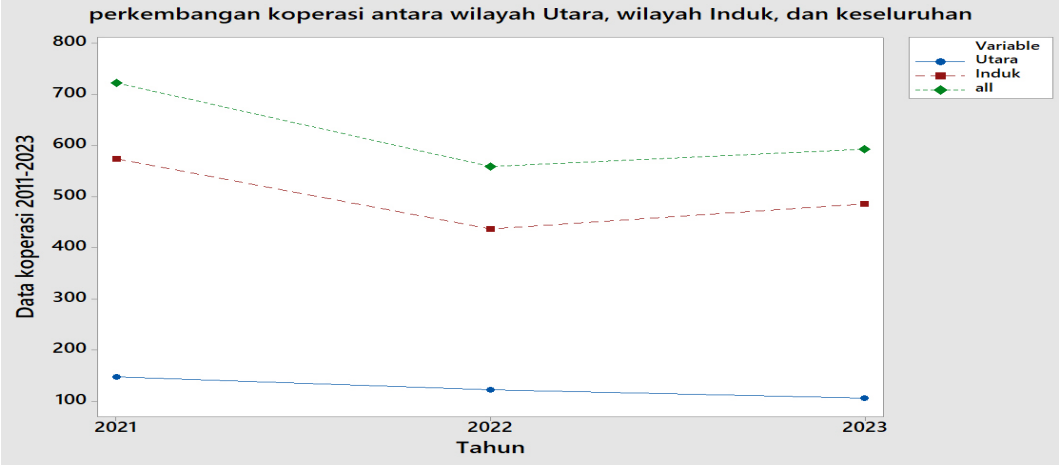
Kecamatan	Tahun		
	2021	2022	2023
Kosambi	9	8	7
Kabupaten Tangerang	723	560	594

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Jika dikelompokan menjadi wilayah utara dan wilayah induk, grafik perkembangannya dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.21

Perkembangan Koperasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

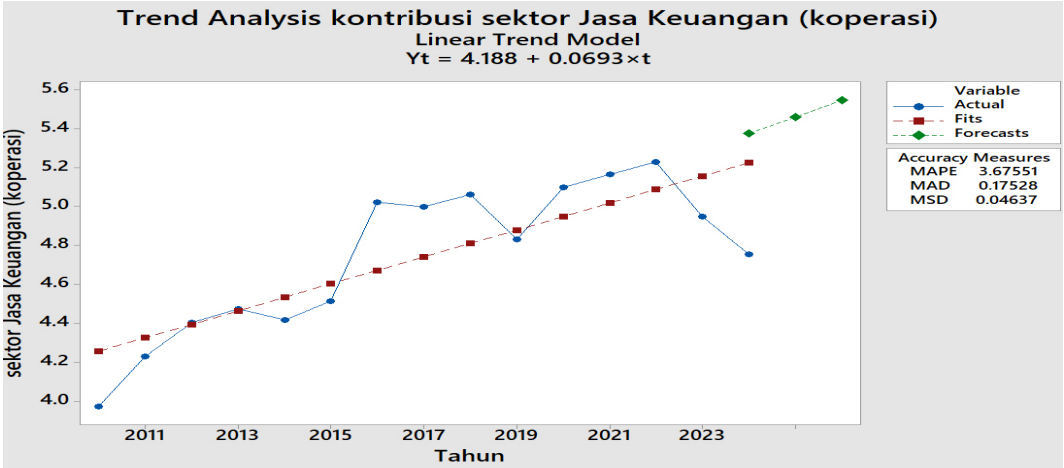
Gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah koperasi yang terus mengalami kenaikan di Kabupaten Tangerang. namun, jika dipisahkan menjadi dua wilayah, kenaikan terbesar dialami di wilayah induk. Di wilayah utara, jumlah koperasi mengalami penurunan sedikit selama tiga tahun terakhir. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pelaku ekonomi setempat, karena bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi lokal. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah-langkah khusus untuk mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi di wilayah utara, agar potensi ekonomi masyarakat di sana bisa lebih maksimal. Perbedaan tren antara wilayah induk dan utara juga menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Di Kabupaten Tangerang, kontribusi sektor keuangan, termasuk koperasi, mengalami peningkatan dari tahun 2011–2024 terhadap PDRB Kabupaten Tangerang. Sebagai soko guru perekonomian Indonesia, koperasi memberikan

kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 4.22

Trend Analisis Kontribusi Sektor Jasa Keuangan terhadap PDRB Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Kelembagaan koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah. Koperasi termasuk ke dalam sektor Jasa Keuangan dalam PDRB, dan bergerak di berbagai sektor sesuai jenisnya. Semakin beragam jenis koperasi, semakin beragam pula aktivitas perekonomian suatu daerah. Hal ini menekankan bahwa koperasi bukan hanya sekadar lembaga keuangan, tetapi juga wadah yang mampu menggerakkan berbagai aktivitas ekonomi lokal di Kabupaten Tangerang. Keberagaman jenis koperasi memungkinkan setiap daerah menyesuaikan jenis usahanya dengan kebutuhan masyarakat dan potensi sumber daya yang ada.

Pertumbuhan koperasi di wilayah utara Kabupaten Tangerang dan wilayah lainnya bukan sekadar angka statistik, tetapi menjadi modal sosial dan ekonomi yang sangat strategis. Hal ini menjadi salah satu modal penting untuk mendorong kemajuan pembangunan di masa mendatang.

4.2.4 Kesenjangan Regional

Secara regional, kesenjangan dapat dianalisa dari perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perbedaan nilai indeks gini.. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan capaian pembangunan ekonomi dan sosial

masing-masing daerah, termasuk posisi Kabupaten Tangerang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Banten menunjukkan tren melambat selama tiga tahun terakhir, dari 6,15 persen pada 2022 menjadi 5,03 persen pada 2023, dan kembali turun menjadi 4,81 persen pada 2024. Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang masih menjadi penyumbang pertumbuhan yang relatif stabil dengan laju sekitar 5 persen. Sebaliknya, Pandeglang dan Lebak mencatat pertumbuhan paling rendah, yakni di bawah 3 persen, yang mengindikasikan adanya kesenjangan perkembangan ekonomi antarwilayah di Banten. Pertumbuhan ekonomi regional di seputar Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.15

Pertumbuhan Ekonomi Regional di sekitar Kabupaten Tangerang, 2022-2024

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
1	Pandeglang	3,47	2,53	2,75
2	Lebak	3,8	2,80	2,95
3	Tangerang	5,47	5,18	5,00
4	Serang	5,03	4,80	4,78
5	Kota Tangerang	5,98	5,57	5,04
6	Kota Cilegon	4,51	4,82	4,84
7	Kota Serang	4,71	4,74	4,71
8	Kota Tangerang Selatan	5,81	5,36	5,02
	Provinsi Banten	6,15	5,03	4,81

Sumber: BPS Kabupaten tangerang (2025)

Kontribusi terhadap PDRB Banten juga menunjukkan ketimpangan yang cukup besar. Kota Tangerang menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 25 persen, diikuti Kabupaten Tangerang 21 persen, dan Kota Cilegon 16 persen. Sementara itu, Pandeglang dan Lebak hanya menyumbang sekitar 4 persen masing-masing. Pola ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi di Banten masih sangat terkonsentrasi di wilayah perkotaan yang lebih maju dan berorientasi industri seperti Tangerang Raya dan Cilegon, yang memiliki keunggulan infrastruktur dan basis industri yang kuat.

Selanjutnya, jika dilihat dari nilai indeks gininya, kabupaten Tangerang memiliki tingkat ketimpangan yang menengah. Artinya, ketimpangan yang ada di

kabupaten ini tidak sekecil Kabupaten pandeglang, namun juga tidak sebesar di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.16

Indeks Gini Kabupaten Kota di Provinsi Banten, 2011-2021

Tahun	Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Lebak	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Serang	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kota Tangerang Selatan	Provinsi Banten
2011	0,29	0,35	0,39	0,33	0,31	0,35	0,38	0,41	0,4
2012	0,3	0,34	0,32	0,34	0,32	0,38	0,37	0,44	0,4
2013	0,29	0,31	0,34	0,33	0,39	0,39	0,37	0,38	0,4
2014	0,31	0,27	0,38	0,31	0,37	0,45	0,36	0,38	0,4
2015	0,32	0,28	0,35	0,33	0,37	0,39	0,38	0,44	0,4
2016	0,29	0,31	0,32	0,31	0,38	0,38	0,4	0,41	0,39
2017	0,28	0,27	0,33	0,29	0,34	0,34	0,36	0,36	0,38
2018	0,32	0,3	0,34	0,28	0,33	0,35	0,35	0,38	0,39
2019	0,31	0,3	0,33	0,31	0,33	0,32	0,34	0,33	0,37
2020	0,31	0,31	0,29	0,3	0,34	0,37	0,35	0,37	0,36
2021	0,27	0,33	0,29	0,26	0,34	0,36	0,34	0,37	0,37
2022	0,3	0,31	0,28	0,28	0,38	0,32	0,35	0,36	0,36
2023	0,24	0,27	0,29	0,27	0,38	0,36	0,31	0,36	0,37
2024	0,24	0,26	0,27	0,27	0,33	0,36	0,32	0,4	0,35

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Di dalam Kabupaten Tangerang sendiri, kesenjangan antarwilayah juga masih terlihat jelas, terutama antara kawasan utara (pesisir/industri), tengah (kawasan penyangga perkotaan), dan selatan (permukiman dan jasa). Wilayah utara yang berbatasan dengan pusat aktivitas ekonomi nasional cenderung berkembang lebih cepat berkat keberadaan kawasan industri, logistik, dan akses infrastruktur yang lebih kuat. Sementara itu, wilayah selatan berkembang pesat dalam sektor jasa dan permukiman, tetapi masih menghadapi tantangan pemerataan layanan dasar, transportasi, serta akses ekonomi bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, desa-desa di bagian barat dan tenggara umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih bergantung pada sektor informal dan usaha berskala

kecil. Perbedaan kapasitas ekonomi antarwilayah ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Tangerang merupakan salah satu motor pertumbuhan di Banten, pemerataan pembangunan belum sepenuhnya tercapai dan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama pada peningkatan akses pendidikan, infrastruktur wilayah, serta penguatan ekonomi lokal.

Melihat ketimpangan kontribusi ekonomi, perbedaan struktur sektor unggulan, serta variasi kapasitas pembangunan antar wilayah, wacana pemekaran Kabupaten Tangerang antara wilayah utara dan selatan memiliki implikasi strategis yang signifikan. Pemekaran dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan, karena masing-masing wilayah dapat merumuskan prioritas pembangunan yang lebih fokus: wilayah utara dapat mengoptimalkan potensinya sebagai kawasan industri, logistik, dan pesisir, sementara wilayah selatan dapat menguatkan pengembangan jasa, permukiman, dan sektor ekonomi berbasis komunitas. Di sisi lain, pemekaran juga menuntut kesiapan kelembagaan, kapasitas fiskal, dan infrastruktur dasar yang memadai agar tidak justru menambah beban administratif. Dengan demikian, pemekaran hanya akan efektif jika dirancang untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memperkuat tata kelola daerah, bukan sekadar menciptakan entitas pemerintahan baru tanpa dukungan kapasitas yang cukup.

4.3 Analisis Sosial dan Budaya

4.3.1 Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu daerah atau wilayah. IPM memberikan gambaran mengenai kualitas hidup penduduk, yang mencerminkan sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. IPM di Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.17

IPM Kabupaten Tangerang, 2005-2024

Tahun	Skor IPM
2005	69,8
2006	70,04
2007	70,71

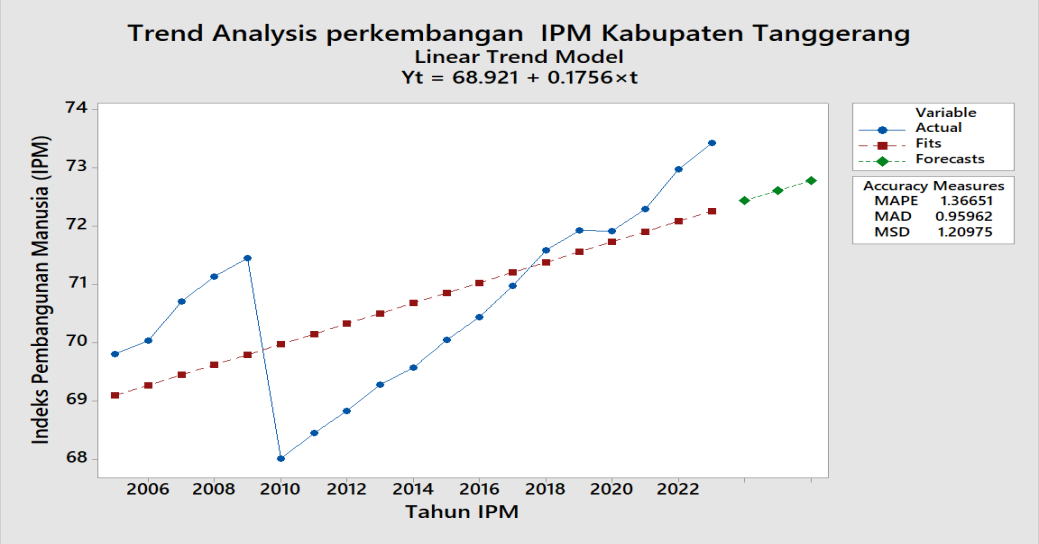
Tahun	Skor IPM
2008	71,14
2009	71,45
2010	68,01
2011	68,45
2012	68,83
2013	69,28
2014	69,57
2015	70,05
2016	70,44
2017	70,97
2018	71,59
2019	71,93
2020	71,92
2021	72,29
2022	72,97
2023	73,43

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Jika dilakukan trend analisis, terlihat bahwa IPM Kabupaten Tangerang akan terus naik secara stabil dalam beberapa tahun kedepan, sebagaimana grafik berikut.

Gambar 4.23

Trend Analisis IPM Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Kenaikan IPM Kabupaten Tangerang dari tahun 2005 hingga 2023 yang menunjukkan tren meningkat secara konsisten memberikan implikasi penting terhadap rencana pemekaran wilayah, khususnya pembentukan daerah otonom baru. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup ini menunjukkan kapasitas penduduk yang semakin baik sehingga dapat menjadi modal manusia yang kuat bagi wilayah hasil pemekaran. Dengan IPM yang terus membaik, daerah baru diharapkan mampu mengelola pembangunan secara lebih mandiri, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, peningkatan IPM juga menandakan adanya perbaikan layanan publik yang dapat memperkuat argumen bahwa pemekaran bukan hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di wilayah Tangerang Utara. Namun demikian, tren positif ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang memastikan bahwa kualitas SDM tetap meningkat merata di seluruh kecamatan, sehingga pemekaran benar-benar menghasilkan manfaat nyata dan tidak menciptakan kesenjangan baru antarwilayah.

Selanjutnya, tingkat melek aksara juga merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia. Secara umum, tingkat melek aksara di Kabupaten Tangerang menunjukkan peningkatan di hampir semua kelompok usia. Penduduk laki-laki memiliki tingkat melek aksara yang tinggi, terutama pada kelompok usia 15–24 tahun dan 15–59 tahun, dengan angka yang mendekati atau bahkan mencapai 100 persen. Namun, pada kelompok usia 60 tahun ke atas, tingkat melek aksara masih relatif lebih rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 92,36 persen pada tahun 2023 menjadi 94,69 persen pada tahun 2024.

Pola serupa juga terlihat pada penduduk perempuan. Kelompok usia muda menunjukkan tingkat melek aksara yang tinggi, sementara kelompok usia 60 tahun ke atas mengalami peningkatan cukup signifikan, dari 73,79 persen pada tahun 2023 menjadi 81,49 persen pada tahun 2024.

Secara rata-rata, angka partisipasi sekolah di Kabupaten Tangerang masih menunjukkan capaian yang cukup baik. Angka partisipasi pada jenjang sekolah dasar (SD) menjadi yang tertinggi, yaitu sebesar 95,61 persen, disusul oleh sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 89,93 persen, dan sekolah menengah

atas (SMA) sebesar 63,52 persen. Capaian ini mencerminkan kemampuan sistem pendidikan dalam mengelola dan meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas bagi seluruh penduduk.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia sudah relatif baik. Dalam konteks pemekaran wilayah, hal tersebut menjadi modal penting karena pembentukan daerah otonom baru membutuhkan aparatur, tenaga pendidik, dan masyarakat yang memiliki tingkat literasi memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Dengan kualitas pendidikan yang relatif baik, daerah yang baru memiliki potensi untuk berkembang secara mandiri dan mampu melanjutkan fungsi administrasi, ekonomi, dan sosial tanpa ketergantungan berlebihan pada wilayah induk.

4.3.2 Pendidikan

Tingkat pendidikan di Kabupaten Tangerang tergolong baik dan umumnya berada pada level yang sama atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini dapat dilihat dari data angka partisipasi sekolah berdasarkan kelompok umur sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.18

Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Tangerang, 2023

Angka Partisipasi Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
7-12 tahun	99,2	99,59	99,39
13-15 tahun	95,74	100	97,49
16-18 tahun	66,84	72,6	69,94
19-23 tahun	22,95	23,92	23,4

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.19

Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tangerang, 2023

Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD	97,24	93,96	95,61
SMP	86,23	95,22	89,93
SMA	62,53	64,36	63,52
PT	19,87	21,85	20,79

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Jika dilihat dari data di atas, partisipasi pendidikan pada kelompok usia 19–23 tahun atau jenjang perguruan tinggi masih relatif rendah. Partisipasi tertinggi justru berada pada jenjang SD dan SMP, mencerminkan keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu perhatian lebih terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi, mengingat pentingnya pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tangerang. Pendidikan tinggi menjadi tahap penting bagi individu untuk memperdalam pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperluas peluang mencapai tujuan serta cita-cita mereka.

4.3.3 Kesehatan

Ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Kabupaten Tangerang secara umum cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.20

Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis di Kabupaten Tangerang

No	Data	Kab. Tangerang	Wilayah Induk	Wilayah Utara
1	Jumlah fasilitas kesehatan	71	50	21
2	Jumlah tenaga medis	5.753	4.581	1.172

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Jika dilihat berdasarkan jumlah kecamatan, wilayah induk yang terdiri dari 16 kecamatan memiliki 50 fasilitas kesehatan dan 4.581 tenaga medis, sedangkan wilayah utara dengan 13 kecamatan memiliki 21 fasilitas kesehatan dan 1.172 tenaga medis. Secara nominal, jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan di wilayah utara memang lebih kecil dibandingkan wilayah induk, namun perbedaan tersebut

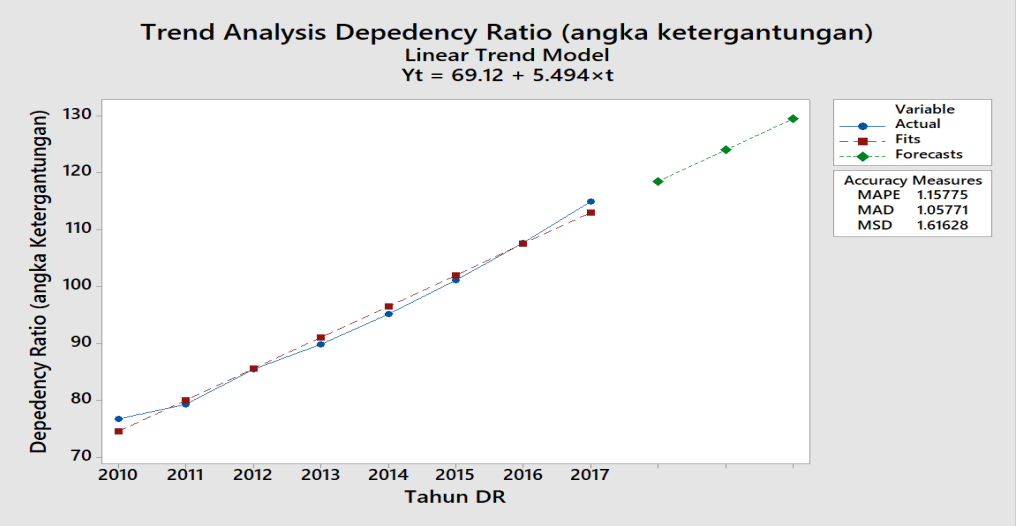
masih sejalan dengan jumlah kecamatannya. Rata-rata, wilayah induk memiliki sekitar 3,1 fasilitas kesehatan per kecamatan, sedangkan wilayah utara sekitar 1,6 fasilitas kesehatan per kecamatan, yang menunjukkan bahwa wilayah utara masih memiliki rasio fasilitas kesehatan yang lebih rendah. Hal serupa tampak pada tenaga medis: wilayah induk memiliki rata-rata 286 tenaga medis per kecamatan, sedangkan wilayah utara 90 tenaga medis per kecamatan. Perbandingan ini menegaskan bahwa meskipun kedua wilayah memiliki jumlah kecamatan yang tidak jauh berbeda, rasio tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di wilayah utara masih tertinggal sehingga perlu peningkatan untuk mencapai pemerataan layanan yang lebih baik.

4.3.4 Ketenagakerjaan

Dependency ratio (DR) atau rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu mereka yang berusia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kelompok penduduk produktif menanggung beban ekonomi dari kelompok yang tidak produktif. Di Kabupaten Tangerang, *Dependency Ratio c*enderung mengalami kenaikan dengan trend sebagaimana grafik berikut.

Gambar 4.24

Trend Analisis *Dependency Ratio* di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Beban tanggungan yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena sebagian pendapatan penduduk usia produktif harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kelompok usia non-produktif. Kondisi ini mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan investasi dan menabung (*saving*), yang pada akhirnya berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan *dependency ratio* di Kabupaten Tangerang, disertai tingkat partisipasi angkatan kerja yang relatif stabil namun belum menunjukkan peningkatan signifikan, memiliki implikasi penting terhadap rencana pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Tangerang Utara dan Kabupaten Tangerang Selatan. Beban tanggungan yang terus meningkat menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di kedua wilayah potensial pemekaran akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar dalam beberapa tahun ke depan. Dalam konteks pemekaran, wilayah dengan *dependency ratio* lebih tinggi yang umumnya memiliki penduduk usia muda atau lansia lebih banyak akan membutuhkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemekaran harus mempertimbangkan kesiapan fiskal dan kapasitas ekonomi masing-masing wilayah agar tidak memperburuk ketimpangan. Kabupaten Tangerang Utara sebagai wilayah baru perlu memastikan ketersediaan lapangan kerja, investasi, dan infrastruktur ekonomi yang memadai untuk menurunkan beban tanggungan, sementara wilayah selatan yang lebih maju secara ekonomi harus mampu menjaga keberlanjutan pengembangan industri dan tenaga kerja. Dengan demikian, pemekaran hanya akan efektif bila disertai strategi penguatan produktivitas penduduk dan pemerataan kesempatan kerja di kedua wilayah.

Selanjutnya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur persentase penduduk berusia 16 tahun ke atas yang terlibat dalam pasar tenaga kerja, baik mereka yang bekerja maupun yang menganggur tetapi sedang aktif mencari pekerjaan. TPAK merupakan salah satu indikator ekonomi yang paling sering dirujuk. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tangerang relatif stabil. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.21

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang (dalam Persen)

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023	2024
- Laki-Laki	83,95	82,90	81,00	83,06	85,07	84,29
- Perempuan	47,23	47,14	46,08	50,33	47,98	46,78
Kab.Tangerang	66,07	65,43	63,94	67,05	66,87	65,88

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Di Indonesia, rata-rata TPAK mencapai 65,76 persen pada periode 1990–2023, dengan tingkat tertinggi 69,32 persen pada tahun 2019 dan terendah 57,14 persen pada tahun 1991. Berdasarkan data tersebut, TPAK Kabupaten Tangerang berada pada level yang setara dengan TPAK nasional, dan juga sejalan dengan TPAK Provinsi Banten, yaitu 64,48% (2020), 63,79% (2021), 64,72% (2022), dan 64,44% (2023). Dengan demikian, TPAK Kabupaten Tangerang masih berada di atas rata-rata TPAK Provinsi Banten.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh laki-laki dan terus mengalami peningkatan. Untuk wilayah Tangerang Utara yang memiliki garis pantai, banyak tenaga kerja bergerak di sektor perikanan. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah nelayan di kecamatan-kecamatan pesisir masih relatif sedikit. Padahal, sektor perikanan tangkap memiliki potensi yang sangat besar jika didukung oleh teknologi penangkapan ikan yang memadai. Selain itu, wilayah pesisir Tangerang Utara juga berpotensi untuk pengembangan perikanan budidaya, seperti tambak. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.22

Jumlah Nelayan Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Nelayan
1	Kemiri	Lontar	116
		Klebet	
		Karang Anyar	
		Kemiri	
2	Mekarbaru	Gandaria	117
		Kosambi dalem	
		Jenggot	
		Waliwis	
		Klutuk	

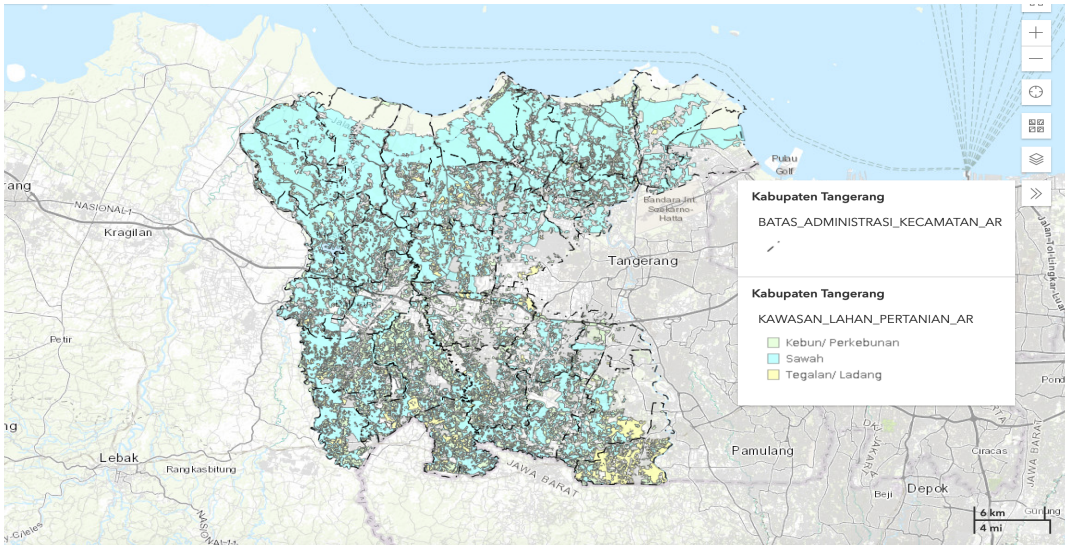
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Nelayan
3	Kosambi	Kelurahan Kosambi barat	265
		Kelurahan Dadap	
		Cengklong	
4	Mauk	Ketapang	593
		Marga mulya	
		Tanjung kait	
		Mauk barat	
5	Kronjo	Kronjo	598
		Pagedangan ilir	
		Pagedangan udik	
		Blukbuk	
		Bakung	
		Pagenjahan	
		Pasilan	
6	Pakuhaji	Pakuhaji	1183
		Surya Bahari	
		Kohod	
		Tanjung Burung	
		Pasar Kemis	
7	Sukadiri	Karang Tengah	875
		Karang Serang	
		Sukadiri	
		Pekayon	
8	Teluknaga	Tanjung Burung	523
		Tanjung Pasir	
		Muara	
Total			**4270**

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Selanjutnya, peta penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi pertanian dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 4.25

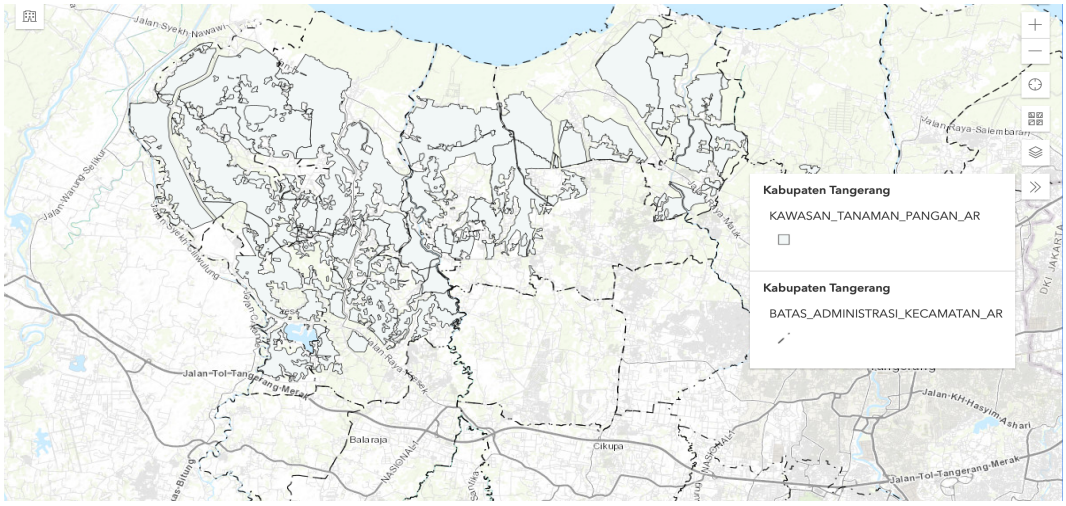
Kawasan Lahan Pertanian di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar 4.26

Kawasan Lahan Tanaman Pangan di kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, lahan yang digunakan untuk tambak mayoritas masih tergolong kurang memadai. Karena itu, diperlukan upaya perbaikan, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung oleh pemerintah, agar potensi tambak di wilayah Tangerang bagian Utara dapat meningkat dan menjadi salah satu sektor andalan daerah tersebut. Sementara itu, hanya sebagian kecil penduduk Kabupaten Tangerang yang bekerja sebagai nelayan; sebagian besar lainnya bergerak di sektor pertanian pangan.

Jika dilihat dari data di atas, jumlah nelayan sangat sedikit dibandingkan dengan luasnya kawasan pertanian pangan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah utara Kabupaten Tangerang lebih banyak bekerja di sektor pertanian tanaman pangan, terutama komoditas beras dan sayuran. Peluang penciptaan lapangan kerja, baik di sektor pertanian maupun sektor lainnya di wilayah utara Kabupaten Tangerang, masih sangat terbuka. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tangerang terus mengalami penurunan. Struktur ekonomi Kabupaten Tangerang menunjukkan pergeseran dari sektor agraris menuju sektor jasa dan industri, yang kontribusinya terus meningkat dari tahun ke tahun.

4.3.5 Tingkat Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), yang dimaksud dengan pengangguran terbuka adalah orang yang termasuk dalam salah satu kategori berikut: (1) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, (2) tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan suatu usaha, (3) tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, atau (4) sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran terbuka apabila ia tidak bekerja dan berada dalam situasi mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau belum mulai bekerja meskipun sudah memiliki pekerjaan. Pengangguran terbuka pada dasarnya merupakan bagian dari angkatan kerja yang belum bekerja.

Di Kabupaten Tangerang, tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan umumnya bukan pencari nafkah utama, meskipun tetap dapat bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten maupun secara nasional, Kabupaten Tangerang memang memiliki angka yang lebih tinggi, namun menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.23

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan Nasional

Wilayah	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tangerang	8,92	13,06	9,06	7,88	6,94	6,06
Banten	8,11	10,64	8,98	8,09	7,52	6,68
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	4,91

Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (2025)

Trend Analisis terhadap tingkat pengangguran dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.27

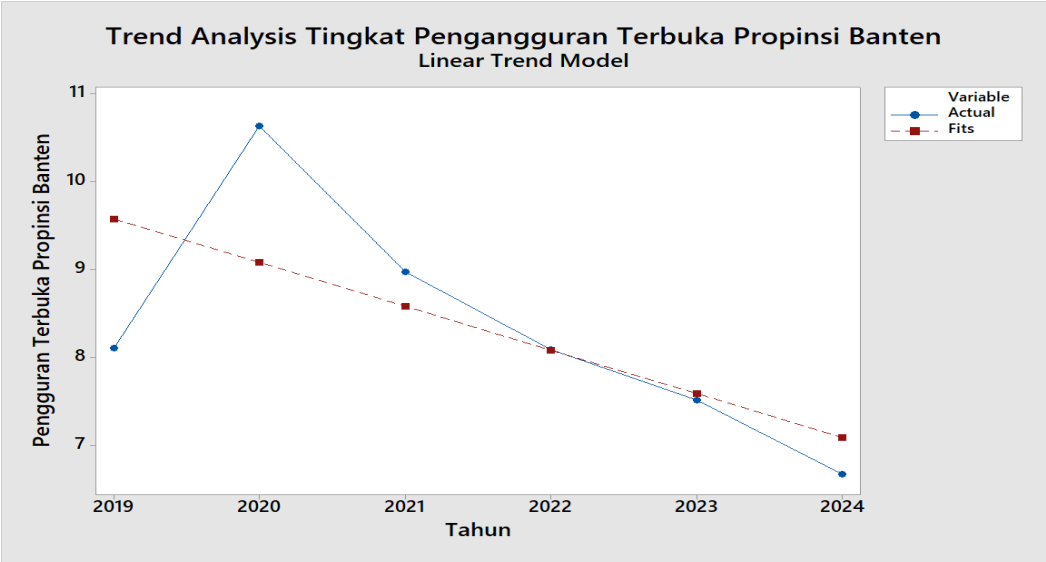
Trend Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tangerang



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar 4.28

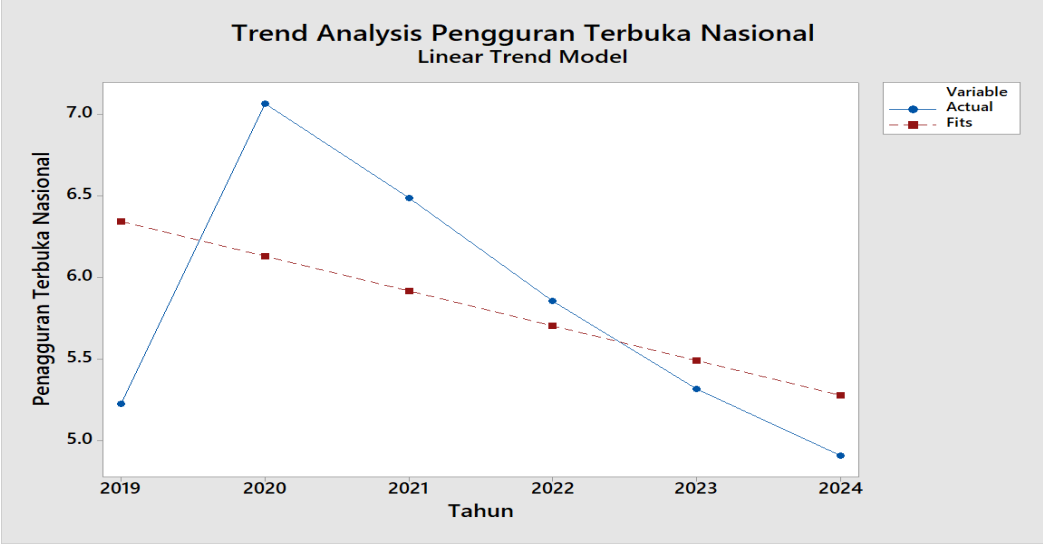
Trend Analisis Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar 4.29

Trend Analisis Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Tangerang (data diolah)

Gambar di atas menunjukan bahwa penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tangerang bahkan lebih tajam dibandingkan penurunan di tingkat provinsi maupun nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun angka penganggurannya relatif tinggi, Kabupaten Tangerang mampu menurunkannya dengan cepat. Dengan analisis tersebut, pemekaran Kabupaten Tangerang diperkirakan dapat semakin mempercepat penurunan tingkat

pengangguran, karena investasi pemerintah di wilayah kabupaten baru berpotensi menjadi stimulus yang memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemekaran dapat menyerap tenaga kerja baik dilingkungan birokrasi pemerintahan daerah, lembaga politik, maupun sektor pekerja infrastruktur pembangunan fasilitas perkantoran pemerintah daerah.

4.3.6 Integrasi Sosial Pasca Urbanisasi

Data dari BPS (2025) menunjukkan bahwa sekitar 22,64 persen penduduk Kabupaten Tangerang merupakan migran seumur hidup, yaitu mereka yang lahir di luar wilayah ini tetapi kini menetap di sana. Angka ini mencerminkan bahwa Tangerang telah lama menjadi daerah tujuan migrasi, dan menjadi bagian pertumbuhan kawasan Jabodetabek. Penduduk Tangerang saat ini sangat dipengaruhi oleh gelombang migrasi masa lalu yang telah membentuknya menjadi wilayah urban.

Sementara itu, migrasi risen antar kabupaten/kota di Tangerang sebesar 4,29 persen (BPS, 2025). Artinya, sampai saat ini arus perpindahan penduduk masih terus terjadi, namun angkanya jauh lebih rendah dibanding masa-masa ekspansi sebelumnya. Kabupaten Tangerang telah bertransformasi menjadi wilayah dengan karakter kota pendatang. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kawasan pesisir mengalami urbanisasi yang menciptakan tekanan terhadap infrastruktur, lingkungan, dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah. Demografi kawasan ini menunjukkan komposisi sosial sebagai *melting-pot* dari berbagai kelompok etnis, namun tetap dengan dominasi budaya pesisir yang khas, termasuk komunitas Betawi Pesisir, masyarakat nelayan, dan akar keagamaan yang kuat, yang dapat menjadi pondasi sosial dalam pembangunan daerah otonom.

4.4 Administrasi Pemerintahan

Salah satu pertimbangan penting dalam pemekaran daerah adalah administrasi pemerintahan. Tanpa pertimbangan administrasi pemerintahan yang matang akan berdampak bagi pemekaran daerah yang beresiko tinggi dalam mencapai tujuan dari pemekaran daerah itu sendiri. Disisi lain dengan pertimbangan yang tidak matang pada aspek administrasi pemerintahan akan menciptakan pelayanan pemerintahan yang lemah karena ketidakmampuannya

memberikan pelayanan yang lebih baik dari harapan pemekaran daerah itu sendiri yakni pemekaran daerah untuk kemudahan akses dan daya jangkau pelayanan pemerintahan.

Tabel 4.24

Kantor Pemerintahan dan Aparatur yang ada di kecamatan induk dan utara

Kecamatan	Kantor dan aparatur serta UPT di kecamatan induk dan utara di Kabupaten Tangerang						
Wilayah Induk	**Kantor kecamatan**	**Personil PNS**	**UPT di Kecamatan**	**Kantor Polsek**	**Personil Polisi**	**Kantor Koramil**	**Personil TNI AD**
- Cisoka	1	16	4	1	35	1	35
- Solear	1	16	3	-	-	-	-
- Tigaraksa	1	36	3	1	35	1	30
- Jambe	1	20	3	-	-	-	-
- Cikupa	1	26	4	1	40	1	30
- Panongan	1	27	3	1	40	-	
- Curug	1	36	4	1	40	1	23
- Kelapa Dua	1	45	4	1	40	-	-
- Legok	1	23	3	1	30	1	21
- Pagedangan	1	31	3	1	40	1	21
- Cisauk	1	25	3	1	30	1	16
- Pasar Kemis	1	40	4	1	40	1	25
- Sindang Jaya	1	15	3	-	-	-	-
- Balaraja	1	20	4	1	40	1	22
- Jayanti	1	16	3	1	16	-	-
- Rajeg	1	25	4	1	30	1	23
Jumlah	16	416	55	13	456	10	246
Wilayah Utara							
- Suka Mulya	1	16	3	1	25	-	-
- Kresek	1	15	3	1	30	1	23
- Gunung Kaler	1	17	3	-	-	-	-
- Kronjo	1	16	3	1	30	1	23
- Mekar Baru	1	19	3	-	-	-	-
- Mauk	1	23	3	1	30	1	32
- Kemiri	1	16	3	-	-	-	-
- Sukadiri	1	22	3	-	-	-	-
- Sepatan	1	26	3	1	35	1	21
- Sepatan Timur	1	17	3	-	-	-	-
- Pakuhaji	1	25	3	1	35	1	19

- Teluknaga	1	24	4	1	35	1	28
- Kosambi	1	39	3	-	-	-	-
Jumlah	13	275	40	7	220	6	146
Kabupaten Tangerang	29	691	95	20	676	16	392

Sumber: Data PNS kecamatan diolah dari Kecamatan Dalam Angka di Kabupaten Tangerang.
Keterangan: (1) Data UPT diambil dari berbagai sumber. Keberadaan UPT pada setiap kecamatan minimal 3 hingga 4 unit secara total di kecamatan.
(2) Data personil Polisi di Polsek dan TNI di Koramil merupakan data perkiraan yang diambil dari berbagai sumber. Data pasti merupakan data internal masing-masing instansi dan tidak terpublikasi.

Data di atas menunjukkan bahwa Tangerang Bagian Utara masih memiliki kekurangan aparat pemerintah daerah yang bertugas di sana karena hingga kajian ini dilakukan, personil pegawai yang berada di sana hanya sejumlah 275 orang. Tentunya untuk penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang akan sangat membutuhkan personil. Demikian halnya dengan Kantor Polsek maupun Kantor Koramil yang berada di Tangerang Bagian Utara juga masih minim bila dibandingkan dengan Kantor Polsek dan Koramil yang ada di Kabupaten Tangerang. Untuk peningkatan pembangunan dan optimalisasi potensi ekonomi diperlukan kepastian keamanan dan stabilitas. Untuk itu kehadiran kantor pemerintah daerah dan kantor kepolisian serta TNI di Tangerang Bagian Utara penting bagi percepatan pembangunan dan pelayanan pemerintahan.

4.5 Penilaian Kemampuan Daerah Otonom Baru

Untuk menilai kemampuan penyelenggaraan pemerintahan bagi calon DOB, dilakukan penilaian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Prosesnya dimulai dari mengumpulkan data kabupaten pembanding di Provinsi Banten, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang, serta data dari Kabupaten Tangerang yang dipilah menjadi data Wilayah Induk dan data wilayah calon DOB.

Data yang digunakan untuk penilaian serta sumber datanya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.25

Data dan Sumber Data yang Digunakan untuk Penilaian Kemampuan DOB Tangerang Utara

No	Data	Kabupaten Pembanding			Kab. Tangerang	Sumber Data Kabupaten Pembanding	Sumber Data Kabupaten Tangerang
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang			
1	**Kependudukan**						
	Jumlah Penduduk	1.463.800	1.338.400	1.720.300	3.309.365	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025; Tabel Jumlah Penduduk Kab Tangerang Menurut Kecamatan (Data Disdukcapil)	Tabel "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Data Disdukcapil)
	Kepadatan penduduk	442	483	1.170	3.342	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025	Tabel "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Data Disdukcapil); Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025
2	**Kemampuan Ekonomi**						
	PDRB	37.631.480.000.000	35.904.680.000.000	102.120.370.000.000	186.104.150.000.000	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025
	PDRB non migas	36.380.760.000.000	34.068.950.000.000	102.022.960.000.000	186.052.960.000.000	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025
	Pertumbuhan ekonomi	2,95	2,75	4,78	5,00	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025
	Kontribusi PDRB non migas	4,17	3,91	11,70	21,33	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang Dalam angka, 2025	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025
3	**Potensi Daerah**						
	Jumlah bank dan lembaga keuangan non bank	43	43	222	166	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025, Tabel Jumlah Kantor Bank Umum Konvensional Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2020–2024	Statistik PODES Kab. Tangerang, 2024, Tabel Banyaknya Lembaga Keuangan Bank Menurut Kecamatan
	Jumlah kelompok pertokoan	141	141	138	657	Statistik Potensi Desa Banten 2024, tabel Banyaknya Kelompok Pertokoan Dan Pasar Menurut Kabupaten/Kota	Statistik PODES Kab. Tangerang, 2024, tabel Banyaknya Kelompok Pertokoan Dan Pasar Menurut Kecamatan
	Jumlah Pasar	67	69	67	289	Statistik Potensi Desa Banten 2024, tabel Banyaknya Kelompok Pertokoan Dan Pasar Menurut Kabupaten/Kota (Pasar dengan Bangunan Permanen, Pasar dengan Bangunan Semi Permanen, Pasar tanpa	Statistik Podes Kab Tangerang 2024, tabel Banyaknya Kelompok Pertokoan Dan Pasar Menurut Kecamatan (Pasar dengan Bangunan Permanen, Pasar dengan Bangunan Semi Permanen, Pasar tanpa Bangunan)

No	Data	Kabupaten Pembanding			Kab. Tangerang	Sumber Data Kabupaten Pembanding	Sumber Data Kabupaten Tangerang
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang			
						Bangunan)	
	Jumlah sekolah SD	1.025	1.055	887	1.355	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Statistik BPS (Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan)	Tabel Statistik BPS (Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan)
	Jumlah Penduduk Usia SD	167.133	150.027	200.671	427.080	Provinsi Banten Dalam Angka, 2026	Tabel Statistik BPS (Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan)
	Jumlah SLTP	493	394	413	667	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan	Tabel statistik BPS (Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan)
	Jumlah Penduduk Usia SLTP	95.725	81.428	99.863	191.980	Provinsi Banten Dalam Angka, 2026	Tabel statistik BPS (Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan)
	Jumlah SLTA	228	259	265	516	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan	Tabel Statistik BPS (Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan)

No	Data	Kabupaten Pembanding			Kab. Tangerang	Sumber Data Kabupaten Pembanding	Sumber Data Kabupaten Tangerang
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang			
	Jumlah Penduduk Usia SLTA	126.504	94.165	104.162	236.593	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025	Tabel Statistik BPS (Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan;Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) Menurut Kecamatan)
	Jumlah fasilitas kesehatan	47	41	39	71	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan Puskesmas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023 dan 2024	Tabel Statistik BPS Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan, 2024
	Jumlah tenaga medis	2.673	3.480	3.151	5.753	Tabel Statistik Sektoral BPS Banten. Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2024	Tabel statistik BPS Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan (Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Tenaga kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Ahli Teknologi Laboratorium Medik)
	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	74	76	80	90	Publikasi BPS, buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten 2024, Tabel Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Aset Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Aset yang Dimiliki di Provinsi Banten, 2024	Publikasi BPS, buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kab Tangerang 2024
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	98	100	100	100	Provinsi Banten dalam Angka, 2025. Tabel Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Banten, 2024	Provinsi Banten dalam Angka, 2025. Tabel Distribusi Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penerangan Utama di Provinsi Banten, 2024
	Panjang jalan	1.124	1.065	1.367	1.242	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten (unit), 2022–2024	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten (unit), 2022–2024
	Jumlah Kendaraan Bermotor	469.398	413.970	733.336	1.357.079	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota

No	Data	Kabupaten Pembanding			Kab. Tangerang	Sumber Data Kabupaten Pembanding	Sumber Data Kabupaten Tangerang
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang			
						Kabupaten/Kota dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten (unit), 2022–2024	dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten (unit), 2022–2024
	Jumlah pekerja yang berpendidikan minimal SLTA	165.872	172.441	329.020	943.771	Tabel Statistik Sektoral BPS Banten/Tabel Statistik Sektoral BPS Kab	Tabel Statistik Sektoral BPS Kab Tangerang
	Jumlah Penduduk Usia 18 tahun ke atas	938.080	1.274.543	1.060.320	2.252.418	Tabel Statistik Sektoral BPS Banten/Tabel Statistik Sektoral BPS Kab	Tabel Statistik Sektoral BPS Kab Tangerang
	Jumlah pekerja yang berpendidikan minimal S-1	36.546	38.948	55.037	175.400	Tabel Statistik Sektoral BPS Banten/Tabel Statistik Sektoral BPS Kab	Tabel Statistik Sektoral BPS Kab Tangerang
	Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas	809.441	1.190.989	904.460	1.968.328	Tabel Statistik Sektoral BPS Banten/Tabel Statistik Sektoral BPS Kab	Tabel Statistik Sektoral BPS Kab Tangerang
	Jumlah ASN	7.624	8.314	7.863	14.465	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang Dalam Angka, 2025	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025. Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Tangerang Menurut Jabatan, Jenis ASN, dan Jenis Kelamin (orang), Desember 2024
4	**Kemampuan Keuangan**						
	1. Jumlah PDS	403.582.198.479	207.940.000.000	944.295.326.625	4.615.943.331.285	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang Dalam angka, 2025	Bappenda Kab tangerang
	2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk	275.709	155.365	548.913	1.394.812	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang Dalam angka, 2025	Bappenda Kab tangerang
	3. Rasio PDS terhadap PDRB	0,0107	0,0058	0,0092	0,0248	Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang Dalam angka, 2025	diolah dari data Bappenda Kab Tangerang dan PDRB Kab Tangerang
5	**Sosial Budaya**						
	Jumlah sarana peribadatan	3.215	3.174	4.058	7.113	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025. Tabel Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, 2023	Tabel Statistik BPS Jumlah Tempat Ibadah menurut Kecamatan (Masjid, Musholla, Gereja Protestan, Gereja Katholik, Kapel, Pura, Vihara, Cetya, Klenteng, Litang)
	Jumlah fasilitas lapangan olahraga	758	649	567	676	Statistik Podes Banten 2024 (fasilitas yang dihitung: Lapangan sepak bola + bola voli + bulutangkis + kolam renang)	Statistik Podes Kab Tangerang 2024 (fasilitas yang dihitung: Lapangan sepak bola + bola voli + bulutangkis + kolam renang)

No	Data	Kabupaten Pembanding			Kab. Tangerang	Sumber Data Kabupaten Pembanding	Sumber Data Kabupaten Tangerang
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang			
	Jumlah balai pertemuan	292	322	316	274	Statistik Podes Banten 2024	Statistik PODES Kab. Tangerang, 2024
6	**Sosial Politik**						
	Jumlah DPT	1.057.325	994.226	1.225.871	2.369.021	Release KPU	
	Jumlah penduduk yang ikut pemilihan	698.959	677.003	904.155	1.590.657	Release KPU	SIREKAP Per Kecamatan di Kab Tangerang
	Jumlah organisasi kemasyarakatan	390	353	126	470	Berita Resmi Kesbangpol Kab Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Database Ormas Terdaftar di di https://poldagriormasbkbptangerangkab.id/layanan/databaseormas
7	**Luas Daerah**						
	Luas wilayah keseluruhan	3.312,180	2.771,410	1.469,910	1.034,510	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025
	Luas Kawasan Pelestarian (termasuk cagar alam dan hutan lindung)	353,390	1.115,890	72,070	16,020	Tabel Statistik BPS Banten "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten Kota dan Fungsi Hutan di Provinsi Banten"	Tabel Statistik BPS Banten "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten Kota dan Fungsi Hutan di Provinsi Banten"
	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	2.958,790	1.655,520	1.397,840	1.018,490	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025; Tabel Statistik BPS Banten "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten Kota dan Fungsi Hutan di Provinsi Banten"	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025; Tabel Statistik BPS Banten "Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten Kota dan Fungsi Hutan di Provinsi Banten"
8	**Pertahanan**						
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	0,243	0,291	0,482	0,908	Publikasi BPS (Buku Situasi Politik dan Keamanan Banten 2023)	Publikasi BPS (Buku Situasi Politik dan Keamanan Banten 2023)
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	1	1	1	1	Merujuk Pedoman Skoring, dan mendapat Skor 1 : Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan	Merujuk Pedoman Skoring, dan mendapat Skor 1 : Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan
9	**Keamanan**						
	Jumlah Personil Polri	798	798	701	965	Publikasi BPS (Buku Situasi Politik dan Keamanan Banten 2023, Tabel Jumlah Personil Polisi dan Rasio per Penduduk)	Publikasi BPS (Buku Situasi Politik dan Keamanan Banten 2023, Tabel Jumlah Personil Polisi dan Rasio per Penduduk)
10	**Tingkat Kesejahteraan**						

No	Data	Kabupaten Pembanding			Kab. Tangerang	Sumber Data Kabupaten Pembanding	Sumber Data Kabupaten Tangerang
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang			
	Masyarakat						
	1. Indeks Pembangunan Manusia	65,86	66,99	69,03	74,09	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025	Provinsi Banten Dalam Angka, 2025
11	**Rentang Kendali**						
	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) (km)	58,14	38,88	25,76	15,96	Tabel Statistik Sektoral BPS Kab Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025, Tabel Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang, 2024
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) (menit)	116	78	52	32	Tabel Statistik Sektoral BPS Kab Lebak, Pandeglang, Serang, Tangerang	Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2025, Tabel Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Tangerang, 2024

Sumber: Data BPS (diolah)

Data tersebut diatas selanjutnya diolah untuk menyusun Faktor dan Indikator Penilaian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Selanjutnya, dihitung nilai rata-rata kabupaten pembanding, interval nilai dan pedoman dalam pemberian skor bagi calon DOB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.26

Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding, Interval Nilai dan Pedoman Pemberian Skor bagi Calon DOB Tangerang Utara

No	Faktor dan Indikator	Kab Pembanding				Interval	Pedoman Pemberian Skor DOB				
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang	Rata-rata		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
1	**Kependudukan**										
	1. Jumlah Penduduk	1.463.800	1.338.400	1.720.300	1.507.500	301.500	0	301.500,00	603.000,00	904.500,00	1.206.000,00
	2. Kepadatan penduduk	442	483	1.170	698,33	139,67	0	139,67	279,33	419,00	558,67
2	Kemampuan Ekonomi										
	1. PDRB non migas perkapita	24.853.641	25.454.984	59.305.330	36.537.985	7.307.597	0	7.307.597,02	14.615.194,03	21.922.791,05	29.230.388,06
	2. Pertumbuhan ekonomi	2,950	2,750	4,780	3,493	0,70	0	0,70	1,40	2,10	2,79

No	Faktor dan Indikator	Kab Pembanding				Interval	Pedoman Pemberian Skor DOB				
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang	Rata-rata		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
	3. Kontribusi PDRB non migas	4,170	3,905	11,695	6,590	1,32	0	1,32	2,64	3,95	5,27
3	Potensi Daerah										
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	0,294	0,321	1,290	0,635	0,127	0	0,127	0,254	0,381	0,508
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	0,963	1,053	0,802	0,940	0,188	0	0,188	0,376	0,564	0,752
	3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk	0,458	0,516	0,389	0,454	0,091	0	0,091	0,182	0,273	0,363
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	0,0061	0,0070	0,0044	0,006	0,00117	0	0,00117	0,00234	0,00352	0,00469
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	0,0052	0,0048	0,0041	0,005	0,00094	0	0,00094	0,00188	0,00282	0,00377
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	0,0018	0,0028	0,0025	0,002	0,00047	0	0,00047	0,00095	0,00142	0,00189
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	0,3211	0,3063	0,2267	0,285	0,05694	0	0,05694	0,11388	0,17082	0,22777
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	18,2607	26,0012	18,3166	20,859	4,17190	0	4,17190	8,34379	12,51569	16,68759
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	74,12	76,29	80,22	76,877	15,38	0	15,38	30,75	46,13	61,50
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	98,4	100,0	100,0	99,447	19,889	0	19,89	39,78	59,67	79,56
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	0,0024	0,0026	0,0019	0,002	0,00046	0	0,00046	0,00091	0,00137	0,00182
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	17,682	13,530	31,030	20,747	4,149	0	4,149	8,299	12,448	16,598
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	4,5150	3,2702	6,0851	4,623	0,925	0	0,925	1,849	2,774	3,699
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	0,0052	0,0062	0,0046	0,005	0,00107	0	0,00107	0,00213	0,00320	0,00426
4	Kemampuan Keuangan										
	1. Jumlah PDS	403.582	207.940.	944.29	518.605.	103.721.	0	103.7	207.44	311.16	414.88

No	Faktor dan Indikator	Kab Pembanding				Interval	Pedoman Pemberian Skor DOB				
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang	Rata-rata		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
		.198.479	000.000	5.326.625	841.701,333	168.340		21.168.340	2.336.681	3.505.021	4.673.361
	2. Rasio PDS terhadap Jumlah Penduduk	275.709	155.365	548.913	326.662,117	65.332,4	0	65.332,4	130.664,8	195.997,3	261.329,7
	3. Rasio PDS terhadap PDRB	0,01072	0,00579	0,00925	0,009	0,00172	0	0,00172	0,00344	0,00515	0,00687
5	Sosial Budaya										
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	21,96338	23,71488	23,58891	23,089	4,61781	0	4,61781	9,23562	13,85344	18,47125
	2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	5,17830	4,84907	3,29594	4,441	0,88822	0	0,88822	1,77644	2,66466	3,55288
	3. Jumlah balai pertemuan	292	322	316	310	62	0	62	124	186	248
6	Sosial Politik										
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif thd penduduk yang mempunyai hak pilih	0,6611	0,6809	0,7376	0,693	0,14	0	0,14	0,28	0,42	0,55
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	390	353	126	289,667	57,93	0	57,93	115,87	173,80	231,73
7	Luas Daerah										
	1. Luas wilayah keseluruhan	3.312,2	2.771,4	1.469,9	2.517,833	503,567	0	503,567	1.007,133	1.510,700	2.014,27
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	2.958,790	1.655,520	1.397,840	2.004,050	400,810	0	400,810	801,620	1.202,430	1.603,24
8	Pertahanan										
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	0,2434	5,5264	0,4820	2,0839	0,4168	0	0,4168	0,8336	1,2504	1,6671
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	1	1	1	1	0,2	0	0,20	0,40	0,60	0,80
9	Keamanan										
	1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan terhadap jumlah penduduk	0,00054516	0,00059623	0,00040749	0,0005163	0,000103	0	0,000103	0,000207	0,000310	0,000413
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat										
	1. Indeks Pembangunan Manusia	65,86	66,99	69,03	67,2933333	13,459	0	13,459	26,917	40,376	53,835
11	Rentang Kendali										
	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota	58,14	38,88	25,76	40,93	8,2	0	8,2	16,4	24,6	32,7

No	Faktor dan Indikator	Kab Pembanding				Interval	Pedoman Pemberian Skor DOB				
		Lebak	Pandeglang	Kab. Serang	Rata-rata		Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
	provinsi atau ibukota kabupaten) (km)										
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) (menit)	116	78	52	82	16,4	0	16,4	32,7	49,1	65,5

Sumber: Data BPS (diolah)

Penilaian terhadap calon DOB Tangerang Utara (13 Kecamatan) serta Wilayah Induk (16 Kecamatan) dilakukan dengan melihat data setiap wilayah, memberikan Skor sesuai pedoman interval yang telah disusun sebelumnya, dan mengalikan skor dengan bobot sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Hasilnya adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.27

Penilaian Skor Calon DOB Tangerang Utara dan Wilayah Induk

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Kab. Tangerang			Skor		Nilai (Skor X Bobot)	
			Kab. Tangerang	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB
1	Kependudukan	20							
	1. Jumlah Penduduk	15	3.309.365	2.163.017	1.146.348	5	4	75	60
	2. Kepadatan penduduk	5	3.342	3.674	2.571	5	5	25	25
2	Kemampuan Ekonomi	15							
	1. PDRB non migas perkapita	5	56.220.139	56.220.139	56.220.139	5	5	25	25
	2. Pertumbuhan ekonomi	5	5	5	5	5	5	25	25
	3. Kontribusi PDRB non migas	5	21,328	13,940	7,388	5	5	25	25
3	Potensi Daerah	15							
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000	2	0,502	0,310	0,209	3	2	6	4

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Kab. Tangerang			Skor		Nilai (Skor X Bobot)	
			Kab. Tangerang	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB
	penduduk								
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1	1,985	2,478	1,056	5	5	5	5
	3. Rasio Pasar per 10.000 penduduk	1	0,873	0,962	0,707	5	5	5	5
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1	0,0032	0,0029	0,0037	3	4	3	4
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1	0,0035	0,0032	0,0040	4	5	4	5
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1	0,0022	0,0020	0,0026	5	5	5	5
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1	0,2145	0,2312	0,1832	5	4	5	4
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1	17,3840	21,1788	10,2238	5	3	5	3
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor	1	89,84	89,94	89,94	5	5	5	5
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1	100,0	100,0	100,0	5	5	5	5
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1	0,0009	0,0008	0,0011	2	3	2	3
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1	41,900	41,900	41,900	5	5	5	5
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1	8,9111	8,9111	8,9111	5	5	5	5
	14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1	0,0044	0,0044	0,0044	5	5	5	5
4	Kemampuan Keuangan	15							
	1. Jumlah PDS	5	4.615.943.331.285	2.726.834.027.288	889.001.918.771	5	5	25	25
	2. Rasio PDS terhadap	5	1.394.81	1.260.6	775.50	5	5	25	25

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Kab. Tangerang			Skor		Nilai (Skor X Bobot)	
			Kab. Tangerang	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB
	Jumlah Penduduk		2	62	8				
	3. Rasio PDS terhadap PDRB	5	0,02480	0,02242	0,01379	5	5	25	25
5	Sosial Budaya	5							
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2	21,49355	19,73632	24,81794	5	5	10	10
	2. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2	2,04269	1,92786	2,25935	3	3	6	6
	3. Jumlah balai pertemuan	1	274	150	124	3	3	3	3
6	Sosial Politik	5							
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif thd penduduk yang mempunyai hak pilih	3	0,6714	0,6531	0,7077	5	5	15	15
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2	470	352	118	5	3	10	6
7	Luas Daerah	5							
	1. Luas wilayah keseluruhan	2	1.034,5	588,7	445,8	2	1	4	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3	1.018,490	588,710	429,780	2	2	6	6
8	Pertahanan	5							
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3	0,9078	0,9137	0,9137	3	3	9	9
	2. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan	2	1	1	1	5	5	10	10
9	Keamanan	5							
	1. Rasio jumlah personil aparat Keamanan terhadap jumlah penduduk	5	0,00029160	0,000292	0,000292	3	3	15	15
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	5							
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5	74,09	74,09	74,09	5	5	25	25
11	Rentang Kendali	5							
	1. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau	2	15,96	10,69	22,45	2	3	4	6

No	Faktor dan Indikator	Bobot	Kab. Tangerang			Skor		Nilai (Skor X Bobot)	
			Kab. Tangerang	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB	Wil. Induk	DOB
	kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) (km)								
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) (menit)	3	32	30	60	2	4	6	12
	Total	100						**438**	**423**

Sumber: Data BPS (diolah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori Sangat Mampu (420-500) atau Mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75).

DOB Tangerang Utara memperoleh nilai akhir 423, dengan perolehan nilai indikator faktor kependudukan 85, faktor kemampuan ekonomi 75, faktor potensi daerah 63 dan faktor kemampuan keuangan 75. Wilayah Induk yang ditinggalkan memperoleh nilai akhir 438, dengan perolehan nilai indikator faktor kependudukan 100, faktor kemampuan ekonomi 75, faktor potensi daerah 65 dan faktor kemampuan keuangan 75. Angka ini menunjukan bahwa DOB Tangerang Utara maupun Wilayah Induknya termasuk dalam kategori “Sangat Mampu” untuk menjadi daerah otonom.

4.6 Dukungan Politik

1. Dukungan Politik dari Anggota DPR RI

   Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pemekaran (pembentukan DOB) termasuk pemekaran seperti

Tangerang Utara belum dapat diproses lebih lanjut secara efektif karena harus menunggu pengesahan dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sangat penting sebagai "fondasi" untuk pemekaran wilayah secara jangka panjang, karena akan menjadi acuan "cetakan peta kebijakan" pemekaran di masa mendatang. Sikap tersebut menunjukkan bahwa Komisi II tidak mempermasalahkan pemekaran daerah, akan tetapi harus memiliki acuan sebagai "desain besar" bagi penataan daerah terlebih dahulu, bukan pemekaran individual secara langsung sebelum Peraturan Pemerintah tersebut disahkan.

Menyikapi kondisi yang ada di DPR RI menunjukkan hambatan bukan pada "moratorium" (yang dulu sempat jadi isu) melainkan menunggu aturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) agar pemekaran bisa dinilai dengan lebih sistematis dan adil. Jadi meskipun Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara menyuarakan usulan ke Komisi II, ada hambatan regulasi sehingga tidak cukup hanya aspirasi semata, tetapi juga aspek legal dan administratif yang belum selesai di tataran Peraturan Pemerintah.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (saat rapat dengan DPR Komisi II), ada ratusan usulan DOB, hingga April 2025 tercatat 341 usulan pemekaran dari berbagai daerah. Karena begitu banyak usulan, DPR (Komisi II) perlu melakukan seleksi dan melakukan kajian menyeluruh, serta cenderung memperlakukan pemekaran dengan hati-hati dan memperhitungkan berbagai pertimbangan, agar tidak sekadar fragmentasi administratif tanpa pertimbangan keuangan dan manfaat jangka panjang.

Dukungan DPR RI belum jelas kuat. Meski ada pertemuan Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara dengan anggota Komisi II dan sambutan positif, namun tidak ada laporan bahwa DPR RI secara resmi mendukung RUU pemekaran menjadi Kabupaten Tangerang Utara (misalnya, belum ada rancangan RUU pembentukan Kabupaten Tangerang Utara yang disosialisasikan secara luas di DPR atau media nasional legislatif).

Regulator vs politik lokal. Hambatan utamanya bukan hanya politik, tetapi regulasi (PP) yang menurut Komisi II DPR masih dalam proses/menunggu. Ini menunjukkan bahwa usulan pemekaran tidak hanya persoalan politik lokal, tapi juga teknis pemerintahan dan regulasi pusat.

2. Dukungan Politik dari Anggota DPD RI

Anggota DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) dari Banten, Habib Ali Alwi, secara eksplisit mendukung pemekaran Tangerang Utara. Ia menyatakan restu dan memberikan dukungan agar Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara melakukan kajian untuk pembentukan kabupaten baru karena DPD fokus pada aspirasi daerah, dukungan DPD bisa membantu legitimasi dorongan pemekaran, tetapi bukan jaminan bahwa DPR RI akan menyetujui RUU. Lebih lanjut dia bahkan memprediksi pembentukan Kabupaten Tangerang Utara bisa terjadi pada tahun 2026.

Peran DPD cukup besar. Dukungan dari DPD (Habib Ali) cukup strategis, karena DPD mewakili aspirasi daerah, tetapi dalam proses legislasi pembentukan DOB, DPR (Komisi II) punya peran yang lebih sentral. Dalam hal ini restu DPD saja tidak cukup — DPR (terutama Komisi II) harus mengakomodasi dalam RUU atau regulasi formal, dan itu masih terganjal PP.

3. Dukungan politik dari Gubernur Provinsi Banten

Gubernur Banten sangat mendukung pelaksanaan pemekaran daerah karena pemekaran dilihat sebagai alat untuk pemerataan pembangunan dan efisiensi pelayanan. Daerah Otonomi Baru (DOB), diharapkan bisa mempercepat pembangunan daerah yang selama ini “terabaikan” karena jarak atau ukuran wilayah yang sangat besar, sehingga menjadi salah satu motivasi pemekaran adalah untuk pembangunan yang lebih berkeadilan di Banten, terutama mengurangi kesenjangan antar wilayah. Gubernur Banten memosisikan DOB sebagai solusi untuk “wilayah terpencil / luas” agar pemerintahan bisa lebih dekat ke masyarakat.

4. Dukungan politik dari DPRD Provinsi Banten

DPRD Provinsi Banten, khususnya Ketua Komisi II, Iip Makmur dari Fraksi PKS, secara publik menyatakan dukungan untuk pencabutan moratorium pemekaran. Ia mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran daerah ("DOB"). Menurut Iip Makmur, pembentukan DOB (daerah otonomi baru) diperlukan untuk melayani publik dan pemerataan pembangunan di Banten. Demikian halnya Wakil Ketua DPRD Banten dari Partai Gerindra, Yudi Wibowo, menyebut bahwa moratorium yang masih berlaku menjadi kendala untuk melanjutkan pemekaran.

Dalam hal ini DPRD Provinsi Banten tidak menolak pemekaran, sebaliknya, mereka secara aktif mendorong bahkan pulihnya wacana DOB melalui desakan mencabut moratorium. Alasan DPRD Banten mendorong pemekaran adalah pelayanan publik dan pemerataan pembangunan di beberapa wilayah (terutama daerah yang jauh atau kurang terlayani). Desakan mereka menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Banten melihat pemekaran sebagai salah satu solusi struktural (bukan sekadar politik lokal) untuk menyelesaikan ketimpangan pembangunan dan pelayanan pemerintahan.

5. Dukungan politik dari Bupati Tangerang

Bupati Tangerang, Maesyal Rasyid, menyatakan restu untuk kajian pembentukan Tangerang Utara, dengan catatan pemekaran harus untuk "kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan." Ini menandakan dorongan lokal cukup kuat, sekaligus dianggap sebagai sinyal positif dari eksekutif daerah bahwa pemekaran bukan sekadar wacana politik, tapi bagian dari strategi pembangunan. Tetapi belum tentu langsung diterjemahkan oleh DPR RI sebagai RUU pembentukan.

Bupati Tangerang menyatakan memberi ruang untuk pengkajian pemekaran Tangerang Utara dan menekankan bahwa pemekaran harus "untuk kesejahteraan masyarakat" dan pemerataan pembangunan. Bupati Tangerang juga mengharapkan pembangunan di wilayah calon DOB tidak hanya fokus pada area yang sudah maju (misalnya Kosambi, Teluk Naga),

tetapi merata ke kecamatan lain seperti Kemiri, Mauk, Kronjo. Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pemekaran, salah satu kriteria penting adalah "lokasi pusat pemerintahan strategis dan mudah dijangkau" agar administrasi baru bisa efektif.

Bupati Tangerang mengingatkan bahwa pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah calon DOB tetap dijalankan sebagai bagian dari persiapan pemekaran. Disisi lain disampakan bahwa "usulan DOB Tangerang Utara tetap berjalan sesuai prosedur." Walau hal itu beresiko bahwa Proses "sesuai prosedur" masih panjang, dan ada risiko bahwa meskipun kajian dilakukan, pemekaran tidak jalan jika faktor regulasi pusat (misalnya moratorium) menghambat.

6. Dukungan Politik dari Anggota DPRD Kabupaten Tangerang

Aspirasi Lokal Lebih Banyak di DPRD Kabupaten Tangerang. Upaya politik untuk pemekaran saat ini lebih aktif di tingkat lokal (DPRD Kabupaten Tangerang) daripada di DPR RI. Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara lebih banyak melakukan audiensi dengan DPRD untuk memasukkan pemekaran ke RPJMD.

Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Tangerang dalam rangka mendorong pemekaran Tangerang Utara masuk ke RPJMD Kabupaten Tangerang 2025-2029. Dalam audiensi, Ketua Pansus DPRD menyatakan dukungan dan menyebut bahwa kajian pemekaran Tangerang Utara "sedang berlangsung" dan siap diperjuangkan agar menjadi bagian dari RPJMD.

Di DPRD Kabupaten Tangerang, Pansus RPJMD 2025–2029 menggelar audiensi dengan Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara dan menyatakan dukungan aspirasi pemekaran. Dalam audiensi dengan Bapeda, Ketua Pansus 1 (RPJMD) menyatakan bahwa aspek sosial, fiskal, dan tata ruang wilayah sudah layak untuk pemekaran. Sedangkan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Tangerang mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang agar konsisten

mendukung pemekaran Tangerang Utara dan memasukkan agenda DOB ke dalam RPJMD 2025-2029.

Namun, meski DPRD Kabupaten Tangerang mendukung, laporan menyebut bahwa pemekaran Tangerang Utara tidak dimasukkan dalam RPJMD 2025–2030. Ini bisa menjadi sinyal bahwa perjuangan legislatif lokal masih berbelit dan belum sepenuhnya diterima oleh semua fraksi / pihak lokal. Dalam Rapat Paripurna pada 4 Agustus 2025, DPRD Kabupaten Tangerang bersama Pemkab menyetujui bahwa pemekaran Tangerang Utara dan Tangerang Tengah tidak akan dimasukkan ke dalam RPJMD 2025–2030. Keputusan itu disebabkan pertimbangan moratorium pemekaran pusat dan jangka waktu RPJMD (5 tahun), menurut Sekda Soma Atmaja. Keputusan rapat paripurna DPRD tersebut dengan mengecualikan pemekaran Kabupaten Tangerang Utara dari RPJMD bisa melemahkan momentum DOB, terutama jika kajian dan dukungan lokal tidak diikuti oleh komitmen DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk jangka panjang.

Walau disisi lain Ketua DPRD Kabupaten Tangerang (Muhamad Amud) menyatakan dukungan agar kajian DOB Tangerang Utara dimasukkan dalam RPJMD 2025–2029, sehingga DPRD Kabupaten Tangerang menganggarkan dana untuk kajian DOB Tangerang Utara. Ketua DPRD Muhamad Amud menyebut bahwa kajian bisa dilakukan mulai 2026. Dia menekankan perlunya dialog publik, analisis potensi, dan perencanaan tata ruang agar pemekaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat utara.

Adapun Partai Demokrat lokal di Kabupaten Tangerang mendukung aspirasi pemekaran DOB untuk Tangerang Utara. Namun, dukungan ini berasal dari level lokal (DPC / DPRD), bukan dari DPR RI pusat (meskipun bisa menjadi basis tekanan politik ke DPR). Demikian halnya Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kabupaten Tangerang mendorong agar DOB Tangerang Utara (dan Tangerang Tengah) dimasukkan ke RPJMD 2025–2029. Fraksi Demokrat menekan agar pemekaran dicantumkan secara eksplisit di RPJMD sebagai komitmen hukum, bukan sekadar wacana untuk anggaran persiapan pemekaran. Ketua Fraksi

Demokrat, M. Nawa Said, menyatakan pemekaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan. Sedangkan dari empat fraksi DPRD Kabupaten Tangerang (PDIP, Demokrat, PAN, NasDem) terkait usulan DOB Tangerang Utara dan Tengah saat persetujuan RPJMD memberikan *catatan kritis*. Strategi DPRD tampaknya lebih ke "mendorong kajian dan persiapan" daripada pemekaran langsung saat ini, mengingat hambatan regulasi dan durasi RPJMD.

7. Dukungan Politik dari Masyarakat Kabupaten Tangerang

Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara telah berupaya meminta dukungan ke DPR RI. Mereka secara khusus bertemu dengan Mardani Ali Sera, anggota Komisi II DPR RI, untuk meminta arahan dan dukungan. Dalam pertemuan tersebut, Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara menekankan potensi demografis, ekonomi, dan kebutuhan pelayanan publik di wilayah Tangerang Utara. Menurut Ketua Bapeda, Komisi II DPR memberikan sambutan positif atas pemekaran tersebut.

Tekanan dari masyarakat maupun Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara karena Bapeda terus melakukan lobi ke DPR dan DPD, plus menyuarakan aspek-aspek pelayanan publik, potensi untuk memenangkan dukungan semakin mungkin jika mereka bisa menjelaskan manfaat pemekaran secara matang.

Kepala Desa Bojong Renged (di wilayah calon DOB) menyatakan dukungan, tapi meminta agar statusnya tetap *kabupaten*, bukan kota. Ini menunjukkan ada variasi aspirasi lokal: sebagian ingin pemekaran, tetapi mereka memiliki preferensi tertentu (kabupaten, bukan kota). Hal yang sama dikemukakan seorang Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Teluknaga menyatakan dukungan untuk DOB Tangerang Utara asalkan statusnya kabupaten, bukan kota. Ini menunjukkan ada aspirasi lokal yang spesifik dan tidak semua pihak mendukung model "kota"; preferensi administratif lokal penting dalam pembentukan DOB. Adapun Ketua Badan Persiapan Pembentukan Daerah (Bapeda) Tangerang Utara, Prayogo Ahmad Zaidi,

menyatakan konsep yang diusulkan adalah “kabupaten,” bukan kota. Penyebutan ini dalam media menunjukkan bahwa kajian pemekaran lokal memperhitungkan struktur administratif yang diinginkan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa identitas administratif calon DOB menjadi isu penting di mata masyarakat lokal, terutama kepala desa dan tokoh lokal, yang menginginkan struktur administratif yang “lebih besar” (kabupaten) agar bisa mendapat manfaat pemerataan yang lebih luas.

Demikian halnya dengan tokoh lokal, seperti dari Forum Transformasi Pantura, menyuarakan bahwa pemekaran bisa membuka ruang investasi dan peluang pekerjaan di Tangerang Utara, sehingga Tangerang Utara bisa menjadi “pusat ekonomi baru” di Banten jika dimekarkan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian kelayakan pemekaran daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, baik calon Daerah Otonom Baru (DOB) Tangerang Utara maupun wilayah induknya memenuhi seluruh persyaratan minimum dan sama-sama berada pada kategori "Sangat Mampu" untuk menjadi daerah otonom. DOB Tangerang Utara memperoleh nilai total 423 dan wilayah induk memperoleh 438, keduanya melampaui ambang batas 420. Seluruh faktor penilaian kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, dan kemampuan keuangan juga berada dalam rentang nilai yang ditetapkan. Dengan demikian, pemekaran Kabupaten Tangerang layak dan dapat direkomendasikan, karena kedua wilayah memiliki kapasitas yang cukup untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola pembangunan secara mandiri.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka rekomendasi yang dapat dikemukakan pada kajian ini sebagai berikut:

1. Perlu penelitian mendalam terkait persepsi, aspirasi dan kesediaan masyarakat, termasuk pemerintah desa di wilayah utara, untuk memastikan persetujuan serta kesiapan sosial dan politik jika akan dilakukan pemekaran.
2. Perlu kajian komprehensif mengenai calon lokasi ibu kota DOB Tangerang Utara, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, ketersediaan lahan, infrastruktur dasar, potensi pengembangan kawasan, serta aspek mitigasi risiko bencana.
3. Perlu rencana induk *(masterplan)* pembangunan DOB Tangerang Utara, yang mencakup tata ruang, pelayanan publik, kelembagaan pemerintahan, dan strategi fiskal jangka menengah untuk memastikan keberlanjutan operasional daerah baru.

4. Perlu koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Pusat, agar proses administratif, verifikasi dokumen, dan tahapan pembentukan DOB berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bintarto, R. 1983, *Interaksi Desa dan Kota serta Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Friedmann, J., & Alonso, W., 1964, *Regional Development and Planning: A Reader*. Cambridge: MIT Press.

Gie, The Liang, 1995, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara RI, I, II, dan III*, Yogyakarta: Liberty.

Haggett, P., 2001, *Geography: A Global Synthesis*. New York: Prentice Hall.

Kaho, Josep Riwu, 1991, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya)*. Jakarta: Rajawali.

Klinken, G. V., 2007, *Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small Town Wars.* New York: Routledge.

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1978, *Perkembangan Fungsi dan Struktur Pamong Praja Ditinjau dari Segi Sejarah.* Bandung: Alumni.

Kuncoro. M, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Manan. Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah.* Yogyakarta: PSH FH UII Yogyakarta.

Said, A., & Sjaf, S., 2010, *Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah: Antara Harapan dan Realita.* Jakarta: LIPI Press.

Soetomo, 2009, *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suryaningrat, Bayu, 1980, *Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia Suatu Analisa.* Jakarta: Dewa Ruci Press.

Syarif, A., 2012, *Dinamika Politik Pemekaran Daerah di Era Reformasi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, M. P., & Smith, S. C., 2015, *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson.

Wasistiono, S., 2013, *Pengantar Ekologi Pemerintahan (Edisi Revisi)*. IPDN Press.

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan*: *Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKN Yogyakarta.

Wohlers, Terry, 2007, *Rapid Prototyping and manufacturing*. State of Industry, Annual Worldwide Progress Report, English: Wohlers Associaties.

Yunus, H. S., 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah dan Perkotaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

Fitrani, F., Hofman, B., & Kaiser, K., 2005, *Unity in Diversity? The Creation of New Local Governments in a Decentralizing Indonesia.* World Bank Policy Research Working Paper.

Firman, T., 2009, *Decentralization Reform and Local-Government Proliferation in Indonesia. Asian Survey*, 49(4), 605–625.

Hidayat, D., & Anwar, F., 2023, *Dampak Pemekaran terhadap Kesejahteraan dan Infrastruktur Daerah di Indonesia. Jurnal Pembangunan Regional*, 8(1), 11–28.

Kuncoro, M., & Idris, A., 2017, *Regional Development and Local Economic Growth Post-Decentralization. Indonesian Journal of Regional Studies*, 12(3), 45–59.

Lewis, B. D., 2014, *Local Government Formation and Regional Income Disparities in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 183–207.

Lewis, B. D., dan Bambang Brodjonegoro, 2003, "*Fiscal Implication of Decentralization", dalam Fiscal Policy and Financing for the New Era*.

Miura, S., Lee, J., & Kim, S., 2025, *Citizen Participation and Political Efficacy at the Grassroots Level: The Case of Residents' Self-Governance Associations in Seoul, South Korea*. *Asian Journal of Political Science*, 33(2), 102–120.

Nugraha, A., 2021, *Evaluasi Efisiensi Fiskal Daerah Pemekaran di Indonesia. Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 77–93.

Nurmiati, 2019, *Analisis Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Pendekatan Skoring dan Pembobotan*, Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kebijakan Publik, Vo.10 No.1.

Perroux, F., 1950, *Economic Space: Theory and Applications*. *Quarterly Journal of Economics*, 64(1), 89–104.

Rasyid, R., 2018, *Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kinerja Pelayanan Publik di Wilayah Baru. Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(1), 15–30.

Santoso, 2015, *Evaluasi Kelayakan Pemekaran Wilayah dengan Model Pembobotan Multikriteria*, Jurnal Administrasi Publik Indonesia, Vol. 4 No.2.

Simanjuntak, L., 2022, *Kapasitas Birokrasi Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Baru. Jurnal Pemerintahan Daerah*, 4(1), 40–55.

Sukmana, O., 2020, *Etnisitas dan Identitas Lokal dalam Proses Pemekaran Wilayah di Indonesia. Jurnal Sosial dan Politik*, 23(3), 220–236.

Widada, R., Hakim, D. B., & Mulatsih, S., 2014, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, *3*(2).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 pada Pasal 18 ayat (2).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

D. Dokumen

Bappenda Kabupaten Tangerang Tahun 2025.

Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2024.

Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2025

Kabupaten Pandeglang Dalam Angka, 2025

Kabupaten Serang Dalam Angka, 2025

Kecamatan Balaraja Dalam Angka, 2025

Kecamatan Cikupa Dalam Angka, 2024

Kecamatan Cisauk Dalam Angka, 2025

Kecamatan Cisoka Dalam Angka 2024

Kecamatan Curug Dalam Angka 2025

Kecamatan Gunung Kaler Dalam Angka 2025

Kecamatan Jambe Dalam Angka 2025

Kecamatan Jayanti Dalam Angka 2024

Kecamatan Kelapa Dua Dalam Angka 2025

Kecamatan Kemiri Dalam Angka 2024

Kecamatan Kosambi Dalam Angka 2025

Kecamatan Kresek Dalam Angka 2025

Kecamatan Kronjo Dalam Angka 2025

Kecamatan Legok Dalam Angka 2025

Kecamatan Mauk Dalam Angka 2025

Kecamatan Mekar Baru Dalam Angka 2024

Kecamatan Pagedangan Dalam Angka 2025

Kecamatan Pakuhaji Dalam Angka 2025

Kecamatan Panongan Dalam Angka 2024

Kecamatan Pasarkemis Dalam Angka 2025

Kecamatan Rajeg Dalam Angka 2025

Kecamatan Sepatan Dalam Angka 2025

Kecamatan Sepatan Timur Dalam Angka 2025

Kecamatan Sindang Jaya Dalam Angka 2025

Kecamatan Solear Dalam Angka 2025

Kecamatan Sukadiri Dalam Angka 2025

Kecamatan Sukamulya Dalam Angka 2025

Kecamatan Teluknaga Dalam Angka 2024

Kecamatan Tigaraksa Dalam Angka 2025

Provinsi Banten Dalam Angka, 2025

Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang, 2024

Statistik PODES Banten, 2024

Statistik PODES Kabupaten Tangerang, 2024

E. Internet

https://banten.antaranews.com/berita/336917/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-tangerang-utara

https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528960563/pemekaran-kabupaten-tangerang-utara-solusi-atau-tantangan-baru?page=all

https://lintascakrawalanews.com/2025/06/13/percepatan-kabupaten-tangerang-utara-jalan-menuju-pemerintahan-yang-lebih-dekat-dan-resfonsif/

https://www.timenews.co.id/nasional/99514340333/tangerang-utara-siap-mekar-pusat-ekonomi-baru-di-provinsi-banten-yang-siap-tumbuh-pesat

https://www.neraca.co.id/article/220030/bupati-tangerang-beri-ruang-pengkajian-pembentukan-daerah-otonomi-baru?utm_source=chatgpt.com

https://www.radarbanten.co.id/2025/08/19/1-juta-warga-banten-masuk-miskin-ekstrem-kabupaten-tangerang-sumbang-jumlah-terbesar/